

**KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR
DAERAH DI WILAYAH KEDUNGSEPUR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**PRIMASTO ARDI MARTONO
L4D007014**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR DAERAH DI
WILAYAH KEDUNGSEPUR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

PRIMASTO ARDI MARTONO
L4D007014

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 Desember 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Sri Rahayu, SSi, MSi

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang Pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Instiusi lain maka saya bersedia menerima sangsi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik, dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 30 Desember 2008

PRIMASTO ARDI MARTONO
NIM L4D007014

*Dalam hidup ini baiknya bukan untuk
melebihi orang lain,
tetapi untuk menjadi diri kita
yang lebih baik dari hari kemarin*

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah,
tempatku bekerja yang mengilhami penulisan Tesis ini.
Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
Kerjasama Regional Kedungsepur. Amien

ABSTRAK

Wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Tertentu yang terdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dengan demikian wilayah ini direncanakan sebagai pusat pertumbuhan nasional. Guna mendorong terjadinya pertumbuhan wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah di wilayah Kedungsepur. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mendorong terjadinya kerjasama antar daerah tersebut sangat diperlukan, diantaranya dengan menggali sektor-sektor potensial lintas daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah dalam perekonomian wilayah Kedungsepur. dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memandang wilayah Kedungsepur sebagai wilayah nodal yang masing-masing bagian wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan wilayah-wilayah tersebut saling terkait sesuai dengan spesialisasi wilayah. Sebagai akibat dari adanya keterkaitan antar daerah dalam wilayah Kedungsepur adalah terjadinya aliran barang, jasa ataupun manusia. Besarnya aliran tersebut akan menentukan besarnya keterkaitan antar daerah.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan pengidentifikasian wilayah Kedungsepur yang meliputi: identifikasi karakteristik fisik, kependudukan dan ekonomi. Identifikasi ini untuk mengetahui potensi wilayah yang dapat menunjang interaksi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur. Identifikasi yang kedua adalah identifikasi sektor basis yaitu sektor yang dapat diandalkan potensinya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya dan memiliki keunggulan komperatif yang merupakan faktor penentu bagi peningkatan pendapatan suatu daerah. Kemudian dilakukan identifikasi keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur melalui keterkaitan ekonomi dan keruangan yang merupakan penelitian dengan penggabungan kedua identifikasi sebelumnya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Input-Output*.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Sektor Industri merupakan sektor yang paling berperan karena merupakan pemberi input bagi sektor-sektor lainnya.. Sektor Pertanian dan Industri memiliki keterkaitan langsung ke depan yang cukup besar, hal ini mengindikasikan terjadi potensi yang cukup besar bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di wilayah Kedungsepur. Keterkaitan antar daerah pada industri pengolahan hasil pertanian tersebut berpeluang terjadi antara Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Keterkaitan antar daerah dalam bidang usaha yang lain yaitu: Keterkaitan antar daerah dalam industri tekstil dan produk tekstil berpeluang terjadi antara Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, keterkaitan antar daerah dalam industri otomotif dan komponen elektronik berpeluang terjadi antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: Keterkaitan, Sektor Ekonomi, Input-Output

ABSTRACT

Kedungsepur is a Particular Region which is included in the National Spatiai Planning. Therefore, this region is planned to be the center of national growth. In encouraging the region development optimally, it is needed the solid relationship inter-region in Kedungsepur Region. Such efforts in supporting the relationship, for example is by discovering the potential sectors across the region.

This study aims to review the linkage across the economic sectors and the linkage across the region within the economy of Kedungsapur Region. This also applied both qualitative and quantitative approach. This approach was carried out by observing Kedungsapur as the nodal region in which each region has its own characteristic, besides each region is linked one and another based on its region's specialization. As a result of this linkage within Kedungsapur Region is the flow of goods, service, or human resource. Such flow will determine the linkage inter-region

In reaching the aim, it is needed to do such identification which includes: identification of physical characteristics, citizenship and economic factor. This identification aimed at recognizing the potency which support the interaction among the region/city in Kedungsepur, second identification, is to identify the basic sector, that is such sector which can be counted on than those found in other regions. Besides, it has the comparative excellence which can be said as the determinant factor for the development of in cane of such region. Next, the identification of correlation found in Kedungsepur Region through the previous combination. This study applied Location Quotient (LQ) and Input-Output analysis.

Based on the result, it is known that Industrial sector plays the main role since it supplies input for other sectors. Besides, the Agriculture and Manufacturing Industry Sectors have forward linkage which indicates that there is great potency of agriculture processing industry in Kedungsepur Region. There is a significant linkage between Semarang City, Kendal District, Semarang District and Grobogan District in agriculture processing industry. Other linkages such as: the linkage between Semarang District, Semarang City and Salatiga City in textile and garment industry and the linkage between Semarang City and Kendal District in automotive and electronic parts industry.

Keywords: Linkages, Economic Sector, Input-Output.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Tesis dengan judul “Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi dan Antar Daerah di Wilayah Kedungsepur” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Harapan saya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah umumnya serta mampu memberikan masukan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur dalam meningkatkan kerjasama regional.

Atas selesainya penyusunan Tesis ini tidak lupa saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana-BAPPENAS yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi di MTPWK - UNDIP
2. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Studi MTPWK- UNDIP Semarang.
3. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penelitian ini.
4. Ibu Sri Rahayu, SSI, Msi selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penelitian ini.
5. Bapak M. Mukti Ali, SE, Msi, MT selaku Penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penelitian ini.
6. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU selaku Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penelitian ini.
7. Istri tercinta, Lies Suryani serta anak-anakku Natya dan Daiva yang telah banyak memberikan pengorbanan waktu serta semangat dan doa selama menempuh studi di MTPWK-UNDIP.
8. Bapak Drs. Agus Suryono, MM selaku Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah atas segala bimbingan dan masukan dalam penelitian ini.
9. Bapak Ir. H. Solichedi selaku Ketua KADINDA Jawa Tengah atas segala masukan dalam penelitian ini.
10. Kepala Bidang Perekonomian BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atas segala masukan dan memperoleh akses data dalam penelitian ini.
11. Bapak Didik Sukmono selaku Ketua Himpunan Kawasan Industri Kota Semarang atas kesediaan waktunya dalam wawancara dan memberikan masukan dalam penelitian ini.
12. Bapak Bening selaku Ketua FEDEP Kabupaten Demak atas kesediaan waktu dalam wawancara serta masukan dalam penelitian ini.

13. Ibu Endang Ani Suesti, SH, MM selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang atas kesediaan waktu dalam wawancara serta masukan dalam penelitian ini.
14. Bapak Putut Cahyo Nugroho selaku Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang atas kesediaan waktu dalam wawancara serta masukan dalam penelitian ini.
15. Teman-teman di MTPWK-UNDIP atas segala bantuan dan dukungannya sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.
16. Teman-teman di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah atas segala bantuan dan dukungannya sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini
17. Semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu masukan dan kritik membangun sangat diharapkan bagi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Sasaran Penelitian | 7 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 7 |
| 1.4.1 Ruang Lingkup Substansial | 7 |
| 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah | 8 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran | 10 |
| 1.6 Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 1.7 Kerangka Analisis..... | 14 |
| 1.8 Kebutuhan Data | 17 |
| 1.9 Teknik Pengumpulan Data | 17 |
| 1.10 Teknik Analisis Data | 20 |
| 1.10.1 Analisis Statistik Deskriptif | 22 |
| 1.10.2 Analisis Location Quotient (LQ) | 22 |
| 1.10.3 Analisis Input-Output | 24 |
| 1.11 Sistematika Penulisan | 28 |
| | |
| BAB II PERWILAYAHAN DAN INTERAKSI EKONOMI | 30 |
| 2.1 Wilayah, Perwilayahan dan Pengembangan Wilayah..... | 30 |
| 2.1.1 Pengertian Wilayah dan Daerah..... | 30 |
| 2.1.2 Konsep Perwilayahan..... | 30 |
| 2.1.3 Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Ekonomi Regional | 33 |
| 2.1.4 Sektor Ekonomi Potensial | 34 |
| 2.2 Perencanaan Pengembangan Wilayah..... | 36 |
| 2.2.1 Pengertian Pembangunan Wilayah | 36 |
| 2.2.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah | 38 |

| | |
|--|----|
| 2.2.3 Kajian Pertumbuhan Wilayah | 40 |
| 2.2.4 Paradigma Baru Pembangunan Wilayah..... | 44 |
| 2.3 Keterkaitan Antar Wilayah | 47 |
| 2.3.1 Kaitan Intrasektoral dan Antarsektor | 47 |
| 2.3.2 Kaitan Antar Daerah | 48 |
| 2.4 Sintesis Kajian Pustaka | 51 |
| 2.4.1 Ringkasan | 51 |
| 2.4.2 Kerangka Teoritis Penelitian | 55 |

BAB III GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

| | |
|---|-----------|
| KEDUNGSEPUR | 57 |
| 3.1 Lokasi dan Posisi Kawasan Kedungsepur | 57 |
| 3.1.1 Letak Administrasi dan Kedudukan Geografis Kawasan Kedungsepur | 57 |
| 3.1.2 Posisi Strategis Kawasan Kedungsepur | 58 |
| 3.1.3 Sistem Perkotaan dan Kawasan Tertentu dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah | 61 |
| 3.2 Kondisi Fisik Dasar | 62 |
| 3.2.1 Kondisi Topografi dan Morfologi..... | 62 |
| 3.2.2 Kondisi Klimatologi..... | 63 |
| 3.2.3 Kondisi Hidrologi | 64 |
| 3.2.4 Kondisi Geologi | 64 |
| 3.2.4.1 Geomorfologi..... | 64 |
| 3.2.4.2 Stratigrafi | 64 |
| 3.2.4.3 Struktur Geologi..... | 65 |
| 3.2.4.4 Jenis Tanah..... | 65 |
| 3.2.5 Potensi Sumber Daya Alam | 67 |
| 3.3 Kondisi Kependudukan | 71 |
| 3.3.1 Jumlah Penduduk | 71 |
| 3.3.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk..... | 74 |
| 3.3.3 Struktur Penduduk..... | 77 |
| 3.3.4 Penduduk berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama | 78 |
| 3.3.5 Potensi Sumber Daya Manusia | 80 |
| 3.4 Kondisi Perekonomian | 83 |
| 3.4.1 Struktur Ekonomi..... | 83 |
| 3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi..... | 86 |
| 3.4.3 Potensi Ekonomi | 87 |
| 3.5 Pemanfaatan Ruang | 89 |
| 3.5.1 Kondisi Pemanfaatan Ruang..... | 89 |
| 3.5.2 Potensi Pemanfaatan Ruang..... | 94 |
| 3.6 Kondisi Sistem Transportasi..... | 98 |
| 3.6.1 Transportasi Darat..... | 98 |
| 3.6.2. Transportasi Laut | 99 |
| 3.6.3 Transportasi Udara..... | 100 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR DAERAH DI WILAYAH KEDUNGSEPUR | 103 |
| 4.1 Analisis Sektor Basis | 103 |
| 4.2 Interaksi Ekonomi | 112 |
| 4.3 Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang..... | 117 |
| 4.4 Keterkaitan Antar Daerah..... | 119 |
| 4.5 Temuan Studi..... | 127 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 130 |
| 5.1 Kesimpulan | 130 |
| 5.2 Rekomendasi | 132 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 135 |
| | |
| LAMPIRAN | 139 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| TABEL I.1 : PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 | 4 |
| TABEL I.2 : Kebutuhan Data | 18 |
| TABEL II.1 : Sintesis Kajian Pustaka Perwilayahan dan Interaksi Ekonomi | 51 |
| TABEL III.1 : Curah Hujan dan Hari Hujan di Kawasan Kedungsepur Tahun 2005..... | 63 |
| TABEL III.2 : Jenis Tanah di Wilayah Kedungsepur..... | 65 |
| TABEL III.3 : Potensi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kedungsepur | 68 |
| TABEL III.4 : Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 | 72 |
| TABEL III.5 : Persentase Penduduk Wilayah Kedungsepur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2005 | 78 |
| TABEL III.6 : Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 | 79 |
| TABEL III.7 : Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kedungsepur..... | 83 |
| TABEL III.8 : Rata-Rata Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 (%) | 84 |
| TABEL III.9 : Pemanfaatan Ruang di wilayah Kedungsepur (Ha) Tahun 2005 | 94 |
| TABEL IV.1 : Hasil Analisis Location Quotient di Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 | 108 |
| TABEL IV.2 : Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Tiap Sektor Tahun 2001-2005 di Wilayah Kedungsepur dan Nilai Perbandingannya dengan Jawa Tengah | 109 |
| TABEL IV.3 : Koefisien Input Wilayah Kedungsepur Tahun 2004 | 113 |
| TABEL IV.4 : Prosentase Penerimaan Input Sektoral Dalam Tabel Koefisien Input Wilayah Kedungsepur Tahun 2004 (%) | 115 |

| | |
|---|-----|
| TABEL IV.5 : Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang Wilayah Kedungsepur Tahun 2004 | 117 |
|---|-----|

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| GAMBAR 1.1 | : Peta Administrasi Wilayah Kedungsepur..... | 9 |
| GAMBAR 1.2 | : Kerangka Pemikiran | 11 |
| GAMBAR 1.3 | : Diagram Kerangka Analisis | 16 |
| GAMBAR 1.4 | : Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) | 21 |
| GAMBAR 1.5 | : Pengelompokan Sektor Menurut Nilai Location Quotient (LQ) dan Nilai Perbandingan Rata-Rata Pertumbuhan (NP)..... | 23 |
| GAMBAR 1.6 | : Matriks Tabel Input-Output | 26 |
| GAMBAR 3.1 | : Peta Jenis Tanah Wilayah Kedungsepur | 66 |
| GAMBAR 3.2 | : Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2001-2005 | 87 |
| GAMBAR 3.3 | : Perbandingan PDRB Kabupaten/kota Dengan Wilayah Kedungsepur dan Jawa Tengah Tahun 2005 | 88 |
| GAMBAR 3.4 | : Peta pola Pemanfaatan Lahan Wilayah Kedungsepur..... | 95 |
| GAMBAR 3.5 | : Peta Jaringan Transportasi Wilayah Kedungsepur..... | 102 |
| GAMBAR 4.1 | : Pengelompokan Sektor Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur | 110 |
| GAMBAR 4.2 | : Penerimaan Input Sektoral Terbesar Dalam Tabel Koefisien Input Wilayah Kedungsepur | 116 |
| GAMBAR 4.3 | : Pengelompokan Sektor dalam Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang Wilayah Kedungsepur Tahun 2004 | 120 |
| GAMBAR 4.4 | : Peta Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi dan Antar Daerah Wilayah Kedungsepur..... | 129 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Pedoman Wawancara Dengan Instansi Pemerintah | 139 |
| Pedoman Wawancara Dengan Kadin/Asosiasi Usaha | 140 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 14 Oktober 2008 | 141 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tanggal 27 Oktober 2008 | 144 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang Tanggal 10 Nopember 2008 | 147 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang Tanggal 2 Desember 2008 | 150 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Ketua Kadinda Jawa Tengah Tanggal 15 Nopember 2008 | 153 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Ketua Himpunan Kawasan Industri Kota Semarang Tanggal 28 Nopember 2008 | 157 |
| Laporan Hasil wawancara Dengan Ketua FEDEP Kabupaten Demak Tanggal 20 Nopember 2008 | 160 |
| Analisis Input-Output..... | 163 |
| Tabel Input-Output Jawa Tengah Kklasifikasi 19 Sektor Tahun 2004 (Jutaan Rupiah) | 166 |
| Perbedaan Klasifikasi 9 Sektor dan 19 Sektor Tabel Input-Output Regional Jawa Tengah 2004 | 170 |
| Tabel Koefisien Input Wilayah Jawa Tengah Tahun 2004 | 171 |
| Tabel Input-Output Wilayah Jawa Tengah 9 Sektor (Juta Rupiah) Tahun 2004..... | 172 |
| Analisis Location Quotient (LQ) | 173 |
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Wilayah Kedungsepur Tahun 2001 (Juta Rupiah) | 174 |
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Wilayah Kedungsepur Tahun 2002 (Juta Rupiah) | 175 |

| | |
|--|-----|
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Wilayah Kedungsepur Tahun 2003 (Juta Rupiah) | 176 |
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Wilayah Kedungsepur Tahun 2004 (Juta Rupiah) | 177 |
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Wilayah Kedungsepur Tahun 2005 (Juta Rupiah) | 178 |
| Riwayat Hidup Penulis | 179 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" telah memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya serta mengatur wilayahnya, baik dalam pengaturan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pengelolaan keuangan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi berimplikasi pada munculnya daerah otonom.

Otonomi daerah khususnya di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan dampak positif karena daerah otonom dapat dengan leluasa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakatnya. Guna menuju kemandirian, sudah saatnya daerah otonom harus menggali semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi (Mehrtens dan Abdurahman, 2007).

Selain dampak positif tersebut di atas, otonomi daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa ego sektoral daerah, birokrasi daerah yang terlalu tinggi serta euforia daerah yang merasa tidak memerlukan lagi pemerintah pusat ataupun daerah lain. Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama antar wilayah/regional dalam rangka meningkatkan daya saingnya di perekonomian global.

Di Jawa Tengah ada beberapa kerjasama regional yang telah terbentuk, seperti: Kerjasama Regional Barlingmascakeb yang meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen; Kerjasama Regional Sapta Mitra Pantura yang meliputi kabupaten/kota di wilayah pantai utara Jawa Tengah yaitu: Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal; Solo Raya yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali dan Sukoharjo dan yang terakhir adalah Kerjasama Regional Kedungsepur yang terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Kedungsepur merupakan Kawasan Tertentu yang terdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dengan demikian wilayah ini direncanakan sebagai pusat pertumbuhan nasional. Kerjasama regional wilayah Kedungsepur sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing yang lebih besar.

Kerjasama Regional Kedungsepur telah dijalin sejak 21 Desember 1998 dengan penandatanganan MoU oleh Bupati/Walikota di 6 (enam) wilayah (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan). Namun demikian kerjasama tersebut tidak berjalan efektif hingga perjanjian kerjasama tersebut telah habis masa berlakunya pada 20 Desember 2003. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2005 dilakukan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) yang baru yang berisi kesepakatan

menjalin kemitraan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, industri dan perdagangan, pembangunan sarana dan prasarana, perhubungan dan pariwisata, kebersihan dan kesehatan, pertanian dan pengairan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan, ketenagakerjaan, masalah sosial, serta keamanan dan ketertiban. (Suara Merdeka, 16 Juni 2005).

Kerjasama regional Kedungsepur yang belum berjalan secara efektif tersebut kemungkinan terjadi karena masing-masing daerah kabupaten/kota belum memiliki kesatuan dan kesamaan pandangan dalam melihat potensi yang dimiliki secara bersama. Selain itu, terjadinya kesenjangan antar daerah diduga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap masalah tersebut di atas.

Kesenjangan yang terjadi antar daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kedungsepur. Kesenjangan terjadi antara kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*-nya maupun antar daerah kabupaten/kota *hinterland* itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap PDRB Kedungsepur. Tabel I.1 menunjukkan bahwa kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kedungsepur dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yaitu sebesar 52,88% dari total PDRB Kedungsepur tahun 2005 sebesar Rp. 30.942.747.230.000,-. Sedangkan Kabupaten/kota yang lain hanya memberikan kontribusi sebesar 2,48% hingga 14,49%. Disamping itu jika dilihat PDRB antar kabupaten/kota *hinterland* Semarang, nampak bahwa Kabupaten Kendal dan kabupaten Semarang memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan kota Salatiga, kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

TABEL I.1
PDRB WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2005
MENURUT HARGA KONSTAN TAHUN 2000

| Kab/Kota | PDRB (Juta Rp) | % |
|---------------|----------------|--------|
| Kota Semarang | 16.361.862,38 | 52,88 |
| Kota Salatiga | 766.841,10 | 2,48 |
| Kab. Kendal | 4.279.794,00 | 13,83 |
| Kab. Grobogan | 2.579.283,28 | 8,34 |
| Kab. Semarang | 4.484.189,38 | 14,49 |
| Kab. Demak | 2.470.777,09 | 7,98 |
| Total | 30.942.747,23 | 100,00 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2006, data diolah

Guna mendorong terjadinya kerjasama antar daerah secara lebih efektif, maka diperlukan suatu kajian potensi masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur dan keterkaitan antar sektor ekonomi serta keterkaitan antar daerah sehingga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi regional.

Keterkaitan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya dan eksternalitas aglomerasi dipandang sebagai faktor penentu yang penting dalam konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Kaitan intrasektoral (kaitan antar perusahaan dalam sektor yang sama) dan kaitan antar sektor adalah suatu cara untuk melihat eksternalitas aglomerasi, baik yang dipicu oleh input (pemasok) ataupun output (pelanggan) (Kuncoro, 2002).

Senada dengan hal tersebut, Mehrtens dan Abdurahman (2007) menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mendorong suatu kerjasama meliputi: faktor keterbatasan daerah (kebutuhan): hal ini dapat terjadi dalam konteks sumber daya manusia, alam, teknologi dan keuangan, faktor kesamaan kepentingan: adanya persamaan visi pembangunan dan memperbesar peluang

memperoleh keuntungan, baik finansial maupun non-finansial, faktor sinergi antar daerah: tumbuhnya kesadaran bahwa dengan kerjasama antar daerah dapat meningkatkan dampak positif dari berbagai kegiatan pembangunan yang semula sendiri-sendiri menjadi suatu kekuatan regional.

Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Bab IX pasal 78 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kerjasama tersebut ditetapkan oleh masing-masing daerah terkait melalui Peraturan Daerah dan masuk dalam APBD. Daerah yang bekerjasama dapat menuangkan kesepakatan mereka melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Di dalam SKB tersebut dapat dituangkan pengelolaan melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Selain itu, dituangkan pula latar belakang, maksud dan tujuan kerjasama, peran, fungsi dan tugas masing-masing daerah dengan mekanisme yang disepakati. Visi dan misi umum kerjasama antar daerah yang tertuang pada SKB dapat dipertegas kembali dan dijabarkan melalui program dan kegiatan bersama yang menjadi salah satu tugas penting Sekretariat Bersama, namun fungsi dan perannya adalah sama yaitu sebagai platform pelaksana teknis amanat kesepakatan regional yang telah disetujui oleh masing-masing DPRD terkait.

Informasi mengenai potensi wilayah yang ada pada masing-masing kabupaten/kota sangat berguna dalam menentukan sektor unggulan serta mengkaji bagaimana keterkaitan antar sektor ekonomi dan antar daerah di wilayah Kedungsepur. Dengan diketahuinya potensi ekonomi yang bersifat antar daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya kerjasama regional di Kedungsepur yang lebih efektif dalam rangka peningkatan ekonomi regional.

1.2 Perumusan Masalah

Perekonomian wilayah bukan lagi merupakan kumpulan sektor-sektor unggulan, melainkan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Hal tersebut sangat penting sebagai pedoman dalam menggali keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur. Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah penelitian adalah bahwa potensi Wilayah Kedungsepur belum digali secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian regional. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum adanya kerjasama yang sistematis antar daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur dalam menggali potensi ekonomi kewilayahan.
2. Daerah kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur masih menunjukkan adanya ego sektoral, belum melihat potensi kekuatan yang lebih besar jika melakukan kerjasama.
3. Terjadinya kesenjangan perekonomian antara wilayah Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

Dari perumusan masalah di atas maka pertanyaan studi (*research question*) dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah mampu mendorong tumbuhnya kerjasama regional di wilayah Kedungsepur.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan *research question* tersebut, maka

tujuan penelitian ini adalah mengkaji keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah dalam perekonomian Wilayah Kedungsepur.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengidentifikasi:

1. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Kedungsepur.
2. Sektor unggulan yang merupakan faktor penentu pendapatan di kabupaten/kota wilayah Kedungsepur.
3. Keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial meliputi:

1. Sektor ekonomi.
Merupakan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh lebih cepat.
2. Sektor Strategis
Merupakan sektor yang telah di analisis berdasarkan prioritas untuk dikembangkan karena di anggap memberikan keuntungan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
3. Sektor Unggulan.
Adalah sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih

baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

4. Keterkaitan.

Menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya.

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah:

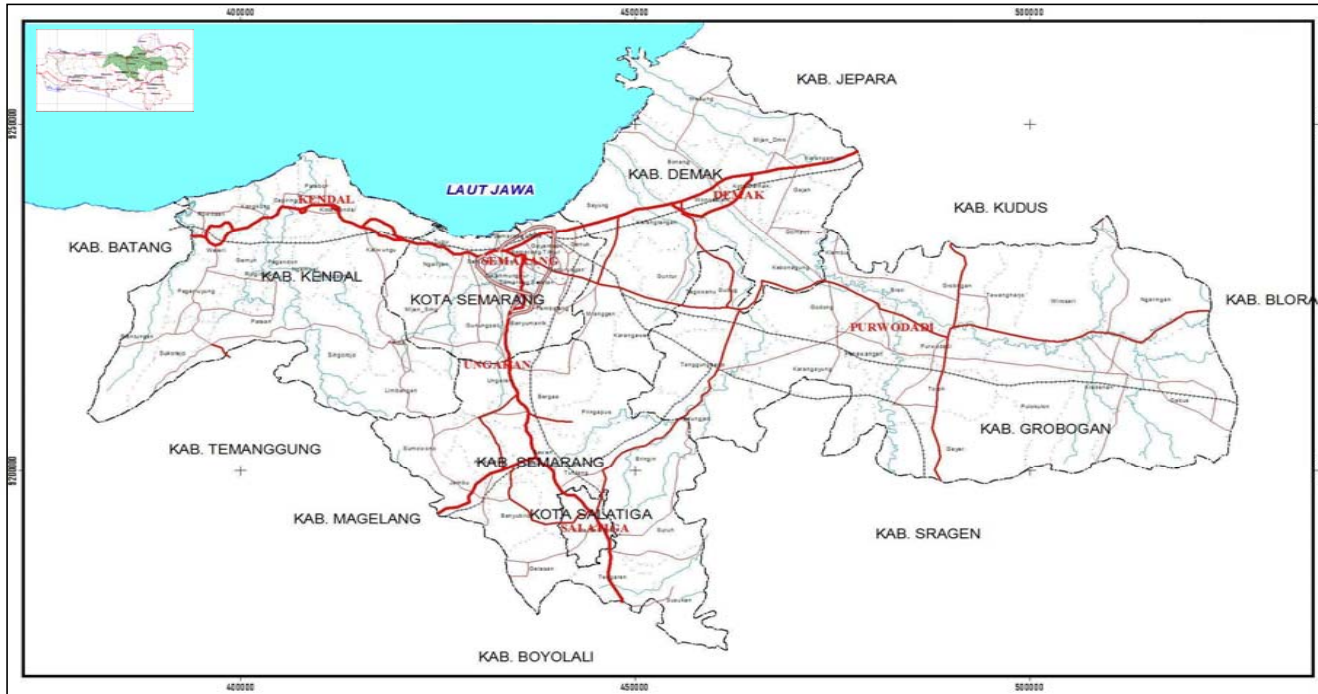
Lingkup wilayah studi meliputi seluruh wilayah Kedungsepur yang terdiri atas:

1. Kabupaten Kendal, meliputi 19 kecamatan, 265 desa dan 20 kelurahan.
2. Kabupaten Demak, meliputi 14 kecamatan, 247 desa.
3. Kabupaten Semarang, meliputi 17 kecamatan, 220 desa dan 15 kelurahan.
4. Kota Semarang, meliputi 16 kecamatan, 117 kelurahan
5. Kota Salatiga, meliputi 4 kecamatan, 16 kelurahan
6. Kabupaten Grobogan, meliputi 19 kecamatan, 280 desa.

Sedangkan untuk batas-batas wilayah Kedungsepur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kabupaten Jepara.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati, Blora dan Kudus.
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen, Boyolali, Magelang dan Temanggung.

Untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup wilayah dapat dilihat pada Gambar I.1 tentang Peta Administrasi Wilayah Kedungsepur.



MAGISTER PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS:
KETERKAITAN ANTAR SEKTOR
EKONOMI DAN ANTAR DAERAH
DI WILAYAH KEDUNGSEPUR

PETA ADMINISTRASI WILAYAH
KEDUNGSEPUR

LEGENDA

- Batas kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- IRel kereta
- Wilayah Perairan

| No. | SKALA |
|-----|----------|
| 1.1 | 0 4 8 Km |

UTARA SUMBER

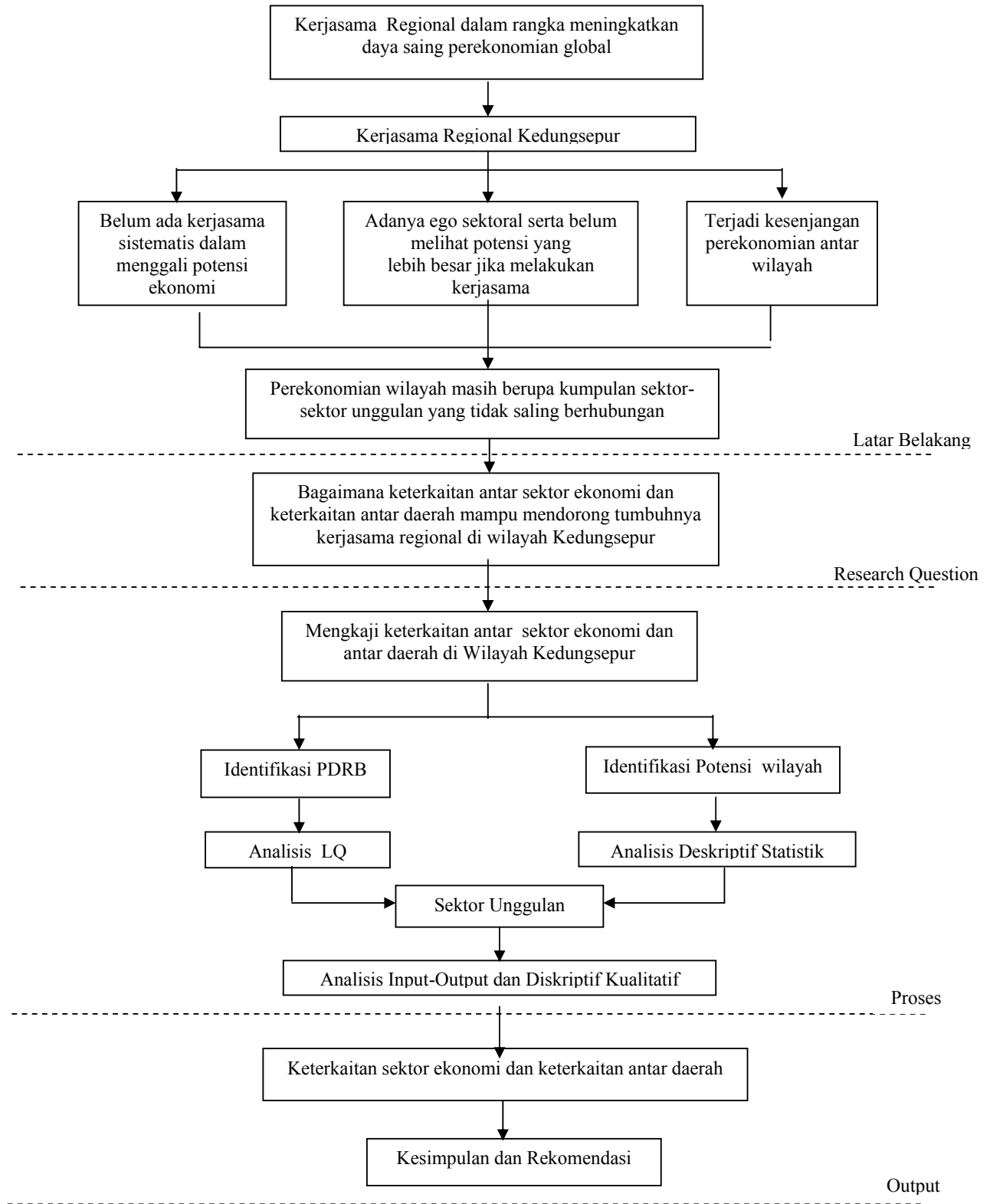
BAPPEDA
PROVINSI JAWA
TENGAH

1.5 Kerangka Pemikiran

Kajian ini dilatarbelakangi oleh inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur untuk melakukan kerjasama pengembangan regional. Salah satu sektor yang dikerjasamakan adalah sektor ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, kerjasama regional di bidang ekonomi sampai saat ini belum dapat berjalan secara efektif hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama yang sistematis antar daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur dalam menggali potensi ekonomi kewilayahan, masih adanya ego sektoral dan belum melihat potensi yang lebih besar jika melakukan kerjasama antar daerah serta terjadinya kesenjangan perekonomian antara wilayah kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

Guna memberikan motivasi yang lebih besar kepada Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur, dilakukan penelitian tentang sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dengan melihat potensi dan karakteristik masing-masing wilayah kabupaten/kota serta meneliti lebih jauh bagaimana keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah dalam perekonomian wilayah Kedungsepur. Dengan diketahuinya keterkaitan tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hubungan antar sektor dalam suatu wilayah dan transaksi antar daerah diantara beberapa sektor.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui *backward linkage* yang merupakan daya tarik terhadap sumber bahan baku dan *forward linkage* yang merupakan daya tarik terhadap pasar dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah Kedungsepur.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

Selain itu hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif. Analisis tersebut dirangkum dalam analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Input-Output* yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana keterkaitan antar daerah yang sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengembangan dan peningkatan ekonomi di wilayah Kedungsepur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I.2

1.6 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Menurut Danim (2002), kedua pendekatan berbeda satu dengan yang lain menurut area permasalahan yang akan di kaji. Pendekatan kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, sempit dan reduksionistik. Reduksionistik melibatkan pembedahan atas keseluruhan menjadi bagian-bagian yang dapat di uji secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas yang diperoleh, antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah di uji validitas dan realibilitasnya. Penelitian kuantitatif akan mereduksi hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelitian muncul adanya bias itu, penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya.

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah kompleks dan luas. Peneliti kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus menerapkan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Oleh

karena itu temuan-temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti (Danim, 2002).

Peneliti kuantitatif menggunakan instrumen atau alat-alat pengumpul data yang akan menghasilkan data numerik. Analisis statistik data yang diperoleh dilaksanakan untuk mereduksi dan mengorganisasikan data, menentukan signifikansi hubungan dan mengidentifikasi perbedaan antar kelompok. Dengan demikian, temuan atau hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada situasi populasi. Generalisasi merupakan aplikasi atas kecenderungan atau tendensi umum yang diidentifikasi melalui sampel studi terhadap populasi tempat diambilnya subjek studi tersebut. Sedangkan penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam (*in depth interview*) dan peneliti menjadi instrumen utamanya. Data yang dihasilkan merupakan sumbangsih penafsiran peneliti dan lebih banyak subjektif serta tidak ada usaha untuk membuat kontrol dari interaksi tersebut. Data pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan dianalisis dalam terminologi respon-respon individual, kesimpulan deskriptif atau keduanya (Danim, 2002).

Pendekatan pertama yaitu pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengkaji potensi, sektor basis dan keterkaitan antar sektor ekonomi di Wilayah Kedungsepur. Sedangkan pendekatan kedua yaitu pendekatan kualitatif digunakan untuk menduga keterkaitan antar daerah di Wilayah Kedungsepur. Pendekatan kedua dipilih karena dalam mengkaji keterkaitan antar daerah tidak tersedia data sekunder. Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, maka pendekatan penelitian kualitatif digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan

tokoh kunci atau narasumber, yang meliputi para pejabat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan ketua Kadin/Asosiasi usaha.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pertama dilakukan dengan cara memandang wilayah Kedungsepur sebagai wilayah nodal yang masing-masing bagian wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan wilayah-wilayah tersebut saling terkait sesuai dengan spesialisasi wilayah.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan keruangan. Sebagai akibat dari adanya keterkaitan antar daerah dalam wilayah Kedungsepur adalah terjadinya aliran barang, jasa ataupun manusia. Besarnya aliran tersebut akan menentukan besarnya keterkaitan antar daerah.

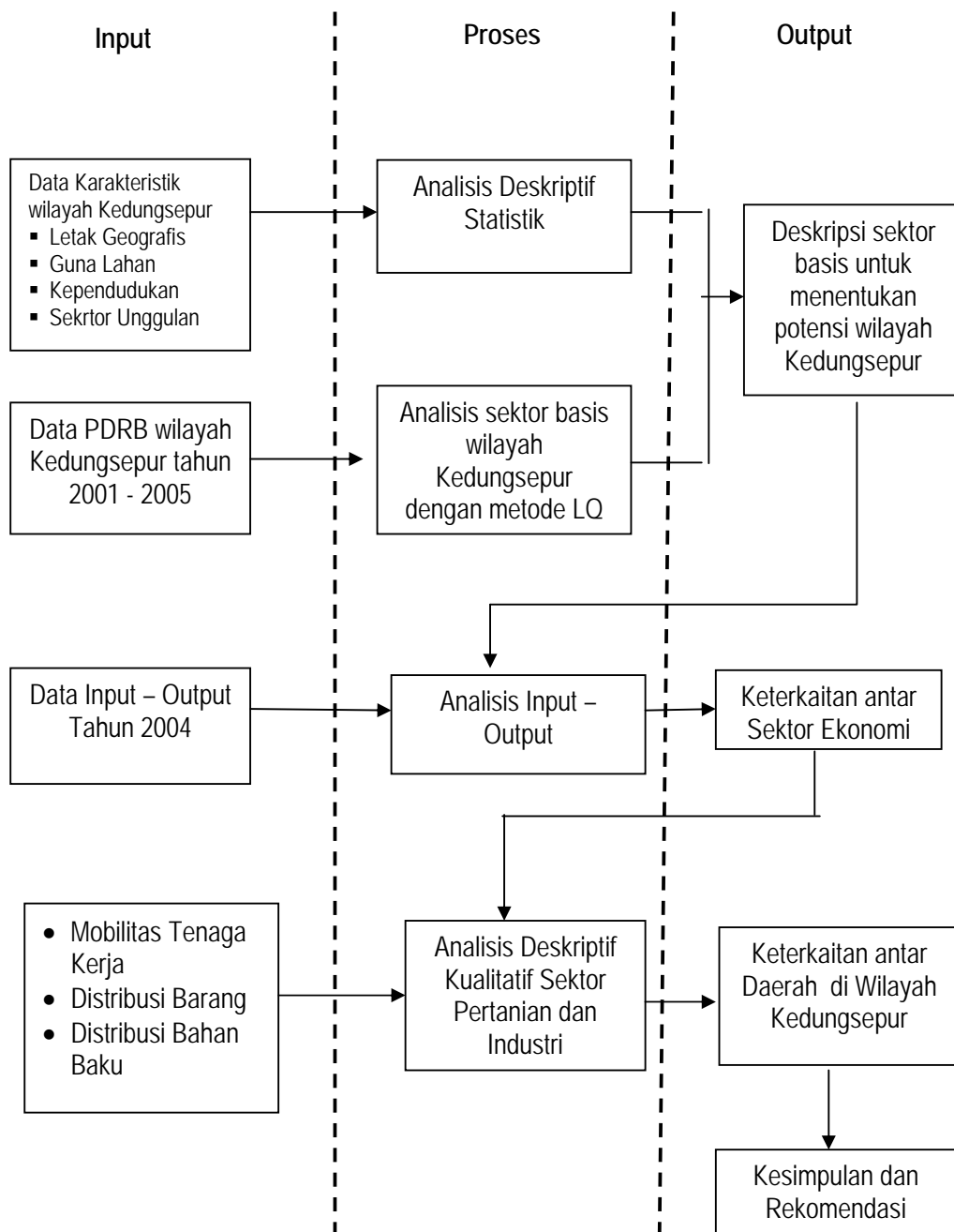
1.7 Kerangka Analisis

Keterkaitan antar daerah pada sektor ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa hal yang meliputi: potensi dan karakteristik wilayah, sektor-sektor ekonomi basis yang berorientasi meningkatkan pendapatan daerah, spasial ekonomi daerah dengan melihat distribusi barang, bahan baku serta tenaga kerja serta bagaimana keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi yang saling mempengaruhi dalam suatu wilayah. Beberapa hal tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan kerangka analisis di atas dilakukan tahap-tahap analisis untuk mengidentifikasi keterkaitan sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah pada di Wilayah Kedungsepur, sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi Wilayah Kedungsepur yang meliputi: identifikasi karakteristik fisik, kependudukan dan ekonomi. Identifikasi ini untuk mengetahui potensi wilayah yang dapat menunjang atau menghambat interaksi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur.
2. Identifikasi sektor basis yaitu sektor yang dapat diandalkan potensinya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya dan memiliki keunggulan komperatif yang merupakan faktor penentu bagi peningkatan pendapatan suatu daerah.
3. Identifikasi keterkaitan antar sektor ekonomi yang dapat diketahui dari tabel *Input-Output* Wilayah Kedungsepur yang diturunkan dari tabel *Input-Output* Jawa Tengah dengan koefisien LQ wilayah.
4. Identifikasi keterkaitan antar daerah dengan menggunakan keterkaitan keruangan yang diperoleh dari aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja. Untuk melihat keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur hanya dibatasi pada sektor pertanian dan industri saja. Hal ini dilakukan karena kedua sektor tersebut merupakan sektor yang paling menonjol di wilayah Kedungsepur, baik dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB maupun dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di kedua sektor tersebut.

Secara lebih lengkap, tahap-tahap analisis dapat dilihat pada Gambar 1.3



GAMBAR 1.3
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS

1.8 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kebutuhan data primer yaitu dengan pengamatan lapangan dan wawancara kepada para narasumber, adapun kebutuhan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Wilayah Kedungsepur baik dari BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Kadin serta dinas/instansi terkait lainnya. Secara lebih lengkap, kebutuhan data dapat dilihat pada Tabel I.2

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data langsung dari lapangan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*naturalistic inquiry*) dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Menurut Sugiarto, dkk (2001:16-20) mengingat pentingnya data sebagai bahan baku analisis dan pengambilan keputusan, maka data yang benar merupakan kebutuhan mutlak. Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

A. Studi Literatur

Studi literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa data, catatan, dokumen maupun arsip-arsip.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA

| No. | Jenis Analisis | Kebutuhan Data | | | Data | Sumber Data | Tehnik Pengumpulan Data |
|-----|--|---|-------------|--|--|--|--|
| | | Nama Data | Tahun | Unit Data | | | |
| 1. | Analisis deskriptif karakteristik fisik dan kependudukan wilayah Kedungsepur | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Letak geografis ▪ Guna lahan dan kekayaan alam ▪ Jenis dan kelas fasilitas perhubungan ▪ Kependudukan (jumlah, angkatan kerja, mata pencaharian) | Terbaru | Kab/Kota | Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ BPS ▪ Dinas Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi literatur ▪ Mendatangi instansi |
| 2. | Analisis Location Quotient (LQ) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB Provinsi ▪ PDRB Kabupaten/Kota | 2001 – 2005 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi ▪ Kab/Kota | Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPS Jateng ▪ BPS Kab/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi literatur ▪ Mendatangi instansi |
| 3. | Analisis Input-Output | Tabel Input-Output Provinsi | 2004 | Provinsi | Sekunder | Bappeda | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi literatur ▪ Mendatangi instansi |
| 4. | Analisis Deskriptif distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja | Jumlah pergerakan barang, bahan baku dan tenaga kerja sektor pertanian dan industri | 2001 – 2005 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi ▪ Kab/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer ▪ Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ BPM ▪ Kadin ▪ HKI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara ▪ Observasi ▪ Studi literatur ▪ Mendatangi instansi |

B. Pengamatan Langsung (Observasi Visual)

Pengamatan langsung merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diamati (Narbuko dan Achmadi, 2002:70). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting fisik/lingkungan lokasi penelitian. Pengamatan langsung juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik Wilayah Kedungsepur.

C. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Adapun wawancara itu sendiri berguna untuk:

- Mendapatkan data di tangan pertama (primer).
- Pelengkap teknik pengumpulan lainnya.
- Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan di sini, yaitu pedoman wawancara. Jika angket dimaksud untuk menjangkau responden yang jumlahnya relatif banyak, wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap tokoh kunci (*key person*) yang mengetahui secara rinci masalah dengan jalan dialog/bercakap-cakap/berhadapan langsung. Seorang *interviewer* (pewawancara) menggunakan *guide* (panduan) wawancara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara

dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang ditentukan. Karakteristik peserta sebaiknya mencerminkan populasi yang diinginkan.

Dalam penelitian ini wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin (atau bebas terstruktur), setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada responden dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan responden dari topik bahasan. Responden terpilih diminta untuk memberikan tanggapan mengenai variabel penelitian yang telah ditetapkan, meskipun variabel tersebut masih dimungkinkan untuk berubah (bertambah luas) sesuai masukan pendapat responden. Persepsi responden mengenai variabel tersebut menjadi penopang utama dalam penelitian ini.

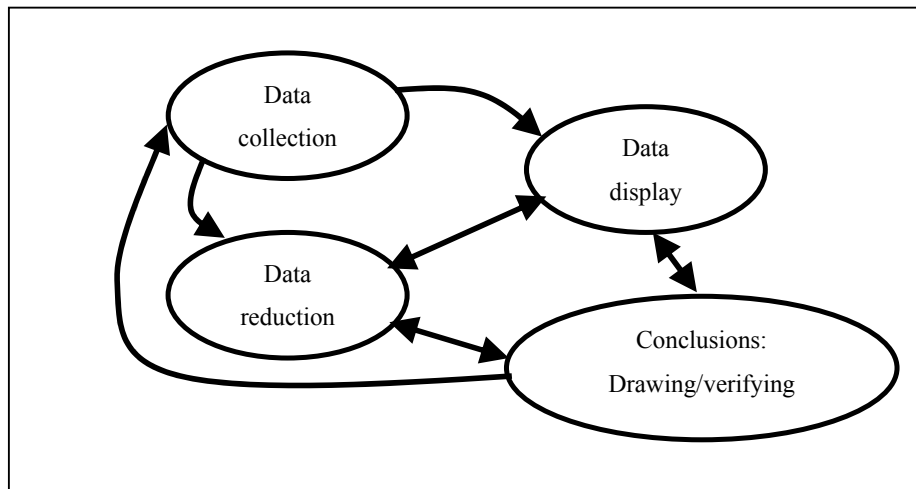
Wawancara akan dilakukan kepada pejabat instansi pemerintah maupun para pelaku usaha atau asosiasi usaha di wilayah Kedungsepur yang meliputi Bappeda, Dinas Perhubungan dan Kadin.

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*

drawing/verivication. Langkah-langkah analisis seperti ditunjukkan pada Gambar 1.4.

Selanjutnya menurut Spradley dalam Sugiyono (2005), teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis *domain*. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis *taksonomi*. Pada tahap *selection*, analisis data dilakukan dengan *komponensial*. Selanjutnya untuk sampai menemukan judul dilakukan dengan analisis tema. Analisis data model Miles and Huberman, yang meliputi data *reduction*, data *display* dan *verification* dilakukan pada setiap tahapan penelitian (penjelajahan, focus dan *selection*).



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

GAMBAR 1.4
KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA
(INTERACTIVE MODEL)

1.10.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah tersedia melalui sensus, survei atau laporan statistik instansi terkait. Analisis tersebut berupa rata-rata, prosentase, perbandingan/rasio atau tingkat perubahan/laju pertumbuhan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini penggunaan statistik deskriptif adalah untuk menganalisis karakteristik fisik Wilayah Kedungsepur yang akan menghasilkan potensi Wilayah Kedungsepur yang dapat mempengaruhi interaksi antar wilayah dan karakteristik ekonomi wilayah berupa tingkat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi sebagai penunjang analisis *Location Quotient*. Selain itu juga untuk menganalisis interaksi keruangan antara daerah-daerah di Wilayah Kedungsepur, analisis dilakukan pada aliran barang dan manusia.

1.10.2 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor/komoditi basis yang memiliki keunggulan komparatif. Nilai LQ adalah angka koefisien yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif suatu sektor daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Koefisien LQ digunakan untuk menentukan sektor basis komparatif di suatu daerah, yaitu sektor yang dapat diandalkan potensinya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya.

Koefisien LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak terhingga. Koefisien LQ yang kurang dari 1 memiliki arti bahwa sektor/komoditi yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif. Koefisien LQ sama dengan 1 mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif sama dengan rata-rata semua daerah. Koefisien LQ yang lebih besar dari 1

memiliki makna bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dari rata-rata.

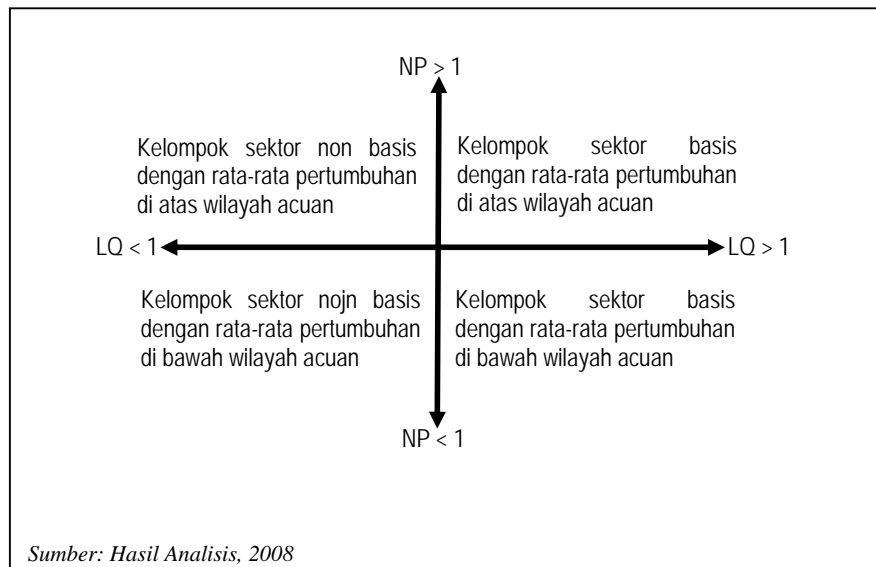
Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan antara fungsi relatif besaran PDRB suatu sektor/produksi suatu komoditi pada suatu daerah dengan fungsi relatif besaran PDRB suatu sektor/produksi suatu komoditi pada pada tingkat daerah di atasnya. Dengan demikian secara matematis, LQ dapat dirumuskan dengan persamaan berikut :

$$LQ_i = (e_i/e) / (E_i/E)$$

Sumber: Tarigan (2005)

Keterangan :

- LQ_i = nilai LQ untuk sektor i di Kabupaten analisis
- e_i = PDRB sektor i di Kabupaten analisis
- e = PDRB seluruh sektor di Kabupaten analisis
- E_i = PDRB sektor i di Provinsi Kabupaten analisis
- E = PDRB seluruh sektor di Provinsi Kabupaten analisis



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.5
PENGELOMPOKAN SEKTOR MENURUT NILAI LOCATION QUOTIENT (LQ) DAN NILAI PERBANDINGAN RATA-RATA PERTUMBUHAN (NP)

Hasil perhitungan dengan analisis LQ ini kemudian dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tiap sektor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang merupakan nilai perbandingan rata-rata tiap Kabupaten/Kota dengan nilai rata-rata Jawa Tengah. Kemudian sektor-sektor dikelompokkan ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai LQ dan nilai perbandingan rata-rata pertumbuhan seperti terlihat dalam Gambar 1.5. Sektor Unggulan merupakan sektor-sektor yang berada pada kuadran I, yaitu sektor basis dengan rata-rata pertumbuhan di atas wilayah acuan.

1.10.3 Analisis Input - Output

Merupakan alat analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut melalui input primer (nilai tambah). Artinya, akibat perubahan tingkat produksi sektor-sektor tersebut, dapat dilihat seberapa besar kemakmuran rakyat bertambah atau berkurang.

Dalam melakukan analisis input-output diperlukan adanya tabel Input-Output. Tabel Input-output adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks baris dan kolom yang menggambarkan transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Seberapa besar ketergantungan suatu sektor dengan sektor lainnya ditentukan oleh besarnya input yang digunakan

dalam proses produksi. Dengan kata lain pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh input dari sektor lain. Kerangka umum tabel I-O terdiri dari 4 kuadran, yaitu:

- Kuadran I: menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi untuk digunakan dalam proses produksi. Transaksi yang terjadi pada kuadran I lebih dikenal sebagai transaksi antara (*intermediate transaction*)
- Kuadran II: menunjukkan permintaan akhir (*final demand*) dari impor dan secara keseluruhan menggambarkan penyediaan barang dan jasa. Permintaan akhir terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor.
- Kuadran III: menunjukkan input primer sektor-sektor ekonomi dan bukan merupakan output dari suatu kegiatan produksi. Cakupan input primer meliputi balas jasa faktor produksi berupa upah gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto.
- Kuadran IV memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi ini digunakan dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Tiap kuadran tersebut di atas dinyatakan dalam suatu bentuk matriks, misalnya kuadran I yang berukuran matriks $n \times n$ menunjukkan banyaknya sektor yang dihitung berdasarkan hasil kualifikasi sektor dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang berotensi dari perekonomian wilayah/daerah. Namun demikian tabel I-O mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.6.

| | Sektor Produksi | | | | F | M | X |
|---|-----------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | J | n | | | |
| 1 | X_{11} | X_{12} | X_{1J} | X_{1n} | F_1 | M_1 | X_1 |
| 2 | X_{21} | X_{22} | X_{2J} | X_{2n} | F_2 | M_2 | X_2 |
| · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · |
| i | X_{i1} | X_{i2} | X_{iJ} | X_{in} | F_i | M_i | X_i |
| · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · |
| n | X_{n1} | X_{n2} | X_{nJ} | X_{nn} | F_n | M_n | X_n |
| V | v_1 | v_2 | v_3 | v_n | | | |
| X | x_1 | x_2 | x_3 | x_n | | | |

Sumber: BPS

GAMBAR 1.6
MATRIKS TABEL INPUT-OUTPUT

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dirangkum dalam bentuk persamaan umum seperti persamaan di bawah ini:

1. Persamaan menurut baris, $X_i = \sum x_i + F_i - M_i$

- X_i = output sektor i
- $\sum x_i$ = jumlah permintaan antara sektor i
- F_i = jumlah permintaan akhir sektor i
- M_i = impor i

2. Persamaan menurut kolom, $X_j = \sum x_j + V_j$

- X_j = output sektor j
- $\sum x_j$ = jumlah input antara sektor j
- V_j = jumlah input primer (nilai tambah) sektor j

Berdasarkan Gambar 1.6 dapat diturunkan dua matriks invers yaitu $(I-A)^{-1}$ dan $B(I-A)^{-1}$, masing masing merupakan fungsi hubungan antara permintaan akhir dengan output dan nilai tambah sebagai berikut:

1. $X = (I-A)^{-1} F$

dimana $(I-A)^{-1}$ merupakan matriks kebalikan dari koefisien input atau dapat juga disebut sebagai matriks pengganda output yang digunakan untuk pengembangan model input-output

$$2. V = B(I-A)^{-1} F$$

dimana B merupakan matriks koefisien komponen nilai tambah

Dalam penelitian ini akan digunakan tabel Input-Output Jawa Tengah tahun 2004, namun demikian dikarenakan wilayah penelitiannya hanya mencakup Wilayah Kedungsepur maka tabel Input-Output Jawa Tengah ini akan diturunkan menjadi tabel Input-Output wilayah Kedungsepur melalui pendekatan *Location Quotient (LQ)*. Adapun langkah-langkah penurunan tabel Input-Output Jawa Tengah menjadi tabel Input-Output wilayah Kedungsepur dapat dilakukan sebagai berikut (Ugoy dalam Damayanti, 1999):

1. Pemilihan tabel Input-Output, karena dalam buku Input-Output terdiri atas tiga tabel dasar 14 tabel analisis yang merupakan penurunan tabel dasar. Tabel dasar adalah tabel yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi. Tabel dasar ini terdiri atas tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, tabel transaksi total atas dasar harga produsen dan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dalam penelitian ini digunakan tabel transaksi total atas dasar harga produsen karena tabel ini menyajikan hubungan langsung antar sektor tanpa dipengaruhi biaya transportasi.
2. Pengelompokan sektor-sektor ekonomi, untuk meningkatkan daya guna analisis dan berdasarkan ketersediaan data yang ada. Dalam penelitian ini dipergunakan tabel Input-Output 19 sektor dan akan direduksi menjadi 9

sektor dengan jalan perkalian matriks $(19 \times 19) \times (19 \times 9) = (19 \times 9)$. Kemudian dikalikan dengan matriks (9×19) dan hasilnya adalah matriks (9×9) .

3. Estimasi koefisien Input-Output wilayah dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)*. Nilai $LQ \geq 1$, maka nilai koefisien Jawa Tengah dapat langsung diserap sebagai nilai koefisien Wilayah Kedungsepur, sedangkan $LQ < 1$, nilai koefisien tersebut harus dikalikan angka koefisien Jawa Tengah untuk menyerapnya sebagai nilai koefisien wilayah Kedungsepur.
4. Penurunan tabel transaksi/tabel *Input-Output*, bagi sektor-sektor yang memiliki nilai koefisien ≥ 1 , perilaku Jawa Tengah dalam tabel I-O dapat langsung diturunkan menjadi perilaku wilayah dalam tabel I-O Kedungsepur (penurunan perilaku dilakukan per kolom). Sedangkan sektor yang memiliki koefisien < 1 , transaksi dikalikan dengan koefisien wilayah.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis dengan judul "Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi dan Antar Daerah di Wilayah Kedungsepur" adalah:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.

BAB II Perwilayahan dan Interaksi Ekonomi, mengemukakan teori-teori serta referensi lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian dan dapat menjawab secara teoritis permasalahan yang di angkat.

BAB III Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kedungsepur, berisi gambaran umum masing-masing wilayah kabupaten/kota di Kedungsepur serta kondisi eksisting perekonomian dan potensi yang berhubungan dengan pengembangan wilayah.

BAB IV Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi dan Antar Daerah di Wilayah Kedungsepur, berisi analisis potensi wilayah Kedungsepur, analisis sektor basis dan unggulan, interaksi ekonomi wilayah Kedungsepur dan keterkaitan antar daerah dalam sektor Industri dan Pertanian.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.

BAB II

PERWILAYAHAN DAN INTERAKSI EKONOMI

2.1. Wilayah, Perwilayahan dan Pengembangan Wilayah

2.1.1. Pengertian Wilayah dan Daerah

Wilayah memiliki pengertian suatu daerah geografis yang memiliki luas tertentu atau ada batas administrasi. Daerah (*region*) adalah lebih menunjuk kepada wilayah administrasi yang lebih luas dibandingkan dengan kota, dapat berupa daerah provinsi, kabupaten, kecamatan atau desa.

Pengertian daerah dapat dilihat dari beberapa disiplin ilmu yang menyangkut studi dalam bidang regional serta tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dalam menganalisa suatu daerah. Sukirno (1981) menjelaskan bahwa dalam menganalisa wilayah dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu:

1. Daerah atau wilayah adalah suatu ruang atau area geografis dipelbagai pelosok yang mempunyai kesamaan sifat baik menurut kriteria sosial, ekonomi maupun politik yang dikenal dengan sebutan daerah homogen.
2. Perbatasan diantara pelbagai daerah ditentukan oleh tempat-tempat dimana pengaruh dari satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya, daerah ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah dibedakan menurut batas-batas administratif dalam suatu daerah atau wilayah.

2.1.2. Konsep Perwilayahan

Dalam melakukan studi mengenai pembangunan wilayah, hal yang perlu

dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah (region). John Glasson (1978) mengemukakan konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan “wilayah formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena dari kenyataan bahwa faktor-faktor fisik adalah lebih stabil dari pada faktor ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-waktu berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan. Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan.

Klasifikasi tentang wilayah di atas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Tarigan (2004). Wilayah diartikan sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Wilayah menurut tipe-tipenya dapat dipilah menjadi 3 (tiga) macam:

1. Wilayah homogen (*homogeneous region*), yaitu wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik seragam. Keseragaman ciri-ciri tersebut bisa dilihat menurut faktor ekonomi, geografis, sosial budaya dan aspek-aspek lainnya.
2. Wilayah heterogen (*nodal region*), yaitu wilayah-wilayah yang saling berhubungan secara fungsional karena adanya *heterogenitas* (ketidakmerataan). Wilayah-wilayah tersebut saling melengkapi tetapi dengan fungsi yang berbeda, pada umumnya berlangsung antara wilayah pusat (*core*) dengan wilayah pinggiran (*periphery/hinterland*).
3. Wilayah perencanaan (*planning region*), yaitu wilayah-wilayah administrasi yang berada dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Contohnya

adalah wilayah yang tergolong dalam provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan desa.

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), sistem masyarakat (*social system*), lingkungan hidup (*enviromtent*) dan sumber daya alam (*eco system*). (Ambardi, etl, 2002).

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi biasanya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembangaan.

2.1.3. Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah ini agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Arsyad, 1999). Sedangkan ilmu ekonomi regional menurut Tarigan (2004) adalah cabang ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu regional tidak membahas kegiatan individu melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah.

Pemahaman perbedaan pembangunan ekonomi lokal dan pembangunan

ekonomi regional (wilayah) masih menjadi bahan perdebatan. Menurut Muhadjir (2004), regional dapat disalin dengan istilah wilayah atau kawasan. Dalam skop nasional makna regional mencakup kawasan yang luas dari provinsi, tetapi lebih sempit dari nasional. Pembangunan lokal dibatasi dengan pembangunan dengan lokasi geografisnya lebih kecil dari regional. Tetapi secara pendekatan, teknik atau metode pembangunan ekonomi regional dapat pula dipergunakan dalam pembangunan lokal, yang meliputi kegiatan menganalisa, mencari solusi dan kegiatan pengaturan/manajemen wilayah (Stamer, 2003).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa regional adalah wilayah yang melibatkan beberapa kabupaten atau kota. Jadi pembangunan regional menitikberatkan pada pembangunan yang melibatkan beberapa kabupaten/kota sedangkan pembangunan lokal hanya melibatkan satu kabupaten atau satu kota saja.

2.1.4. Sektor Ekonomi Potensial

Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung (Tjokroamidjojo, 1993).

Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis, dimana menurut Glasson (1978) sektor basis merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas perekonomian setempat. Besarnya pendapatan pengeluaran dalam sektor basis merupakan fungsi dari permintaan

wilayah-wilayah lain. Tingkat pendapatan yang diperoleh sektor basis tercermin dari tingkat produksinya, sehingga kemampuan produksi sektor basis menjadi faktor penentu pendapatan wilayah. Adapun untuk sektor non basis menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat setempat termasuk kebutuhan sektor basisnya. Peningkatan sektor basis ditentukan oleh pembelanjaan pendapatan sektor basis baik berupa faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja sektor basis. Dengan demikian perkembangan sektor non basis tergantung pada perkembangan sektor basisnya.

Perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi disalurkan sektor basis kepada sektor-sektor non basis yang mendukungnya secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan langsung berupa aliran faktor-faktor produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, modal dan jasa produksi. Keterkaitan tidak langsung berupa transaksi pengeluaran para pekerja sektor basis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan lokal yang melayani kebutuhan para pekerja tersebut turut terkena imbas perkembangan sektor basisnya, dengan demikian adanya keterkaitan yang kuat antara sektor basis dan sektor non basis merupakan syarat mutlak untuk menyebarluaskan pertumbuhan dalam wilayah.

Sektor ekonomi dapat disebut sebagai sektor potensial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis wilayah, sehingga semakin besar barang dan jasa yang dapat diekspor maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang diperoleh suatu wilayah.
2. Memiliki kemampuan daya saing (*competitive advantage*) yang relatif

baik dibanding sektor sejenis dari wilayah lain. Perkembangan sektor ini akan merangsang perkembangan sektor-sektor lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah.

3. Memiliki sumberdaya yang dapat mendukung bagi pengembangannya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat ketersediaan sumber daya yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan sektor ekonomi wilayah tersebut.

2.2. Perencanaan Pengembangan Wilayah

2.2.1. Pengertian Pembangunan Wilayah

Pengertian pembangunan wilayah secara teoritis dikemukakan oleh berbagai ahli, antara lain sebagai berikut:

a. Neoklasik

Hipotesis dasar dari konsep pembangunan wilayah neoklasik adalah pembangunan dijalankan oleh kebutuhan eksternal dan dorongan-dorongan inovatif (pembaruan) dari beberapa kelompok sektor dan lokasi geografi yang dinamis. Pembangunan akan secara spontan atau induksi menetes (*trickling down*) ke sektor-sektor yang tertinggal dan lokasi-lokasi geografis yang lain. Pada teori ini pembangunan dilihat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perwujudan ruangnya adalah konsep pusat pertumbuhan (*the growth concept*) (Misra, 1981).

Konsep pembangunan wilayah seperti di atas menekankan pengambilan keputusan yang tersentralisasi secara cepat dan efektif pada tingkat nasional. Teritorial nasional dianggap sebagai unit agregat sehingga pengembangan wilayah

dengan berdasarkan teori ekonomi neoklasik dan konsep pusat, pertumbuhan ternyata juga menyebabkan terjadinya disintegrasi antara sektor modern dan tradisional, disintegrasi desa kota, memobilisasi surplus desa untuk menyokong pembangunan kota, dan lain-lain (Mabogunje, 1981:17).

b. Stohr

Konsep ini memandang bahwa pembangunan harus didasarkan kepada memobilisasi maksimum dari sumber-sumber alam, manusia dan institusional masing-masing wilayah dengan tujuan utama memuaskan atau memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut. Sehingga hal ini menggambarkan pembangunan yang mandiri dan juga mengurangi efek-efek negatif akibat ketergantungan eksternal.

Konsep pengembangan wilayah tersebut bertujuan pada penyatuan sumber-sumber daya ekonomi, lingkungan dan sosial yang tersedia secara regional semaksimal mungkin.

c. Bendavid-Val

Konsep ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Walter Stohr adalah model integrasi teritorial yang terdesentralisasi. Model ini didasarkan pada pandangan bahwa wilayah dan sub areanya seharusnya mempunyai kemampuan merencanakan dan menerapkan kegiatan pembangunan dengan mencukupi diri mereka sendiri. Penekanan model ini adalah pada ekonomi pembangunan, yaitu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan regional secara langsung. Keuntungan pembangunan didistribusikan melalui *self-sufficiency subregional* yang digiatkan dengan investasi yang disebarakan secara lokal.

Sejalan dengan model integrasi teritorial yang terdesentralisasi di atas, konsep pengembangan wilayah tersebut juga mirip dengan strategi kebutuhan dasar, yaitu strategi pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.2. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Bratakusumah (2003), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Lingkungan.

Aspek lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil tidaknya program pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai ornamen penting dalam proses pembangunan. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua bagian, pertama lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam populasi dimana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan, kedua lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada

diluar populasi tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan.

2. Aspek Potensi dan Masalah.

Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Bahkan hal tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

3. Aspek Institusi Perencana.

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dalam hal ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Manfred Poppe (1995) dalam Batakusumah mengemukakan bahwa untuk merancang dan menciptakan proses perencanaan yang partisipatif di tingkat daerah, perencanaan daerah harus mencapai suatu pemahaman tentang kerangka organisasi perencana dimana perencanaan akan dilaksanakan.

4. Aspek Ruang dan Waktu.

Sebagai suatu tahapan maka perencanaan pembangunan akan terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu harus menjelaskan suatu kebutuhan dalam *timing* yang tepat tentang kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (*replanning*).

5. Aspek Legalisasi Kebijakan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, masalah legalisasi kebijakan

memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

2.2.3. Kajian Pertumbuhan Wilayah

Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang diawali dari pusat kota yang berinteraksi melalui pusat-pusat pertumbuhan lainnya mengikuti hierarki dalam suatu pusat-pusat pertumbuhan. Jika ditinjau dari aspek ruang ekonomi, menurut Sujarto (1981) bahwa dalam ruang ekonomi akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran hierarki dan pembangunan akan terstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan secara regional dari pusat tersebut ke masing-masing wilayah belakangnya.

Wilayah diidentifikasi sebagai suatu area kekuatan yang didalamnya terdapat pusat-pusat atau kutub-kutub. Setiap pusat atau kutub mempunyai kekuatan pengembangan keluar dan kekuatan tarik ke dalam. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka Perroux dalam Daldjoeni (1997) menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan kutub (*growth pole*) yang terpusat dan mengambil tempat tertentu sebagai pusat pengembangan diharapkan menjalarkan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah *spread* dan *trickling down* (penjalaran dan penetesan) serta *backwash* dan *polarization* (penarikan dan pemusatan).

Kenyataan yang terjadi menurut teori sektor, dimana ruang lingkup dari relokasi sumber daya internal adalah besar di daerah-daerah pertanian yang

miskin dari pada di daerah-daerah yang lebih berkembang. Konsekuensi yang timbul dari proses tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Myrdal (1957) bahwa suatu daerah yang lebih maju akan berkembang lebih cepat dari pada yang kurang maju. Hal ini disebabkan karena *backwash effect* yang ditimbulkan oleh daerah yang maju adalah lebih besar dari pada *spread effect*. *Backwash effect* diartikan sebagai mengalirnya faktor-faktor produksi potensial dari tempat atau daerah miskin ke daerah kaya. Sebagai contoh migrasi penduduk usia produktif, berpindah atau mengalirnya tenaga-tenaga terampil dan terdidik serta modal atau sumber daya alam ke pusat kota atau ke wilayah yang besar. Penduduk yang kurang terampil dan produktivitasnya relatif rendah akan tertinggal. Dalam hal ini konsentrasi pembangunan sarana dan prasarana serta pemasaran akan lebih terpusat dan lebih baik di daerah perkotaan, sehingga terjadi pemusatan kegiatan ekonomi yang akan mendorong tingkat pertumbuhan.

Kartasasmita (1996) mengatakan bahwa faktor-faktor kesenjangan pertumbuhan wilayah disebabkan terutama oleh lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah perdesaan menyebabkan produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan menjadi rendah. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana perhubungan di daerah perdesaan, khususnya prasarana dan sarana yang menghubungkan suatu daerah miskin dengan daerah-daerah yang lebih maju.

Kondisi wilayah pusat pertumbuhan dihadapkan pada masalah yang merupakan konsekuensi logis dari mengelompoknya penduduk dan aktivitas di

tempat-tempat tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Oppenheim bahwa penambahan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh faktor alami melainkan juga disebabkan oleh adanya migrasi. Pergerakan penduduk erat hubungannya dengan pemusatan penduduk di suatu kota atau daerah, dimana terdapat kesempatan lapangan kerja atau pusat kegiatan yang dominan maka disanalah arus pergerakan penduduk terjadi, hal ini dapat membantu dalam mengetahui lokasi pusat kegiatan dan pola pusat kegiatan di suatu wilayah. Menurut Branch (1995) daerah-daerah yang ada sangat beraneka ragam bentuknya, mulai yang kecil, sedang dan besar serta berpenduduk jarang dan padat dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, keagamaan yang beragam merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pola pertumbuhan wilayah tersebut. Sejalan dengan hal itu pertumbuhan dari daerah yang berada di sekitar pusat kota akan mengalami pertumbuhan yang lambat karena adanya daya tarik dari pusat kota, khususnya sumber daya manusia yang produktif dan sumber daya ekonomi.

Richardson (1974) menyebutkan sistem pusat pertumbuhan merupakan sistem yang paling efisien dalam menjalankan perkembangan wilayah dan juga sistem ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mendistribusi pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat luas. Namun menurut Sujarto (1981) bahwa tanpa adanya hierarki yang jelas maka akan sulit mekanisme penjalaran perkembangan dari pusat-pusat pengembangan wilayah ekonomi yang terbentuk, malah kemungkinan besar akan mempertajam kesenjangan yang ada antara kota-kota kecil dengan kota-kota yang lebih besar atau antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan.

Lebih lanjut May (1984) menyatakan bahwa permasalahan umum pertumbuhan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia adalah pola pemanfaatan lahan yang belum optimal, tingkat pertumbuhan perdesaan dan perkotaan yang tidak seimbang, kemampuan mengelola sumber daya yang ada masih rendah, belum terjangkau oleh teknologi yang memadai, tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah, tingkat pelayanan jasa, pemerintah dan sosial belum memadai, wilayah yang berperan sebagai penghasil produksi primer yang hasilnya harus dipasarkan keluar tidak dapat terlaksana dengan baik karena lemahnya transportasi dan tidak mempunyai hubungan yang kuat dalam pemasaran hasil tersebut.

Menurut Sujarto (1991) bahwa faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pola struktur pusat-pusat pelayanan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1. faktor manusia, 2. faktor kegiatan manusia dan 3. faktor pola pergerakan manusia pada suatu pusat kegiatan ke pusat kegiatan lainnya. Selanjutnya diterangkan bahwa faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota naik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota, perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan kemampuan ilmu pengetahuan serta penyerapan teknologi. Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pola pergerakan disebabkan oleh faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya yang akan membentuk pola hubungan antara pusat-pusat kegiatan dengan sub-sub pusat kegiatan lainnya.

Yunus (1999) mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perbedaan pertumbuhan pada suatu wilayah, yang akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas yaitu: 1. Fasilitas-fasilitas yang khas tertentu (*specialized facilities*), 2. Faktor ekonomi eksternal (*external economies*), 3. Faktor yang saling merugikan antar fungsi yang tidak serupa dan 4. faktor kemampuan fungsi ekonomi yang berbeda.

2.2.4. Paradigma Baru Pembangunan Wilayah

Pengertian perencanaan wilayah memiliki arti yang berbeda-beda khususnya di negara-negara berkembang, tetapi secara umum mereka setuju bahwa perencanaan wilayah merupakan aktivitas yang mendasar dari suatu pemerintahan. Kegiatan ini banyak sekali mengadopsi dari kegiatan yang dilakukan di negara-negara maju. Pertama, perencanaan wilayah bukan sekedar aktivitas ekonomi tradisional tetapi lebih memusatkan pada alokasi sumber daya antar wilayah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, perencanaan wilayah lebih mengembangkan pada kegiatan-kegiatan fisik, seringkali menekankan pada kontrol pembangunan tata guna lahan (Glasson, 1978). Perencanaan pembangunan wilayah juga sering kali dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, sarana komunikasi dan fasilitas lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, perencanaan wilayah mulai memperhatikan pada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang melibatkan kegiatan fisik, ekonomi dan perencanaan sosial baik regional maupun nasional.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, ada pergeseran dalam perencanaan wilayah di beberapa negara. Pada negara-negara maju mulai melakukan desentralisasi pada agen pembangunan dan institusi pengambil kebijakan regional serta kebijakan-kebijakan baru yang berorientasi lokal didesain untuk mendorong pembangunan endogen. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mendorong dinamisasi pembangunan lokal serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang berbasis lokal.

Pergeseran perencanaan wilayah ini praktis selalu diinterpretasikan dalam teori dan penelitian-penelitian yang memperdebatkan antara dua model atau pendekatan yang berbeda. Pertama adalah model pembangunan dari atas (*Development from above*) dan yang kedua adalah model pembangunan dari bawah (*Development from below*) (Edgington et al, 2001).

a. Konsep Pembangunan dari Atas (*Development from above*)

Pendekatan pengembangan dari atas melihat pengembangan wilayah pada dasarnya adalah bersumber dari inti atau pusat pertumbuhan yang kemudian menyebar ke wilayah pinggiran atau wilayah belakangnya. Paradigma pengembangan ini muncul disebabkan adanya sudut pandang yang melihat bahwa pengembangan wilayah dimulai dari adanya permintaan skala dunia (*worldwide demand*), kemudian menurun pada tingkatan nasional, subnasional, satuan kota dan pada akhirnya satuan wilayah belakang (Nelson,1993). Akar teori pengembangan wilayah ini adalah model teori neoklasik, yang tertuang dalam konsep pertumbuhan berimbang (*balanced and unbalanced growth*) pada tahun

1950-an. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembangunan akan mengarah kepada pertumbuhan karena adanya dua faktor, yaitu:

1. Permintaan yang berasal dari luar.
2. Terdapatnya beberapa sektor atau kelompok wilayah yang menjadi penggerak dan mampu menciptakan efek penetesan ke wilayah lainnya (*Trickle Down Effect*).

Dengan asumsi yang demikian maka orientasinya lebih cenderung mengarah keluar (*outward-looking*), mengarah pada perkotaan dan industri, pada modal (*capital intensive*), penggunaan teknologi tinggi dan pendekatan proyek skala besar.

b. Konsep Pembangunan dari Bawah (*Development from below*).

Markusen (1987) mengamati sejarah perkembangan dari kebijaksanaan lokal di Amerika yang dipengaruhi oleh dua hal yang dominan, yaitu:

1. Pengembangan teritorial, termasuk didalamnya ekspansi dan konsolidasi dalam proses pembangunan negara.
2. Membangun wilayah berdasarkan pada homogenitas politik-ekonomi dan orientasi sosial dari dua hal tersebut. Tujuan dari aliran pengembangan dari bawah adalah untuk membentuk pola pengembangan sehingga mendapatkan karakteristik wilayah.

Meskipun terdapat perbedaan substansial pada kedua pendekatan, kedua model mencerminkan kebutuhan terhadap kemungkinan perubahan yang sangat cepat dalam perencanaan wilayah.

Lebih lanjut Edgington et al (2001) mengemukakan bahwa pada tahun 1980-an dimulai babak baru perencanaan wilayah yang terjadi di negara-negara berkembang. Perencanaan wilayah telah melibatkan aktivitas-aktivitas multisektor dan multilevel dalam pemerintahan serta aktor pembangunan lainnya di daerah. Perencanaan Wilayah merupakan proses integrasi dari berbagai dimensi pembangunan yaitu: sosial, ekonomi dan spasial.

2.3. Keterkaitan Antar Wilayah

2.3.1. Kaitan Intrasektoral dan Antarsektor

Keterkaitan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya dan eksternalitas aglomerasi dipandang sebagai faktor penentu yang penting dalam konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Kaitan intrasektoral (kaitan antar perusahaan dalam sektor yang sama) dan kaitan antar sektor adalah suatu cara untuk melihat eksternalitas aglomerasi, baik yang dipicu oleh input (pemasok) ataupun output (pelanggan) (Kuncoro, 2002).

Lebih jauh Kuncoro menjelaskan bahwa untuk melihat eksternalitas aglomerasi dan kaitan antar sektor digunakan model *Input-Output* (I-O). Analisis I-O mencoba untuk menghitung ketergantungan ekonomi dalam suatu daerah tertentu, baik sebuah negara, daerah atau sebuah daerah metropolitan. Data I-O memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hubungan antar sektor dalam suatu daerah dan transaksi antar daerah diantara banyak sektor.

Analisis I-O adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah tersebut

secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu, I-O juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi perubahan tingkat produksi sektor tertentu, dapat dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat akan bertambah ataupun berkurang (Tarigan, 2005). Hoover dalam Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa model I-O merupakan alat yang populer untuk menganalisis tiga jenis keterkaitan spasial yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi regional, yaitu: keterkaitan horisontal, keterkaitan vertikal dan keterkaitan komplementer. Keterkaitan horisontal meliputi persaingan antar pelaku ekonomi, keterkaitan vertikal meliputi kaitan ke belakang (*backward linkage*) yaitu daya tarik terhadap sumber bahan baku dan kaitan ke depan (*forward linkage*) yaitu daya tarik terhadap pasar, sedangkan keterkaitan komplementer diasosiasikan dengan pembentukan kluster akibat memproduksi barang/jasa yang saling melengkapi ataupun yang berkaitan/sejenis.

2.3.2. Kaitan Antar Daerah

Dalam analisis ekonomi regional harus disadari bahwa dalam suatu wilayah terdapat perbedaan yang menciptakan suatu hubungan yang unik antara suatu bagian dengan bagian lain dalam wilayah tersebut. Ada tempat-tempat dimana penduduk/kegiatan berkonsentrasi dan ada tempat dimana penduduk/kegiatan kurang terkonsentrasi. Hubungan antara kedua tempat tersebut yang oleh Tarigan (2005) dikatakan sebagai hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya (*hinterland*). Lebih lanjut Tarigan menerangkan bahwa

hubungan antara kota dan daerah belakangnya dapat dibedakan antara kota generatif, kota parasitif dan kota *enclave*.

Kota generatif adalah kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk daerah belakangnya sehingga bersifat saling menguntungkan/mengembangkan. Kota parasitif adalah kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan daerah belakangnya. Kota parasitif umumnya adalah kota yang belum berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian tetapi juga perkotaan sekaligus. Selain kedua bentuk hubungan tersebut, masih ada satu bentuk hubungan yang tidak menguntungkan daerah belakangnya yaitu kota yang bersifat *enclave* (tertutup). Kota ini seakan-akan terpisah sama sekali dari daerah sekitarnya, ia tidak membutuhkan *input* dari daerah sekitarnya melainkan dari luar. Hal ini membuat daerah belakang itu makin ketinggalan dan keadaan antara kota dengan desa makin pincang. Untuk menghindari hal ini, daerah belakang perlu lebih didorong dengan melakukan kerjasama agar pertumbuhan daerah belakang bisa lebih sejajar dengan pertumbuhan kota.

Secara umum sebab-sebab perlunya suatu kerjasama antar daerah menurut Mehrtens dan Abdurahman (2007) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Keterbatasan Daerah (Kebutuhan): hal ini dapat terjadi dalam konteks sumber daya manusia, alam, teknologi dan keuangan, sehingga suatu kebersamaan dapat menutupi kelemahan dan mengisinya dengan kekuatan potensi daerah lainnya.

2. Faktor Kesamaan Kepentingan: adanya persamaan visi pembangunan dan memperbesar peluang memperoleh keuntungan, baik finansial maupun non-finansial untuk mencapainya.
3. Berkembangnya paradigma baru di masyarakat: perlunya pengembangan sistem perencanaan dan pembangunan komunikatif-partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah.
4. Menjawab kekhawatiran disintegrasi: dimana kerjasama dapat menjadi instrumen yang efektif dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan nasional (sinkronisasi dan harmonisasi).
5. Sinergi antar daerah: tumbuhnya kesadaran, bahwa dengan kerjasama antar daerah dapat meningkatkan dampak positif dari berbagai kegiatan pembangunan yang semula sendiri-sendiri menjadi suatu kekuatan regional.
6. Sebagai pendorong dalam mengefektifkan potensi dan menggalang kekuatan endogen dalam kegiatan pembangunan wilayah.

Dalam analisis keterkaitan antar daerah ini, model ekonomi regional dan perkotaan dengan pendekatan I-O telah umum diterapkan, namun amat jarang didasarkan pada analisis transaksi ekspor dan impor. Tidak tersedianya data regional yang memadai mempersulit dilakukannya pantauan dan evaluasi kinerja ekonomi suatu daerah dan kaitannya dengan daerah lain (Harris dan Liu dalam Kuncoro, 2002). Analisis I-O antar daerah (IRIO) relatif baru di Indonesia. IRIO yang pertama tahun 1985 untuk 5 (lima) pulau utama di Indonesia dikompilasi

pada tahun 1989 dan laporan pendahuluan pertama untuk diskusi dipublikasikan pada tahun 1990.

2.4. Sintesis Kajian Pustaka

2.4.1. Ringkasan

Dari kajian pustaka tersebut di atas, dapat ditarik beberapa rumusan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

TABEL II.1
SINTESIS KAJIAN PUSTAKA
PERWILAYAHAN DAN INTERAKSI EKONOMI

| No. | Definisi | Pengelompokan Definisi | Unsur yang diperhatikan |
|-----|---|---|--|
| 1. | <p><u>Konsep Perwilayahan</u></p> <p>Konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan “wilayah formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional. (John Glasson, 1977)</p> <p>Menurut Tarigan (2004) Wilayah diartikan sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Wilayah menurut tipe-tipenya dapat dipilah menjadi 3 (tiga) macam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah homogen (<i>homogeneous region</i>) 2. Wilayah heterogen (<i>nodal region</i>) 3. Wilayah perencana (<i>planning region</i>) | Konsep perwilayahan memperhatikan prinsip homogenitas, prinsip fungsional dan prinsip perencanaan | Homogenitas, fungsional dan perencanaan. |

Lanjutan

| No. | Definisi | Pengelompokan Definisi | Unsur yang diperhatikan |
|-----|--|--|---|
| 2. | <p><u>Pembangunan Wilayah</u></p> <p>Pembangunan dijalankan oleh kebutuhan eksternal dan dorongan-dorongan inovatif (pembaruan) dan dari beberapa kelompok sektor dan lokasi geografi yang dinamis pembangunan akan secara spontan atau induksi menetes (<i>trickling down</i>) ke sektor-sektor yang tertinggal dan lokasi-lokasi geografis yang lain. (Misra, 1981)</p> <p>Pembangunan wilayah harus didasarkan kepada memobilisasi maksimum dari sumber-sumber alam, manusia dan institusional masing-masing wilayah dengan tujuan utama memuaskan atau memenuhi kebutuhan dasar penduduk diwilayah tersebut. Sehingga hal ini menggambarkan pembangunan yang mandiri dan juga mengurangi efek-efek negatif akibat ketergantungan eksternal. (Stohr)</p> <p>Pembangunan wilayah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan regional secara langsung. Keuntungan pembangunan didistribusikan melalui <i>self-sufficiency</i> subregional yang digiatkan dengan investasi yang disebarakan secara lokal. (Bendavid – Val)</p> | <p>Pembangunan Wilayah adalah dorongan inovatif dari berbagai sektor dalam memobilisasi sumber daya pada wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan regional secara langsung</p> | <p>Kegiatan inovatif, mobilisasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan regional</p> |
| 3. | <p><u>Pertumbuhan Wilayah</u></p> <p>Dalam ruang ekonomi akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran hierarki dan pembangunan akan terstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan secara regional dari pusat tersebut ke masing-masing wilayah belakangnya (Sujarto, 1981)</p> <p>Konsep pertumbuhan kutub (<i>growth pole</i>) yang terpusat dan mengambil tempat tertentu sebagai pusat pengembangan diharapkan menjalarkan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah <i>spread</i> dan <i>trickling down</i> (penjalaran dan penetesan) serta <i>backwash</i> dan <i>polarization</i> (penarikan dan</p> | <p>Pertumbuhan wilayah adalah kondisi terciptanya pusat pertumbuhan secara regional dan menjalar ke wilayah yang lebih rendah tingkatannya serta terciptanya suatu sistem distribusi barang dan jasa yang efisien.</p> | <p>Pusat pertumbuhan, penjalaran dan sistem distribusi</p> |

Lanjutan

| No. | Definisi | Pengelompokan Definisi | Unsur yang diperhatikan |
|-----|--|---|--------------------------------------|
| | <p>pemusatan). (Perroux dalam Daldjoeni, 1977)</p> <p>Sistem pusat pertumbuhan merupakan sistem yang paling efisien dalam menjalankan perkembangan wilayah dan juga sistem ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mendistribusi pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat luas (Richardson, 1974)</p> <p>Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pola struktur pusat-pusat pelayanan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1.faktor manusia, 2. faktor kegiatan manusia dan 3. faktor pola pergerakan manusia pada suatu pusat kegiatan ke pusat kegiatan lainnya. (Sujarto, 1991)</p> <p>Beberapa faktor penyebab perbedaan pertumbuhan pada suatu wilayah, yang akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas yaitu: 1. Fasilitas-fasilitas yang khas tertentu (specialized facilities), 2. Faktor ekonomi eksternal (external economies), 3. Faktor yang saling merugikan antar fungsi yang tidak serupa dan 4. faktor kemampuan fungsi ekonomi yang berbeda. (Yunus, 1999)</p> | | |
| 4. | <p><u>Sektor Ekonomi Potensial</u></p> <p>Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung (Tjokroamidjojo, 1993)</p> <p>Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis, dimana menurut Glasson (1978) sektor basis merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas perekonomian setempat</p> | <p>Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas perekonomian setempat</p> | <p>Sektor basis, sektor unggulan</p> |

Lanjutan

| No. | Definisi | Pengelompokan Definisi | Unsur yang diperhatikan |
|-----|---|---|--|
| 5. | <p><u>Keterkaitan Ekonomi</u></p> <p>Keterkaitan ekonomi (<i>economic linkage</i>) pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya dan eksternalitas aglomerasi dipandang sebagai faktor penentu yang penting dalam konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Untuk melihat eksternalitas aglomerasi dan kaitan antar sektor digunakan model Input-Output (I-O). Analisis I-O mencoba untuk menghitung ketergantungan ekonomi dalam suatu daerah tertentu, baik sebuah negara, daerah atau sebuah daerah metropolitan. (Kuncoro, 2002)</p> <p>Analisis I-O adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. (Tarigan 2005)</p> | <p>Keterkaitan ekonomi menggambarkan hubungan perekonomian suatu wilayah yang melibatkan kaitan antar sektor ekonomi secara komprehensif</p> | <p>Keterkaitan ekonomi, Sektor ekonomi, Input-Output</p> |
| 6. | <p><u>Paradigma Baru Pembangunan Wilayah</u></p> <p>Pergeseran perencanaan wilayah selalu diinterpretasikan dalam teori dan penelitian-penelitian yang memperdebatkan antara dua model atau pendekatan yang berbeda. Pertama adalah model pembangunan dari atas (<i>Development from above</i>) dan yang kedua adalah model pembangunan dari bawah (<i>Development from below</i>) (Edgington dan Fernandez, 2001).</p> <p>Pendekatan pengembangan dari atas melihat pengembangan wilayah pada dasarnya adalah bersumber dari inti atau pusat pertumbuhan yang kemudian menyebar ke wilayah pinggiran atau wilayah belakangnya. (Nelson, 1993)</p> <p>Menurut Markusen (1987), pembangunan dari bawah dipengaruhi oleh dua hal:</p> | <p>Perencanaan wilayah telah melibatkan aktivitas-aktivitas multisektor dan multilevel dalam pemerintahan serta aktor pembangunan lainnya di daerah. Perencanaan Wilayah merupakan proses integrasi dari berbagai dimensi pembangunan yaitu: sosial, ekonomi dan spasial.</p> | <p>Aktor pembangunan, aktivitas multisektor, dan proses integrasi berbagai dimensi pembangunan</p> |

Lanjutan

| No. | Definisi | Pengelompokan Definisi | Unsur yang diperhatikan |
|-----|--|---------------------------|----------------------------|
| | 3. Pengembangan teritorial, termasuk didalamnya ekspansi dan konsolidasi dalam proses pembangunan negara. 4. Membangun wilayah berdasarkan pada homogenitas politik-ekonomi dan orientasi sosial dari dua hal tersebut. Tujuan dari aliran pengembangan dari bawah adalah untuk membentuk pola pengembangan sehingga mendapatkan karakteristik wilayah. | | |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

2.4.2. Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dibahas sebelumnya, didapatkan beberapa aspek yang digunakan dalam melihat hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan perwilayahan dan interaksi ekonomi yang terjadi di dalam wilayah tersebut. Beberapa aspek tersebut antara lain:

1. Potensi sumber daya wilayah, mengindikasikan kemampuan dari sumber-sumber alam, manusia dan institusional masing-masing wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut.
2. Potensi atau sektor unggulan mengindikasikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif untuk dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah.
3. Keterkaitan antar sektor ekonomi mengindikasikan hubungan antara sektor perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan sehingga dapat terlihat dampak dari perubahan tingkat produksi sektor tertentu terhadap sektor lain.

4. Keterkaitan antar daerah mengindikasikan hubungan perekonomian antar daerah di suatu wilayah tertentu yang menunjukkan adanya aliran atau distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH KEDUNGSEPUR

3.1. Lokasi dan Posisi Kawasan Kedungsepur

3.1.1 Letak Administrasi dan Kedudukan Geografis Kawasan Kedungsepur

Kawasan Kedungsepur merupakan gabungan dari enam Kabupaten/Kota, terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini secara geografis terletak diantara 109°10' - 111°25' BT, dan 6°43'26'' - 7°32' LS, dengan batas administrasi dan fisiografi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kabupaten Jepara.

Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Magelang.

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora.

Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I.1

Luas keseluruhan Wilayah Kedungsepur sebesar 5.256,53 Km² atau sekitar 16,25% dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara topografi, Kawasan Kedungsepur bagian utara terletak pada ketinggian antara 0-25 m dan merupakan daerah dataran rendah, sedang bagian Selatan memiliki ketinggian antara 0-2.579 m yang merupakan daerah tanah pegunungan.

Ketinggian masing-masing daerah Wilayah Kedungsepur, yaitu:

- Kabupaten Kendal : 50-2.579 m dpl

- Kabupaten Demak : 3-100 m dpl
- Kabupaten Semarang : 310-1.950 m dpl
- Kabupaten Grobogan : 11-129 m dpl
- Kota Semarang : 0,75-359 m dpl
- Kota Salatiga : 525-675 m dpl

Kondisi fisik wilayah ini mempunyai karakteristik, yaitu:

- Pesisir Utara, membentang dari Kendal, Kota Semarang ke Demak. Kawasan ini merupakan kawasan pantai yang dibudidayakan sebagai kawasan tambak serta menjadi daerah hilir/muara beberapa sungai besar di Sub Regional Kedungsepur;
- Bagian Selatan, merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi yang sudah tidak aktif lagi, dengan puncaknya yaitu Gunung Ungaran. Daerah ini merupakan daerah yang cukup subur, banyak mata air, hulu sungai, serta tambang mineral;
- Bagian Timur dan Tenggara, terdapat daerah rawan banjir yaitu di daerah Demak.

3.1.2 Posisi Strategis Kawasan Kedungsepur

Kawasan Strategis Kedungsepur merupakan salah satu kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota. Kawasan ini memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan perwilayahan Provinsi Jawa Tengah maupun dalam konteks perwilayahan yang lebih luas. Posisi strategis ini antara lain meliputi:

- **Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.** Sebagai ibu kota Provinsi, Kota Semarang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial dan budaya bagi wilayah lainnya di Provinsi Jawa Tengah.
- **Berada di jalur utara Pulau Jawa** yang merupakan penghubung Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat. Letak ini akan memberikan peluang di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, atau kegiatan lain.
- **Dilalui oleh jalur utama Provinsi Jawa Tengah,** yaitu jalur Semarang-Bawen, Bawen-Surakarta, dan Bawen-Magelang-Yogyakarta. Jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Tengah bagian utara (Semarang, Kudus, Pekalongan, Tegal, dan sekitarnya) dan bagian Selatan sampai Barat (Surakarta, Magelang, Purwokerto dan sekitarnya).
- **Dilalui oleh jalur-jalur nasional.** Di Kota Semarang terdapat pelabuhan laut skala nasional sehingga mempermudah pula hubungan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Selain pelabuhan di Kota Semarang, di Kabupaten Kendal nantinya juga akan dikembangkan Pelabuhan Samudra yang merupakan pelabuhan dengan skala internasional. Di bidang transportasi udara, telah tersedia Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang sebagai bandar udara nasional yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia.
- **Memiliki akses pada pergerakan internasional.** Pada Kota Semarang terdapat Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Mas. Kedua fasilitas ini merupakan akses penghubung wilayah Kedungsepur menuju arus pergerakan internasional. Karenanya wilayah Kedungsepur memiliki potensi

pengembangan yang besar.

- **Merupakan salah satu kawasan pusat pengembangan** di Provinsi Jawa Tengah selain Kawasan Joglosemar. Kawasan Strategis Kedungsepur juga berhimpit dengan kawasan-kawasan andalan yang ditetapkan dalam RTRW Nasional (Subosuka). Hal ini akan memberikan peluang bagi perkembangan sektor-sektor perekonomian, seperti pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata.
- **Melingkupi kawasan-kawasan strategis** yang mempunyai peran penting dalam skala regional, yaitu diantaranya *kawasan industri* sepanjang jalur Semarang-Demak; Semarang-Kendal; dan Ungaran-Bawen; *kawasan pariwisata* berkembang seperti Bandungan, Rawa Pening, Ungaran, Kopeng dan sekitarnya; dan *kawasan potensial produksi buah-buahan dan sayur-sayuran* seperti Bandungan, Ungaran, Ambarawa dan sekitarnya.
- **Memiliki cukup banyak objek wisata** yang tersebar pada daerah Kabupaten/Kota di Kedungsepur, diantaranya Kota Lama Semarang, Rawa Pening, Museum Kereta Api Ambarawa, Jalan KA Tuntang-Ambarawa-Bedono, Masjid Agung Demak, dan Bledug Kuwu. Hal ini dapat menjadi potensi pengembangan wilayah bila disediakan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dapat juga ditawarkan paket wisata terpadu antar lokasi wisata yang ada, sehingga hasil yang didapat tidak hanya dinikmati oleh satu daerah saja, tapi dinikmati bersama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peluang-peluang yang dimiliki berkaitan dengan kedudukan Kawasan Strategis Kedungsepur adalah cukup besar,

terutama peluang perekonomian yang bersifat sekunder dan tersier (industri, perdagangan, dan jasa).

3.1.3 Sistem Perkotaan dan Kawasan Tertentu dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada dua aspek, yaitu potensi dan permasalahan yang berkembang di lapangan dan arahan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN. Di Kawasan Kedungsepur, kota-kota yang ada berdasarkan skala pelayanannya dikelompokkan ke dalam skala pelayanan nasional, skala pelayanan wilayah, dan skala pelayanan lokal. Pengelompokkan kota-kota tersebut adalah:

1. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (KPPKN): Kota Semarang.
2. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (KPPKW): Koridor Kota Ungaran-Bawen-Ambarawa, Kota Salatiga.
3. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Lokal (KPPKL): Kota Kendal, Kota Demak, Kota Purwodadi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Kedungsepur merupakan kawasan yang menjadi pusat pelayanan dalam skala provinsi. Hal ini disebabkan oleh adanya Kota Semarang yang merupakan kota utama dalam hirarki lingkup perkotaan regional-nasional. Meskipun demikian, perkembangan kawasan di Jawa Tengah diusahakan agar dapat menyebar dan tidak terpusat pada satu kawasan

3.2. Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik Kawasan Kedungsepur secara umum cukup beragam, meliputi wilayah yang dataran rendah hingga perbukitan, sebagai bentukan akibat

dilingkupi oleh beberapa gunung dan pegunungan. Secara lengkap akan dibahas mengenai kondisi fisik wilayah meliputi: topografi dan morfologi, geologi dan jenis tanah, hidrologi, klimatologi dan sumber daya mineral.

3.2.1 *Kondisi Topografi dan Morfologi*

Secara topografi, Wilayah Kedungsepur bagian Utara terletak pada ketinggian antara 0-25 m dan merupakan daerah dataran rendah, sedang bagian selatan memiliki ketinggian antara 0-2.579 m yang merupakan daerah tanah pegunungan. Ketinggian masing-masing daerah Wilayah Kedungsepur, yaitu:

- Kota Semarang : 0,75-359 m dpl.
- Kota Salatiga : 525-675 m dpl.
- Kabupaten Kendal : 50-2579 m dpl.
- Kabupaten Demak : 3-100 m dpl.
- Kabupaten Semarang : 310-1950 m dpl.
- Kabupaten Grobogan : 11 - 129 m dpl.

Kondisi topografi ini menghasilkan klasifikasi kelerengan dalam kawasan Kedungsepur. Kondisi fisik kawasan Kedungsepur mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Pesisir utara, membentang dari Kendal, Kota Semarang ke Demak. Kawasan ini merupakan kawasan pantai yang dibudidayakan sebagai kawasan tambak serta menjadi daerah hilir/muara beberapa sungai besar di Sub Regional Kedungsepur.
- Bagian Timur dan Tenggara, terdapat daerah rawan banjir yaitu di daerah Demak.

- Bagian Selatan, merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi yang sudah tidak aktif lagi, dengan puncaknya yaitu Gunung Ungaran. Daerah ini merupakan daerah yang cukup subur, banyak mata air, hulu sungai serta tambang mineral.

3.2.2 Kondisi Klimatologi

Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Secara umum Kawasan Kedungsepur beriklim tropis, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.846,4 mm dan hari hujan rata-rata adalah 124 hari/tahun (Lihat Tabel III.1).

TABEL III.1
CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2005

| No | Kabupaten/ Kota | Hari Hujan (hari) | Curah Hujan (Mm) |
|----|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Kota Semarang | 172 | 11.182 |
| 2 | Kota Salatiga | 120 | 2.191 |
| 3 | Kabupaten Kendal | 104 | 2.110 |
| 4 | Kabupaten Demak | 128 | 3.004 |
| 5 | Kabupaten Semarang | 123 | 2.527,2 |
| 6 | Kabupaten Grobogan | 102 | 2.064 |
| | Rata-rata | 124 | 3.846,4 |

Sumber : Kabupaten/Kota dalam Angka 2006

Temperatur udara maksimum-minimum di Kawasan Kedungsepur rata-rata 33,7 °C dengan temperatur tertinggi pada bulan September dan temperatur terendah pada bulan Juli dan Agustus (22,4°C). Sedangkan kelembaban nisbi rata-rata mencapai 79 % dengan prosentase terbesar pada bulan Desember yang

mencapai rata-rata 85%, sedangkan arah angin sebagian besar bergerak dari arah tenggara barat laut dengan kecepatan rata-rata antara 5,90 km per jam.

3.2.3 *Kondisi Hidrologi*

Sumber-sumber air di Wilayah Kedungsepur berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, bendungan, laut dan pantai. Sungai-sungai utama yang terdapat di Wilayah Kedungsepur meliputi: Kali Bulawan, Sungai Garang, Sungai Bodri, Sungai Babon/Penggaron, Sungai Jragung, Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Adapun sumber-sumber mata air selain sungai terdiri atas danau, waduk dan mata air yang antara lain meliputi: Rawa Pening, beberapa mata air dan Waduk Kedung Ombo.

3.2.4 *Kondisi Geologi*

3.2.4.1 **Geomorfologi**

Struktur geomorfologi di Kawasan Kedungsepur dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah terutama pada wilayah kabupaten/kota yang terletak di pesisir pantai utara. Sedangkan daerah perbukitan mencakup wilayah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang serta Kabupaten Kendal bagian Selatan.

3.2.4.2 **Stratigrafi**

Kondisi stratigrafi di Kawasan Kedungsepur disusun oleh struktur batuan yang terbagi menjadi dua bagian. Daerah dataran rendah memiliki struktur geologi berupa batuan endapan atau alluvium yang berasal dari endapan sungai.

Sedangkan daerah perbukitan memiliki susunan batuan beku. Secara keseluruhan struktur geologi Kawasan Kedungsepur terdiri dari batuan alluvium berupa aluvial kelabu kuning dan aluvial yodimorf.

3.2.4.3 Struktur Geologi

Pada dasarnya struktur geologi yang menyusun Kawasan Kedungsepur cenderung bervariasi tergantung dari letak wilayah terhadap daerah sekitarnya. Struktur geologi di Kawasan Kedungsepur terdiri dari berbagai batuan yang meliputi: Batuan Endapan Aluvial, Batuan Formasi Kerek, Batuan Formasi Damar, Batuan Formasi Kaliteng, Batuan Formasi Kaligetas, Batuan Gunung Api Gajahmungkur, Batuan Gunung Api Gilipetung, Batuan Formasi Penyatan, Batuan Gunung Api Merbabu, Batuan Formasi Bulu, Batuan Gunung Api Tak Terpisahkan

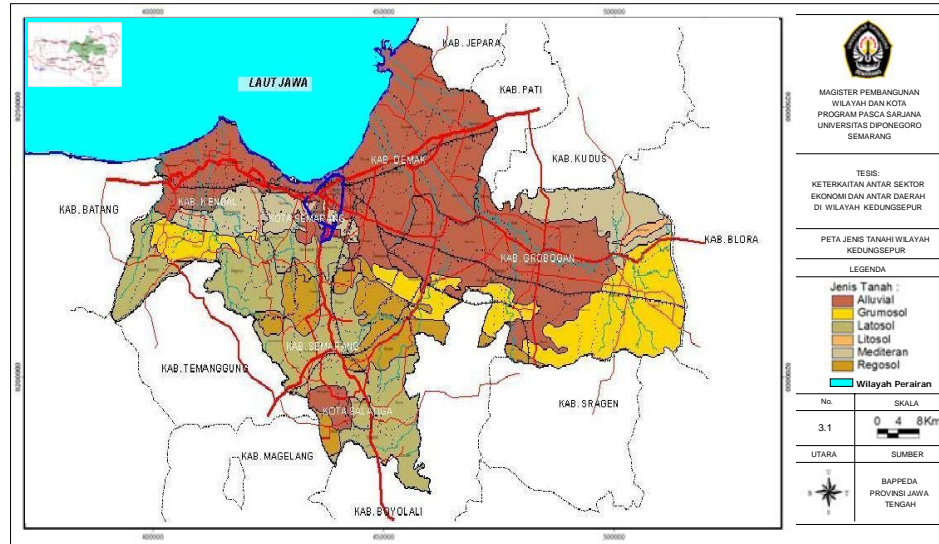
3.2.4.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kawasan Kedungsepur dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Gambar 3.1 berikut:

**TABEL III.2
JENIS TANAH DI WILAYAH KEDUNGSEPUR**

| No. | Jenis Tanah | Luas Lahan (Km2) | Prosentase (%) |
|-----|-------------|------------------|----------------|
| 1. | Alluvial | 1968,86 | 37,45 |
| 2. | Latosol | 959,32 | 18,25 |
| 3. | Regosol | 457,32 | 8,70 |
| 4. | Mediteran | 849,98 | 16,17 |
| 5. | Litosol | 494,11 | 9,40 |
| 6. | Grunosol | 393,19 | 7,48 |

Sumber: Bappeda



MAGISTER PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS:
KETERKAITAN ANTAR SEKTOR
EKONOMI DAN ANTAR DAERAH
DI WILAYAH KEDUNGSEPUR

PETA JENIS TANAH WILAYAH
KEDUNGSEPUR

LEGENDA

- Jenis Tanah :
- Alluvial
 - Grumosol
 - Latosol
 - Litosol
 - Mediteran
 - Regosol
 - Wilayah Perairan

| No. | SKALA |
|-----|---------|
| 3.1 | 0 4 8Km |

UTARA
SUMBER



3.2.5 Potensi Sumber Daya Alam

Topografi Wilayah Kedungsepur yang bervariasi menghasilkan bentang alam yang unik karena terdiri dari daerah dataran rendah (dataran pantai), hingga daerah yang merupakan dataran tinggi. Kondisi daerah hilir Wilayah Kedungsepur yang relatif datar sangat potensial untuk dijadikan daerah pengembangan fisik kawasan. Cadangan lahan untuk pembangunan fisik masih tersedia cukup luas, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Semarang sebagai kota dengan pertumbuhan yang sangat pesat.

Kondisi hidrologi Wilayah Kedungsepur sangat potensial untuk dijadikan sebagai sumber air baku dan sumber air irigasi karena banyaknya sungai yang ada dan mengalir secara lintas daerah dari hulu ke hilir. Sungai ini juga dapat berfungsi sebagai jaringan drainase primer untuk mengalirkan air hujan. Selain itu, Wilayah Kedungsepur juga memiliki potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi serta mempunyai banyak sumber mata air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku. Sumber-sumber air di Wilayah Kedungsepur berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, bendungan, laut dan pantai. Sumber-sumber mata air selain sungai terdiri atas danau, waduk dan mata air yang antara lain, yaitu:

a. Rawa Pening

Danau ini terletak di tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Dalam penggunaannya, danau ini dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi, perikanan darat, serta pariwisata dan rekreasi.

- b. Mata air dengan tingkat produktivitas kecil, yaitu 15% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Kedungjati, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Brati, Klambu, dan Tanggunharjo. Air tanah langka meliputi daerah Kecamatan Purwodadi, Klambu, Godong, Gubug, dan Tegowanu.
- c. Waduk Kedung Ombo

Sumber air yang berasal dari waduk Kedung Ombo difungsikan sebagai potensi sumber daya alam dalam memenuhi kepentingan kehidupan penduduk beserta aktivitasnya juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Untuk sumber air tanah terdapat potensi cekungan air tanah yang cukup tinggi seperti dijelaskan pada Tabel III.3.

TABEL III.3
POTENSI CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH KEDUNGSEPUR

| o | Nama Cekungan | Air Tanah Dangkal (juta m ³ /th) | Air Tanah Dalam (juta m ³ /th) |
|---|-----------------|---|---|
| . | Semarang-Kendal | 330,6 | 6,7 |
| . | Subah | 873 | 5,4 |
| . | Ungaran | 352,1 | 46,5 |
| . | Ambarawa | 325,3 | 9,5 |
| . | Purwodadi | 111,8 | 5,1 |
| . | Demak | 166,2 | 4,1 |
| . | Kudus | 693,3 | 11,3 |
| | Jumlah | 2852,3 | 88,6 |

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah

Potensi sektor pertanian di wilayah Kedungsepur didukung oleh lahan pertanian sawah beririgasi teknis merupakan lahan yang berpotensi memberikan

produktivitas tinggi dalam budidaya pertanian sawah, terutama padi karena lahan beririgasi teknis ini biasanya mampu menghasilkan padi sedikitnya dua kali panen setiap tahunnya. Untuk itu dalam pengembangan wilayah di masa datang, keberadaan lahan pertanian ini perlu untuk dipertahankan, dan peningkatan lahan pertanian beririgasi sederhana maupun setengah teknis tertentu menjadi lahan beririgasi teknis.

Di sisi lain, mempertahankan keberadaan lahan ini diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan kawasan terbangun dan non terbangun. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, perlu tetap mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis untuk tidak dikonversi menjadi penggunaan lahan jenis lain.

Sawah beririgasi teknis pada Wilayah Kedungsepur seluas 59,702 Ha dan tersebar hampir di setiap kecamatan Lahan sawah yang masih luas yaitu di Kabupaten Grobogan sebesar 36,30% dari luas lahan sawah Wilayah Kedungsepur dan Demak sebesar 27,71% serta Kendal 20,63%. Masih luasnya lahan sawah di ketiga daerah tersebut karena sebagai produsen padi untuk Jawa Tengah

Wilayah Kedungsepur memiliki potensi komoditas pertanian yaitu padi dan palawija. Kawasan yang menjadi sentra produksi padi sawah yaitu di Kabupaten Demak dengan luas sawah 31.100 hektar. Penetapan Kabupaten Demak sebagai sentra produksi padi didasarkan pada terjadinya surplus padi sebesar 200.000-210.000 ton / tahun.

Kedungsepur juga kaya akan sumber daya mineral yang terdiri dari bahan galian bangunan, industri, dan keramik. andesit, sirtu dan tanah urug yang

termasuk ke dalam jenis bahan galian bangunan banyak dijumpai di Wilayah Kedungsepur. Bahan galian yang paling besar yaitu batu gamping yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Bahan galian ini layak tambang, dengan persyaratan penggalian harus dilakukan secara teras dengan ketinggian yang teratur dan menghindari lubang-lubang galian.

Bahan galian yang juga layak tambang yaitu tanah liat yang terdapat di Kabupaten Grobogan dan Kendal. Bahan galian tanah liat layak ditambang pada daerah pedataran umumnya berupa persawahan dan tegalan. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam penambangan ini antara lain kedalaman tidak melebihi permukaan air tanah setempat, penggalian dilakukan secara lateral dengan kedalaman yang teratur dan menghindari lubang-lubang galian.

Bahan galian andesit yang layak tambang di Kabupaten Kendal, dengan memenuhi persyaratan penambangan harus dengan metode lateral dan dibuat teras-teras dengan ketinggian tertentu. Bahan galian andesit umumnya terletak pada daerah dataran tinggi, atau bukit-bukit dan gunung sehingga penambangannya harus memperhatikan fungsi kawasan dimana bahan galian tersebut berada.

Sirtu layak ditambang secara terbatas (tidak ditambang besar-besaran), karena jika ditambang secara besar-besaran akan mengakibatkan peningkatan erosi arus sungai baik secara vertikal maupun lateral yang akan terbawa dan membentuk sedimentasi di hilir sungai. Adapun sirtu yang tidak layak untuk ditambang karena jika sirtu sebagai peredam arus diambil akan berakibat pada terbawanya material hasil erosi sehingga dapat mempercepat pendangkalan rawa.

Trass layak ditambah dengan memperhatikan penempatan tanah penutup, sudut kelerengan, dan diutamakan menggunakan peralatan sederhana. Sedangkan penambangan yang tidak layak dilakukan karena terdapat jaringan fasilitas perkotaan dan rentan terhadap erosi. Demikian pula pada daerah yang memiliki lahan lebih produktif untuk tanaman perkebunan disamping tanah penutup cukup tebal.

3.3. *Kondisi Kependudukan*

3.3.1. *Jumlah Penduduk*

Data jumlah penduduk di Kawasan Kedungsepur ditinjau per kecamatan pada tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel III.4. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah total penduduk kawasan mencapai 5.801.995 jiwa dan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Kawasan Kedungsepur, jumlah penduduk tinggi cenderung terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah *Central Bisnis District* (CBD). Seperti misalnya wilayah Kota Semarang (Kecamatan Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Semarang Barat, dan Kecamatan Semarang Utara), wilayah Kabupaten Semarang (Kecamatan Ungaran), wilayah Kabupaten Demak (Kecamatan Mranggen), serta wilayah Kabupaten Grobogan (Kecamatan Purwodadi, Taroh dan Pulokulon) yang mencapai jumlah lebih dari 100.000 jiwa. Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal masing-masing hanya memiliki satu kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi (namun di bawah 100.000 jiwa) yaitu Kecamatan Sidorejo (51.623 jiwa) dan Kecamatan Kaliwungu (91.515 jiwa).

Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut merupakan potensi yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam proses pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

TABEL III.4
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI
WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2005

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (Jiwa/ Km ²) | Laju Pertumbuhan (%) |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kota Semarang | | | | |
| Mijen | 57,55 | 43.752 | 760 | 3,15 |
| Gunungpati | 54,11 | 62.111 | 1.148 | 1,75 |
| Banyumanik | 25,69 | 111.738 | 4.349 | 1,83 |
| Gajahmungkur | 9,07 | 60.424 | 6.662 | 1,19 |
| Semarang Selatan | 5,93 | 85.704 | 14.453 | 1,93 |
| Candisari | 6,54 | 80.551 | 12.317 | 0,82 |
| Tembalang | 44,20 | 115.812 | 2.620 | 3,14 |
| Pedurungan | 20,72 | 154.430 | 7.453 | 2,88 |
| Genuk | 27,39 | 72.204 | 2.636 | 3,27 |
| Gayamsari | 6,18 | 66.710 | 10.794 | 1,33 |
| Semarang Timur | 7,70 | 83.661 | 10.865 | -0,28 |
| Semarang Utara | 10,97 | 124.741 | 11.371 | -0,41 |
| Semarang Tengah | 6,14 | 77.248 | 12.581 | -0,14 |
| Semarang Barat | 21,74 | 155.354 | 7.146 | 1,39 |
| Tugu | 31,78 | 25.549 | 804 | 1,34 |
| Ngaliyan | 37,99 | 99.489 | 2.619 | 2,86 |
| Jumlah | 373,70 | 1.419.478 | 3.798 | 1,61 |
| Kabupaten Kendal | | | | |
| Plantungan | 48,82 | 31.827 | 652 | 1,23 |
| Sukorejo | 76,01 | 55.679 | 733 | 0,44 |
| Pageruyung | 51,43 | 34.107 | 663 | 1,48 |
| Patean | 92,94 | 48.593 | 523 | 1,14 |
| Singorojo | 124,55 | 46.920 | 377 | 0,21 |
| Limbangan | 71,72 | 29.605 | 413 | 0,53 |
| Boja | 64,09 | 63.347 | 988 | 0,46 |
| Kaliwungu | 107,69 | 91.515 | 850 | 0,78 |
| Brangsong | 34,54 | 45.224 | 1.309 | 0,57 |
| Pegandon | 31,12 | 35.712 | 1.148 | 0,60 |
| Ngampel | 33,88 | 33.626 | 993 | 0,40 |
| Gemuh | 38,17 | 47.931 | 1.256 | 0,09 |
| Ringinarum | 23,5 | 35.060 | 1.492 | 0,23 |

Lanjutan

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (Jiwa/ Km ²) | Laju Pertumbuhan (%) |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Weleri | 30,28 | 56.754 | 1.874 | 0,12 |
| Rowosari | 32,64 | 49.043 | 1.503 | 0,57 |
| Kangkung | 38,98 | 47.133 | 1.209 | 0,49 |
| Cepiring | 30,08 | 49.049 | 1.631 | 0,27 |
| Patebon | 44,3 | 53.603 | 1.210 | 1,39 |
| Kota Kendal | 27,49 | 50.723 | 1.845 | 0,60 |
| Jumlah | 1002,23 | 905.451 | 903 | 0,60 |
| Kabupaten Demak | | | | |
| Mranggen | 72,22 | 127.131 | 1.760 | 0,41 |
| Karangawen | 66,95 | 78.998 | 1.180 | 0,87 |
| Guntur | 57,53 | 71.301 | 1.239 | 1,26 |
| Sayung | 78,69 | 91.739 | 1.166 | 0,48 |
| Karantengah | 51,55 | 57.531 | 1.116 | 1,18 |
| Bonang | 83,24 | 97.696 | 1.174 | 1,83 |
| Demak | 61,13 | 97.238 | 1.591 | 0,66 |
| Wonosalam | 57,88 | 69.255 | 1.197 | 1,12 |
| Dempet | 61,61 | 52.759 | 856 | 1,14 |
| Gajah | 47,83 | 46.841 | 979 | 1,63 |
| Karanganyar | 67,76 | 70.582 | 1.042 | 1,42 |
| Mijen | 50,29 | 57.507 | 1.144 | 2,64 |
| Wedung | 98,76 | 79.353 | 803 | 0,68 |
| Kebonagung | 41,99 | 38.590 | 919 | 2,35 |
| Jumlah | 897,43 | 1.036.521 | 1.155 | 1,12 |
| Kabupaten Semarang | | | | |
| Getasan | 65,80 | 47.400 | 720 | 1,25 |
| Tengaran | 47,30 | 60.782 | 1.285 | 1,50 |
| Susukan | 48,86 | 44.401 | 909 | 0,67 |
| Kaliwungu | 29,96 | 28.669 | 957 | 1,07 |
| Suruh | 64,02 | 63.880 | 998 | 1,11 |
| Pabelan | 47,97 | 37.170 | 775 | 1,51 |
| Tuntang | 56,24 | 58.241 | 1.036 | 1,42 |
| Banyubiru | 54,41 | 39.573 | 727 | 1,26 |
| Jambu | 60,88 | 42.510 | 698 | 1,23 |
| Sumowono | 55,63 | 31.138 | 560 | 1,59 |
| Ambarawa | 56,12 | 87.001 | 1.550 | 1,02 |
| Bawen | 57,65 | 61.970 | 1.075 | 2,03 |
| Bringin | 68,57 | 43.724 | 638 | 3,63 |
| Bancak | 37,18 | 22.497 | 605 | 1,84 |
| Pringapus | 78,35 | 45.630 | 582 | 1,82 |
| Bergas | 47,33 | 56.590 | 1.196 | 2,44 |
| Ungaran | 73,95 | 124.872 | 1.689 | 1,67 |
| Jumlah | 950,22 | 896.048 | 943 | 1,50 |
| Kota Salatiga | | | | |
| Argomulyo | 18,83 | 41.720 | 2.252 | 0,01 |
| Tingkir | 10,55 | 43.262 | 4.101 | 0,31 |
| Sidomukti | 11,46 | 39.485 | 3.446 | -0,23 |

Lanjutan

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (Jiwa/ Km ²) | Laju Pertumbuhan (%) |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Sidorejo | 16,25 | 51.623 | 3.177 | -0,22 |
| Jumlah | 57,09 | 176.090 | 3.084 | -0.01 |
| Kabupaten Grobogan | | | | |
| Kedungjati | 130,34 | 43.176 | 331 | 0,65 |
| Karangrayung | 140,59 | 96.406 | 686 | 0,73 |
| Penawangan | 74,18 | 62.881 | 848 | 0,64 |
| Toroh | 119,31 | 113.548 | 952 | 0,53 |
| Geyer | 196,19 | 69.874 | 356 | 0,59 |
| Pulokulon | 133,65 | 106.488 | 797 | 0,78 |
| Kradenan | 107,74 | 81.697 | 758 | 0,78 |
| Gabus | 165,37 | 73.946 | 447 | 0,40 |
| Ngaringan | 116,72 | 65.048 | 557 | 0,89 |
| Wirosari | 154,30 | 88.238 | 572 | 0,72 |
| Tawangharjo | 83,60 | 51.556 | 617 | 0,31 |
| Grobogan | 104,56 | 67.607 | 647 | 0,83 |
| Purwodadi | 77,65 | 121.740 | 1.568 | 0,57 |
| Brati | 54,90 | 44.456 | 810 | 0,75 |
| Klambu | 46,56 | 33.826 | 726 | 0,68 |
| Godong | 86,78 | 84.398 | 972 | 0,75 |
| Gubug | 71,11 | 75.024 | 1.055 | 0,64 |
| Tegowanu | 51,67 | 48.577 | 940 | 0,54 |
| Tanggunharjo | 60,63 | 39.821 | 657 | 0,55 |
| Jumlah | 1975,86 | 1.368.307 | 693 | 0,65 |
| Kedungsepur | 5256,53 | 5.801.995 | 1.104 | 0.91 |

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka 2006, data diolah

3.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kondisi distribusi dan kepadatan penduduk di Kawasan Kedungsepur ditinjau per kecamatan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: luas wilayah 5.256,53 km², kepadatan penduduk rata-rata 1.104 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 sebesar 0,91%. Adapun kondisi distribusi dan kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur dapat dilihat pada Tabel III.4.

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah pada tahun 2005 sebesar 373,70 km² dan jumlah penduduk sebesar 1.419.478 jiwa.

Kepadatan penduduk terbesar di Kota Semarang terdapat pada Kecamatan Semarang Selatan yaitu 14.453 jiwa/km². Kepadatan penduduk tinggi cenderung terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah *Central Bisnis District* (CBD), yaitu Kecamatan Semarang Timur, Semarang Tengah, Gayamsari, Candisari, Semarang Selatan dan Semarang Utara dengan kepadatan mencapai lebih dari 10.000 jiwa/km². Untuk kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah pinggiran Kota Semarang cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah, antara 700 sampai 7.000 jiwa/km².

Kabupaten Semarang memiliki 17 kecamatan dengan luas total wilayah sebesar 950,22 km². Jumlah penduduk total di Kabupaten Semarang pada tahun 2005 adalah sebesar 896.048 jiwa dengan kepadatan sebesar 943 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Ungaran, karena lokasi kecamatan yang dekat dengan Kota Semarang yang merupakan kota dengan hirarki tertinggi dalam lingkup Jawa Tengah dan merupakan kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang besar terdapat pada wilayah yang dilewati oleh jalur regional Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Sedangkan wilayah yang terletak pada daerah belakang dan jauh dari pusat aktivitas, relatif rendah angka kepadatan penduduknya.

Kota Salatiga, yang hanya terdiri dari empat kecamatan, memiliki luas sebesar 57,09 km² dengan total jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 176.090 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar di Kota Salatiga pada tahun 2005, terdapat pada Kecamatan Tingkir yaitu sebesar 4.101 jiwa/km². Rata-rata kepadatan penduduk di Kota Salatiga adalah 3.084 jiwa/km², dengan kepadatan

yang cukup merata, yaitu mencapai lebih dari 1.600 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang cukup besar ini merupakan ciri khas kawasan perkotaan yang berkembang dengan cepat dan mempunyai aktivitas perekonomian yang berkembang dengan baik.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal adalah 905.451 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 903 jiwa/km². Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi adalah wilayah yang berada pada jalur Pantura yaitu Kecamatan Weleri, Kota Kendal, Cepiring, Rowosari, dan Kecamatan Ringinarum. Hal ini disebabkan karena Pantura merupakan daya tarik yang sangat besar dalam perkembangan wilayah. Wilayah-wilayah yang berada pada daerah belakang dan jauh dari jalan regional, relatif kecil kepadatan penduduknya. Sedangkan wilayah yang berada di perbatasan dengan Kota Semarang sebagai kota dengan hirarki pertama relatif tidak begitu padat penduduknya, yaitu Kecamatan Boja dan Kaliwungu. Hal ini dikarenakan daya tarik Kota Semarang yang sangat besar sehingga cenderung menarik penduduk yang berada pada daerah perbatasan untuk datang dan tinggal di Kota Semarang.

Wilayah Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan dengan luas 897.43 km². Jumlah penduduknya 1.036.521 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 1155 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Demak relatif lebih merata, dengan *range* antara 900 jiwa/km² sampai 1.800 jiwa/km². Wilayah yang kepadatannya terlihat lebih tinggi dari rata-rata adalah Kecamatan Mranggen dengan kepadatan lebih dari 1700 jiwa/km². Wilayah yang berada pada jalur regional Semarang-Surabaya dan Semarang-Purwodadi cenderung memiliki kepadatan penduduk

yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Sedangkan wilayah yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan serta wilayah yang berada pada daerah pantai cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah.

Kabupaten Grobogan memiliki 19 kecamatan dengan jumlah total penduduk pada tahun 2005 adalah 1.368.307 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 693 jiwa/km². Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah wilayah yang menjadi simpul aktivitas perekonomian dan pemerintahan yaitu Kecamatan Gubug dan Kecamatan Purwodadi dengan kepadatan rata-rata di atas 1000 jiwa/km². Wilayah lain yang kepadatannya cukup besar adalah kecamatan yang dilewati oleh jalur utama. Sedangkan wilayah yang berada pada wilayah perbatasan dengan kabupaten lain dan berada pada daerah belakang cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah.

3.3.3 Struktur Penduduk

Penduduk usia produktif di Kawasan Kedungsepur rata-rata adalah 69,71%. Jumlah penduduk usia produktif terbesar berada di Kota Semarang yang mencapai 70,66%, sedangkan pada daerah lain hanya sejumlah kurang dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang merupakan magnet yang sangat kuat dalam pertumbuhan ekonominya, sehingga mampu menarik penduduk usia produktif untuk tinggal dan beraktivitas di dalamnya.

Bila dilihat dari penduduk yang berumur 0-14 tahun, Kota Salatiga adalah daerah dengan persentase penduduk terkecil yaitu 23,53%, lebih kecil bila

dibandingkan dengan daerah lain yang jumlahnya lebih dari 24%. Di masa mendatang hal ini berarti Kota Salatiga kurang memiliki calon tenaga kerja potensial. Dengan demikian, kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang adalah Kota Salatiga akan menyedot tenaga kerja yang cukup besar dari wilayah-wilayah belakangnya dan wilayah belakang tersebut akan mengalami perpindahan penduduk usia produktif ke Kota Salatiga. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel III.5.

TABEL III.5

PERSENTASE PENDUDUK WILAYAH KEDUNGSEPUR BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

TAHUN 2005

| No | Kabupaten/Kota | 0-14 | 15-64 | 65+ |
|----|--------------------|-------|-------|------|
| 1 | Kabupaten Demak | 30,90 | 64,18 | 4,92 |
| 2 | Kabupaten Grobogan | 29,83 | 63,70 | 6,47 |
| 3 | Kabupaten Kendal | 30 | 64,79 | 5,23 |
| 4 | Kabupaten Semarang | 26,50 | 65,13 | 8,35 |
| 5 | Kota Salatiga | 23,53 | 69,42 | 7,04 |
| 6 | Kota Semarang | 24,98 | 70,66 | 4,36 |

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2006, data diolah

3.3.4 Penduduk berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Struktur kependudukan Wilayah Kedungsepur berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2005 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.6.

Dari tabel dapat dilihat distribusi dan deskripsi penduduk berumur 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha utama di Wilayah Kedungsepur pada tahun 2005.

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sangat mendominasi di wilayah Kedungsepur. Dari enam wilayah di Kedungsepur empat wilayah yaitu Kabupaten

Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan mempunyai jumlah penduduk yang besar yang bekerja pada sektor tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian

TABEL III.6
PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA
MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2005

| Lapangan Usaha Utama | Kota Semarang | | Kab. Kendal | | Kab. Demak | | Kab. Semarang | | Kota Salatiga | | Kab. Grobogan | |
|----------------------|---------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Pertanian | 14,360 | 2.27 | 215,550 | 48.38 | 188,054 | 40.20 | 190,762 | 38.08 | 5,229 | 7.34 | 425,784 | 60.82 |
| Pertamb & Galian | 2,512 | 0.40 | 2,665 | 0.60 | - | 0.00 | 996 | 0.20 | 216 | 0.30 | 521 | 0.07 |
| Industri | 144,312 | 22.78 | 45,160 | 10.14 | 64,917 | 13.88 | 113,298 | 22.62 | 15,768 | 22.14 | 29,630 | 4.23 |
| Listrik, Gas dan Air | 4,400 | 0.69 | - | 0.00 | 370 | 0.08 | - | 0.00 | 711 | 1.00 | - | 0.00 |
| Konstruksi | 62,976 | 9.94 | 21,890 | 4.91 | 35,112 | 7.51 | 32,246 | 6.44 | 5,202 | 7.30 | 71,495 | 10.21 |
| Perdagangan | 201,072 | 31.74 | 92,850 | 20.84 | 89,569 | 19.15 | 81,104 | 16.19 | 20,952 | 29.41 | 104,764 | 14.96 |
| Komunikasi | 46,696 | 7.37 | 20,380 | 4.57 | 23,931 | 5.12 | 22,496 | 4.49 | 3,987 | 5.60 | 21,336 | 3.05 |
| Keuangan | 19,360 | 3.06 | 5,330 | 1.20 | 3,122 | 0.67 | 6,830 | 1.36 | 2,736 | 3.84 | 4,000 | 0.57 |
| Jasa | 137,304 | 21.68 | 40,395 | 9.07 | 62,354 | 13.33 | 52,490 | 10.48 | 16,362 | 22.97 | 41,546 | 5.93 |
| Lainnya | 440 | 0.07 | 1,295 | 0.29 | 397 | 0.08 | 674 | 0.13 | 72 | 0.10 | 1,000 | 0.14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 633,432 | 100 | 445,515 | 100 | 467,826 | 100 | 500,896 | 100 | 71,235 | 100 | 700,076 | 100 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2006, data diolah

utama di wilayah Kedungsepur. Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang jumlah penduduknya tertinggi yang bekerja di sektor pertanian yaitu 60,82 %. Sedangkan Kota Semarang merupakan wilayah yang sedikit sekali penduduknya yang bekerja di sektor pertanian yaitu hanya 2,27% .

Untuk sektor perdagangan Kota Semarang merupakan wilayah di Kedungsepur yang mempunyai penduduk tertinggi yang bekerja di sektor tersebut yaitu 31,74%. Begitu juga pada sektor komunikasi, keuangan dan Jasa masih didominasi oleh Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang yang bekerja di sektor komunikasi 7,37%, sedangkan yang bekerja di sektor keuangan adalah 3,06%, dan pada sektor jasa 21,68%.

3.3.5 Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang cukup banyak terdapat pada Wilayah Kedungsepur menjadi potensi yang dapat dioptimalkan dalam mendukung perkembangan kawasan, karena dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. Penduduk usia produktif di Wilayah Kedungsepur rata-rata adalah 69,71%. Jumlah penduduk usia produktif terbesar berada di Kota Semarang yang mencapai 83,84%, sedangkan pada daerah lain hanya sejumlah kurang dari 70%. Jumlah dan angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi berada pada kawasan di sekitar jalur utama regional. Kepadatan yang lebih tinggi pada daerah yang menjadi pusat aktivitas menandakan bahwa daerah tersebut menjadi penarik bagi penduduk untuk datang dan melakukan aktivitas. Pergerakan penduduk yang cukup tinggi antar wilayah terutama sepanjang jalur utama regional merupakan potensi dalam pengembangan wilayah karena dapat *men-generate* pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan penduduk ini secara otomatis akan membawa modal (uang) dan barang sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan ikut berkembang.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia dapat ditunjukkan oleh kualitas hidup yang merupakan penilaian kesejahteraan masyarakat dan tingkat kepuasannya. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan manusia. Sebagai indikator pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks gabungan (komposit) dari komponen: Indeks Harapan Hidup yang dihitung dari Angka Harapan Hidup waktu lahir; Indeks Komposit Pendidikan yang dihitung dari rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf (%); serta Indeks Daya Beli yang dihitung dari pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dan Indeks Harga Konsumen. Ketiga komponen IPM tersebut merepresentasikan kualitas kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, serta standar hidup masyarakat. Semakin tinggi angka IPM atau HDI suatu wilayah menunjukkan keadaan wilayah yang bersangkutan semakin baik.

Data dari Indonesia *Human Development Report 2004* menunjukkan bahwa IPM pada semua kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur mengalami peningkatan dari tahun 1999 ke tahun 2002. Demikian juga terjadi pada masing-masing indikator IPM yang menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik pada semua kabupaten/kota.

Pada tahun 2002, di antara kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur, IPM paling rendah dan berada di bawah IPM Jawa Tengah terletak di Kabupaten

Kendal (65,5) dan Kabupaten Grobogan (65,5). Sedangkan IPM paling tinggi terletak di Kota Semarang, yaitu sebesar 73,6. Namun berdasarkan ranking IPM seluruh kabupaten/kota di Indonesia, empat kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur (Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga) mengalami penurunan ranking, kecuali Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Indeks komposit pendidikan yang diukur dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah merupakan representasi dari kualitas pengetahuan dan keterampilan penduduk. Data dari *Indonesia Human Development Report 2004* memperlihatkan bahwa Angka Melek Huruf dari penduduk dewasa di atas 85% dari jumlah penduduk dewasa dan berada di atas Angka Melek Huruf Propinsi Jawa Tengah.

Rata-rata lama sekolah memperlihatkan bahwa penduduk usia 15 tahun keatas pada kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur sudah menjalani pendidikan formal selama lebih dari 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun keatas di kabupaten/kota Wilayah Kedungsepur telah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Dan hanya penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Semarang dan Salatiga yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Data standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita menunjukkan bahwa pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan pada kabupaten Kendal dan Grobogan di bawah Rp 600.000,- per bulan. Pengeluaran riil perkapita tertinggi berada di Kota Salatiga, yaitu sebesar Rp 617.900,- per bulan. Paparan

mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Kedungsepur terangkum dalam tabel III.7

TABEL III.7

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH KEDUNGSEPUR

| Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Usia Harapan Hidup (Tahun) | | Angka Melek Huruf (%) | | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | Pengeluaran Per Kapita (000 RP) | | IPM | |
|---------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------|------|
| | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | 1999 | 2002 |
| JAWA TENGAH | 68,3 | 68,9 | 84,8 | 85,7 | 6,0 | 6,5 | 583,8 | 594,2 | 64,5 | 66,3 |
| Kota Semarang | 70,2 | 70,4 | 93,6 | 95,5 | 8,7 | 10,0 | 591,5 | 615,8 | 70,2 | 73,6 |
| Kab. Kendal | 64,7 | 65,0 | 84,3 | 88,6 | 5,4 | 6,5 | 584,9 | 604,6 | 62,1 | 65,5 |
| Kab. Demak | 68,7 | 68,9 | 89,2 | 85,8 | 6,1 | 6,4 | 583,6 | 595,8 | 65,9 | 66,4 |
| Kab. Semarang | 70,6 | 71,3 | 89,4 | 88,5 | 6,6 | 6,8 | 591,0 | 607,8 | 67,9 | 69,5 |
| Kab. Grobogan | 67,8 | 68,1 | 85,6 | 86,5 | 5,6 | 6,3 | 585,0 | 589,3 | 64,2 | 65,5 |
| Kota Salatiga | 69,5 | 70,2 | 95,7 | 93,3 | 9,2 | 9,5 | 602,7 | 617,9 | 71,5 | 72,8 |

Sumber : Indonesia Human Development Report 2004, BPS BAPPENAS

3.4. Kondisi Perekonomian

3.4.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor.

Titik berat pembahasan struktur dan pertumbuhan ekonomi adalah masalah pertumbuhan yaitu tentang laju pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Wilayah Kedungsepur.

Berdasarkan pada Tabel III.8, secara riil (atas dasar harga konstan 2000), struktur ekonomi pada kabupaten/kota kawasan Kedungsepur bervariasi. Struktur ekonomi Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan berstruktur Pertanian. Sementara itu struktur ekonomi Kota Salatiga didominasi oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Struktur ekonomi Kota Semarang didominasi oleh sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 40,34 % dari total PDRB, namun tidak boleh diabaikan begitu saja kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang menyumbang pembentukan PDRB sebesar 17,73 %. Apabila dilihat dari tenaga kerja yang terserap, Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sekitar

TABEL III.8
RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB
WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2005 (%)

| Sektor | Kota Smg | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Smg | Kab. Grobogan | Kota Salatiga |
|---|----------|-------------|------------|----------|---------------|---------------|
| Pertanian | 1,28 | 24,08 | 42,93 | 13,34 | 41,65 | 6,54 |
| Pertambangan dan Penggalian | 0,32 | 0,90 | 0,21 | 0,12 | 1,40 | 0,48 |
| Industri Pengolahan | 40,34 | 40,11 | 11,32 | 47,03 | 3,44 | 19,79 |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih | 1,33 | 1,06 | 0,66 | 0,81 | 1,41 | 4,51 |
| Konstruksi | 13,63 | 2,74 | 6,59 | 3,79 | 4,39 | 4,30 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 17,73 | 18,39 | 20,27 | 21,78 | 17,84 | 16,83 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 9,48 | 2,36 | 4,40 | 2,08 | 3,21 | 24,01 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 4,05 | 2,50 | 3,70 | 3,15 | 9,20 | 6,83 |
| Jasa-jasa | 11,83 | 7,86 | 9,92 | 7,91 | 17,46 | 16,70 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kabupaten/ Kota Dalam Angka 2006, data diolah

30% dari total pekerja dan cenderung meningkat selama kurun waktu 2002-2005, sedangkan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran menyerap sekitar 22 %. Mengingat sektor Industri pengolahan mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, maka industri yang ada sekarang (terutama industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi) perlu dikembangkan secara optimal dengan melalui pemberian insentif perpajakan atau kemudahan prosedur bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

Perekonomian di Kota Salatiga didukung oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi (24,01 %) sektor industri dan pengolahan (19,79 %) dan sektor Jasa (16,7 %). Kabupaten Demak dan kabupaten Grobogan menggantungkan diri pada sektor pertanian yang masing-masing memiliki kontribusi lebih dari 40%. Ini menunjukkan bahwa di kedua kabupaten tersebut merupakan wilayah agraris, dimana perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Pada umumnya daerah agraris dalam pembentukan PDRB banyak bergantung pada alam, dan rata-rata pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan daerah industri. Hal ini dibuktikan dengan PDRB total di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan yang lebih rendah dibandingkan dengan PDRB total kabupaten/kota lainnya di Kawasan Kedungsepur (kecuali Kota Salatiga).

Struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor Industri Pengolahan selain di Kota Semarang adalah di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Kendal kontribusi Industri Pengolahan sebesar 40,11 %, sedangkan di Kabupaten Semarang, sektor industri dan pengolahan memberikan kontribusi

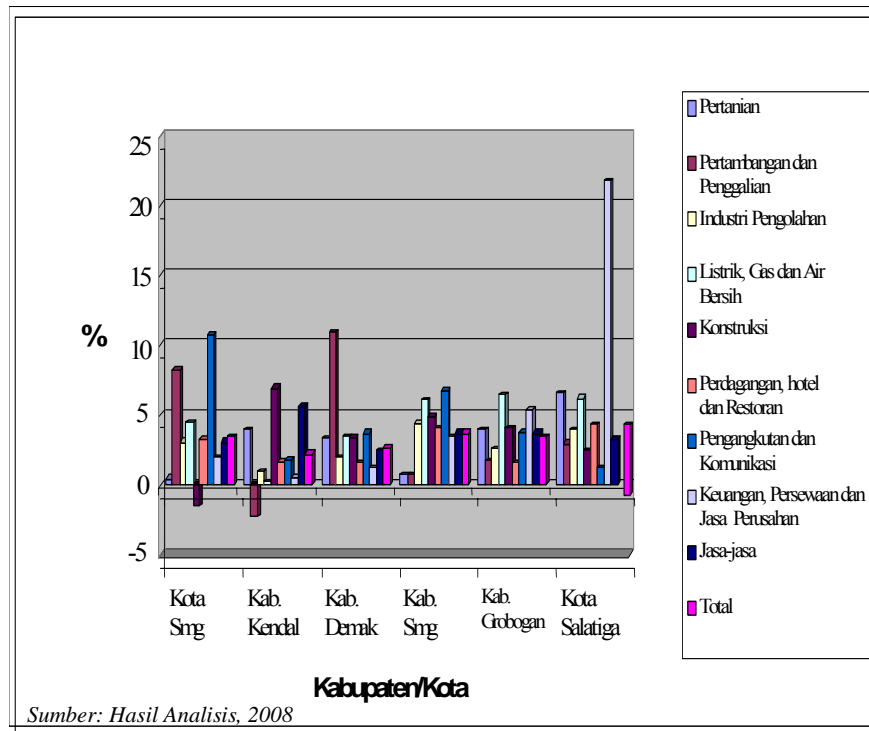
sebesar 47,03 %. Sektor yang kegiatannya mengolah lebih lanjut hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang lebih bermanfaat ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian kabupaten Kendal dan kabupaten Semarang.

3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi (lapangan usaha) yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Dalam prakteknya, laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah ditunjukkan dengan kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi secara riil di kabupaten/kota Kawasan Kedungsepur pada tahun 2001-2005 menunjukkan angka yang bervariasi. Semua kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif di atas 2% pada tahun 2001-2005. Bahkan di kota Semarang dan Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 3%. Lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Namun bila dilihat dari perkembangannya, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Kendal dan Semarang yang mengalami kesulitan usaha, bahkan ada beberapa yang terpaksa menutup

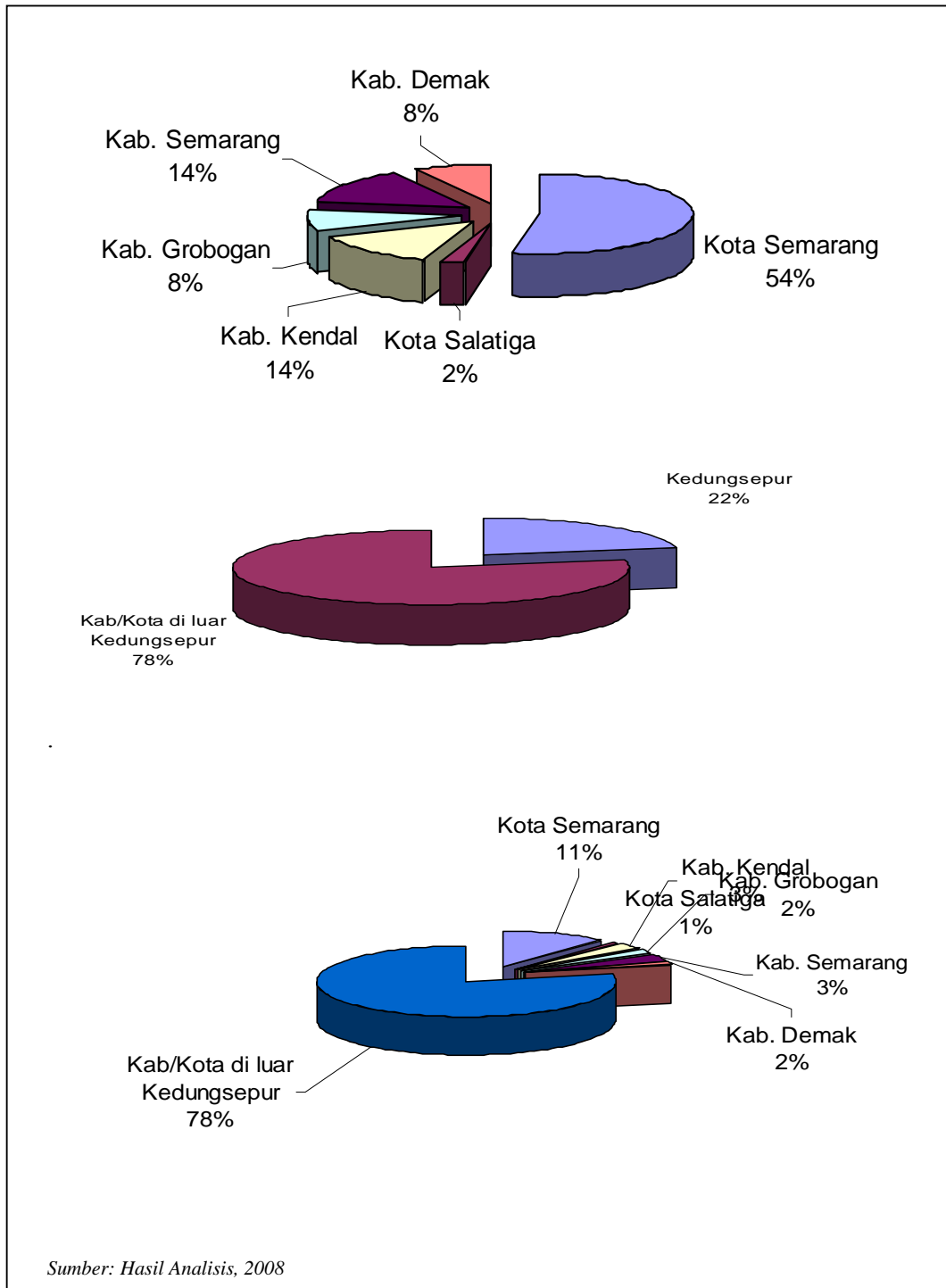


GAMBAR 3.2
GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2001-2005

usahanya. Pertumbuhan ekonomi ini perlu didukung dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai sehingga akan berjalan dengan optimal.

3.4.3 Potensi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi secara riil di kabupaten/kota Wilayah Kedungsepur pada tahun 2001-2005 menunjukkan angka yang bervariasi. Semua kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif di atas 2% pada tahun 2001-2005. Bahkan di kota Semarang dan Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 4%. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan PDRB perkapita, yang selalu



GAMBAR 3.3
PERBANDINGAN PDRB KABUPATEN/KOTA DENGAN WILAYAH
KEDUNGSEPUR DAN JAWA TENGAH TAHUN 2005

mengalami kenaikan, kecuali pada Kota Salatiga yang sempat mengalami penurunan. Peluang-peluang yang dimiliki yang berkaitan dengan kedudukan Wilayah Strategis Kedungsepur cukup besar, terutama peluang perekonomian yang bersifat sekunder dan tersier (industri, perdagangan, dan jasa).

Peranan sektor ekonomi Wilayah Kedungsepur dapat dilihat dari perbandingan kontribusi PDRB wilayah Kabupaten/Kota terhadap Kedungsepur maupun terhadap Jawa Tengah secara keseluruhan. Pada tahun 2005, kontribusi PDRB masing-masing Kabupaten/Kota terhadap wilayah Kedungsepur dapat dilihat bahwa Kota Semarang memiliki kontribusi yang terbesar yaitu 52,88% dari total PDRB Kedungsepur sebesar Rp. 31,94 trilyun. Kemudian berturut-turut adalah Kabupaten Semarang (14,49%), Kabupaten Kendal (13,83%), Kabupaten Grobogan (8,34%), Kabupaten Demak (7,98%) dan Kota Salatiga (2,48%).

Kontribusi PDRB wilayah Kedungsepur jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah maka wilayah Kedungsepur memiliki kontribusi sebesar 21,63% dari total PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 143, 1 trilyun. Kontribusi masing-masing Kabupaten/Kota terhadap Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Kota Semarang (11,44%), Kabupaten Semarang (3,13%), Kabupaten Kendal (2,99%), Kabupaten Grobogan (1,80%), Kabupaten Demak (1,73%) dan Kota Salatiga (0,54%). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.3

3.5 Pemanfaatan Ruang

3.5.1 Kondisi Pemanfaatan Ruang

Kondisi pemanfaatan ruang di Wilayah Kedungsepur dipengaruhi oleh

kondisi topografinya, yaitu meliputi daerah pesisir dengan pemanfaatan ruang sebagai kawasan budidaya perikanan atau tambak, kawasan pertanian dengan topografi yang relatif datar dan kawasan bukit atau pegunungan yang banyak dimanfaatkan untuk perkebunan dan kawasan lindung.

Tanah sawah relatif tidak banyak terdapat di Kota Semarang. Dari luas tanah yang ada, tanah sawah hanya mencakup 6,47% dari total luas wilayah. Tidak ada kecamatan yang luas tanahnya melebihi 30% dari luas total wilayah. Guna lahan yang berupa hutan juga tidak banyak terdapat; hanya ada di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan. Pada daerah pusat kota yang menjadi simpul aktivitas, guna lahan didominasi oleh guna lahan bangunan; bahkan mencapai di atas 80% yaitu di Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Tengah. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perkembangan fisik pada pusat kota ini sudah jenuh, sehingga cenderung melebar pada wilayah sub urban dengan mengikuti jaringan jalan yang ada. Wilayah kota Semarang memerlukan pengembangan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan akan kegiatan-kegiatan sebagai kota pusat pertumbuhan.

Wilayah rencana pengembangan yang cukup potensial adalah wilayah Kecamatan Mijen, Gunungpati, Tembalang, Genuk, dan Kecamatan Ngaliyan yang berada pada daerah pinggir kota. Kawasan industri juga berkembang pada daerah pinggiran Kota Semarang yaitu koridor Genuk-Sayung, Pedurungan-Mranggen, Pudukpayung-Ungaran yang melebar hingga ke daerah Bergas dan Pringapus (Kabupaten Semarang), serta Tugu-Kaliwungu. Kawasan industri ini

perlu dimantapkan karena dapat berfungsi sebagai generator pertumbuhan wilayah, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana penunjang serta ditopang dengan kebijakan yang mendukung seperti perijinan satu atap dan penetapan kawasan berikat dengan insentif bagi industri. Di sisi lain, kawasan industri yang ada harus dibatasi perkembangannya agar tidak masuk ke dalam CBD kota dan tidak mengkonversi lahan produktif yang ada, karena potensi pencemaran yang ditimbulkan.

Kondisi pemanfaatan ruang di Kabupaten Semarang tidak sepadat kondisi pemanfaatan fisik Kota Semarang. Tanah sawah masih banyak terdapat pada tiap wilayah kecamatan, rata-rata mencapai 30%. Pada wilayah yang luas sawahnya kurang dari 30%, penggunaan lahan dominan adalah sebagai tanah tegalan atau hutan. Guna lahan yang berupa hutan terdapat cukup luas, terutama di Kecamatan Bringin (845 ha) dan Kecamatan Pringapus (593 ha). *Open space* yang masih cukup luas menjadikan wilayah Kabupaten Semarang cukup potensial untuk dikembangkan, sekaligus menampung limbah pertumbuhan Kota Semarang. Hanya saja, pengembangan ini harus mempertimbangkan aspek konservatif, mengingat kedudukan Kabupaten Semarang sebagai daerah hulu yang berpengaruh langsung pada wilayah hilirnya, khususnya Kota Semarang.

Seperti halnya pemanfaatan lahan di Kota Semarang, pemanfaatan lahan di Kota Salatiga sangat dominan berupa pekarangan/bangunan, yang pada semua kecamatan mencapai di atas 50%, kecuali di Kecamatan Tingkir yang seluas 49,64% dari luas wilayah. Pemanfaatan lahan yang berupa hutan juga ada di Kota Salatiga, meskipun luasnya tidak begitu besar. Penggunaan lahan yang berupa

lahan terbangun berada pada daerah pusat kota dan di sepanjang jalur regional, karena posisi Kota Salatiga yang merupakan kota transit. Sedangkan wilayah *open space* berada pada daerah belakangnya, terutama pada daerah-daerah pinggiran. Kota Salatiga juga berfungsi sebagai wilayah konservasi dan daerah tangkapan air bagi daerah hilir, sehingga rencana pengembangan harus memperhatikan aspek ekologis dan daya dukung lahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi dalam dua bagian; bagian atas yang berupa dataran tinggi dengan dominasi berupa hutan dan tegalan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan penyangga, serta bagian bawah yang berupa dataran rendah yang cenderung berfungsi sebagai wilayah pusat aktivitas serta wilayah yang berbatasan dengan Laut Jawa yang berkembang sebagai areal pertambakan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Kendal didominasi oleh lahan terbuka yaitu tanah sawah seluas 33,84%, serta lahan kering non terbangun. Guna lahan yang berupa bangunan hanya ada seluas 17,23% dari luas wilayah yang ada. Wilayah yang banyak daerah terbangunnya adalah wilayah yang berada pada jalur Pantura yaitu Kota Kendal, Kecamatan Weleri, Kecamatan Patebon, dan Kecamatan Ringinarum; serta wilayah yang berbatasan dengan Kota Semarang yaitu Kecamatan Boja. Guna lahan yang berupa hutan sebagai daerah konservasi terdapat pada daerah sebelah selatan yang berupa pegunungan, yaitu Kecamatan Gemuh. Perkembangan fisik di Kabupaten Kendal cenderung berkumpul pada pusat aktivitas dan simpul kegiatan ekonomi, serta linier mengikuti jaringan jalan, terutama jalan regional pantura. Wilayah yang cenderung cepat perkembangannya

adalah wilayah bawah yang memiliki akses pembagi ke arah selatan yaitu Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Demak didominasi oleh tanah sawah seluas 56,23% dari luas wilayah. Guna lahan terbangun hanya seluas 15,02% dari luas keseluruhan. Wilayah Kabupaten Demak cenderung datar dan guna lahan yang berupa hutan relatif tidak banyak terdapat; hanya ada di Kecamatan Mranggen (100 ha) dan Kecamatan Karangawen (1.472 ha), sedangkan wilayah yang berbatasan dengan Laut Jawa berkembang sebagai areal pertambakan. Wilayah yang berkembang dengan cukup pesat adalah wilayah yang dilewati jalur pantura dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Semarang. Jalur pantura menjadi daya tarik yang sangat besar, sedangkan wilayah yang berbatasan dengan Kota Semarang telah mengalami konurbasi, yaitu pada Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen yang mendapat limpahan pertumbuhan industri dan aktivitas lainnya dari Kota Semarang. Perkembangan fisik di masa datang harus mempertimbangkan kondisi bahwa sebagian besar lahan Kabupaten Demak adalah sawah produktif, yang sebaiknya tidak dikonversi menjadi tanah kering.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Grobogan didominasi oleh tanah kering seluas 63,87%, sedangkan tanah sawah hanya terdapat sebesar 36,13%. Sebagian besar tanah kering berupa tegalan dan hutan, sedangkan yang berupa pekarangan/bangunan hanya sebesar 15,35%. Wilayah terbangun yang ada berkembang mengikuti jaringan jalan Semarang-Purwodadi, dan tumbuh secara sporadis. Wilayah yang berupa dataran rendah dan berfungsi sebagai kawasan budidaya terdapat pada bagian tengah wilayah Kabupaten Grobogan, sedangkan

wilayah pinggiran adalah kawasan penyangga dan kawasan lindung, terutama di wilayah Kecamatan Tanggunharjo. Dengan banyaknya kawasan penyangga, maka pengembangan yang ada harus memperhatikan aspek ekologis agar sesuai dengan daya dukung lahan yang ada.

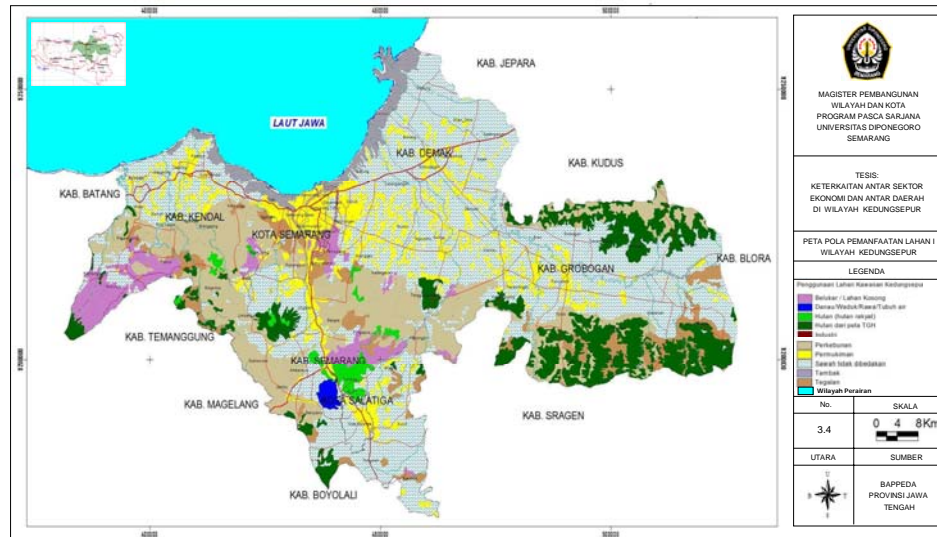
TABEL III.9
PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH KEDUNGSEPUR (Ha)
TAHUN 2005

| Kab/Kota | Tanah Sawah | Tanah Kering | | | | | | | Jumlah |
|----------|-------------|--------------|----------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| | | Bangunan | Tegalan | Padang | Rawa | Tambak | Hutan | Lainnya | |
| Semarang | 3.897,96 | 13.668,9 | 6.861,01 | 651,62 | 145 | 1.877,92 | 1.515,7 | 8.751,89 | 37.370 |
| Kab. Smg | 30.939,7 | 12.029, | 1.817,5 | 0 | 2.623 | 19 | 5.056 | 12.032 | 66.903,43 |
| Salatiga | 805,33 | 3.024,03 | 1.653,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,72 | 5.678,1 |
| Kendal | 20.004 | 10.632 | 8.786 | 27 | 0 | 3.131 | 9.100 | 7.327 | 59.007 |
| Demak | 31.100 | 1.1261 | 13.119 | 0 | 23 | 3.890 | 1.572 | 2.314 | 63.279 |
| Grobogan | 22.425 | 9.119 | 6.292 | 2 | 15 | 14 | 14.268,7 | 3.101,3 | 55.237 |

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka 2006, data diolah

3.5.2 Potensi Pemanfaatan Ruang

Potensi pemanfaatan ruang di wilayah Kedungsepur ditunjukkan dengan peruntukan daya dukung lahan sebagai kawasan budidaya cukup luas. Hal ini merupakan potensi bagi ketersediaan cadangan lahan untuk mengantisipasi perkembangan secara fisik. Kebanyakan lahan yang berada di bagian hilir kawasan merupakan lahan dengan daya dukung lahan sebagai kawasan budidaya. Yang perlu diingat adalah perubahan guna lahan menjadi daerah terbangun harus memperhitungkan guna lahan sebelumnya dan tidak boleh mengkonversi lahan yang merupakan lahan pertanian subur serta lahan yang berfungsi sebagai penahan intrusi air laut.



Perkembangan wilayah perkotaan yang cenderung berbentuk linier mengikuti jaringan jalan akan mempermudah akses pelayanan prasarana. Di sisi lain, kawasan yang bukan merupakan kawasan perkotaan dapat berkembang dengan berorientasi pada sektor agraris atau mengandalkan pariwisata.

Kecenderungan perkembangan yang tidak lagi berorientasi pada daerah pusat kota (CBD) akan dapat mengurangi beban daerah CBD. Dengan demikian, perkembangan kota akan berjalan dengan lebih luas, pelayanan prasarana di pusat kota akan optimal, dan CBD akan menjadi kota yang lebih manusiawi. Di sisi lain, daerah suburban yang menjadi daerah yang terpengaruh perkembangan CBD akan lebih berkembang. Pemerataan perkembangan ini yang didukung dengan pengalokasian pusat-pusat perkembangan wilayah akan meningkatkan kondisi perekonomian wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Perkembangan wilayah perkotaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari potensi transportasi yang dimiliki, seperti jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan wilayah atau kota-kota besar lainnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan wilayah provinsi lain, yaitu jalur Semarang-Bawen, Bawen-Surakarta, dan Bawen-Magelang-Yogyakarta. Jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Tengah bagian Utara (Semarang, Kudus, Pekalongan, Tegal, dan sekitarnya) dan bagian Selatan sampai Barat (Surakarta, Magelang, Purwokerto dan sekitarnya).

Pergerakan regional maupun lokal pada dasarnya menggunakan Jalur Pantura maupun jalur tengah. Jalur ini menjadi urat nadi pergerakan terutama

sebagai lintasan pergerakan internal dan eksternal. Pergerakan ini dapat diidentifikasi dengan adanya rute angkutan dan dukungan prasarana terminal di masing-masing wilayah. Jaringan jalan lainnya yang menuju atau dapat menjangkau wilayah Kedungsepur adalah jalur Grobogan-Sragen atau Solo di bagian Selatan.

Sistem angkutan penumpang dan barang di wilayah Kedungsepur sebagian besar sudah terlayani dan menjangkau sampai kedesa-desa berupa angkutan kota dan desa. Di Wilayah Kedungsepur terdapat simpul-simpul pergerakan berupa terminal dan sub terminal dimasing-masing kabupaten yang dijadikan sebagai titik awal dalam pergerakan barang dan jasa serta pergantian moda transportasi. Di Kabupaten Demak sistem transportasi sudah melayani sampai ke desa-desa dan ke sentra-sentra produksi pertanian, seperti rute Demak-Godong-Purwodadi. Di Kabupaten Demak terdapat dua terminal bus dan non bus yang dijadikan simpul pergerakan barang dan jasa untuk sistem transportasi yang ada.

Di Kota Semarang terdapat pelabuhan laut skala nasional sehingga mempermudah pula hubungan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Selain pelabuhan di Kota Semarang, di Kabupaten Kendal nantinya juga akan dikembangkan Pelabuhan Samudra yang merupakan pelabuhan dengan skala internasional. Di bidang transportasi udara, telah tersedia Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang sebagai bandar udara nasional yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia. Kedua fasilitas ini merupakan akses penghubung Wilayah Kedungsepur menuju arus pergerakan internasional. Karenanya Wilayah Kedungsepur memiliki potensi pengembangan yang besar.

Selain itu adanya rencana jalan tol Semarang-Solo dan Semarang-Demak akan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi pada beberapa simpul di jalan utama. Rencana ini juga akan dapat membagi dan mengarahkan perkembangan wilayah agar tidak terlalu linier dan daerah belakang juga dapat ikut berkembang.

3.6 Kondisi Sistem Transportasi

3.6.1 Transportasi Darat

Transportasi jalan merupakan jaringan transportasi penting dalam sistem transportasi darat. Sifatnya yang fleksibel dan layanan yang *door to door* merupakan keunggulan yang dimiliki oleh transportasi jalan. Selain itu transportasi jalan memiliki daya jangkauan yang tinggi. Moda ini juga sangat baik digunakan untuk jarak dekat dan sedang. Hal yang paling mendasar dalam penyediaan sistem jaringan jalan untuk skala wilayah adalah menjamin aksesibilitas dan efisiensi.

Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Kedungsepur terletak di jalur antara kota-kota Orde I dan juga penghubung utama antar provinsi. Yaitu melalui Jalur Pantai Utara yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah-Jawa Barat serta DKI Jakarta dan Jalur Pantai Selatan yang menghubungkan Jawa Tengah dengan DI Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis tersebut,

Perencanaan sarana maupun transportasi membutuhkan penanganan yang khusus sehingga dapat mendukung penyebaran aktivitas yang pada akhirnya dapat mengurangi disparitas antar wilayah.

Jaringan prasarana jalan terdiri dari simpul yang berwujud terminal baik terminal penumpang maupun barang dan ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas pada transportasi jalan berupa ruas jalan yang ditentukan hirarkinya menurut peranannya yang terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Di Kawasan Kedungsepur, prasarana jalan utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Arteri Primer Utama, menghubungkan Kota Semarang-Bawen-Yogyakarta; serta Semarang-Bawen-Solo;
- Jalan Arteri primer bagian utara yang menghubungkan Weleri-Kendal-Semarang-Demak;
- Kolektor Primer, menghubungkan Kota Semarang-Purwodadi; Ambarawa-Banyubiru-Salatiga; Bandungan-Ambarawa; Bergas-Jimbaran-Bandungan-Sumowono ke Temanggung; dll
- Jalan Tol Semarang yang menghubungkan jalan Perintis Kemerdekaan-Teuku Umar-Krapyak-Majapahit-Kaligawe (Terminal).

3.6.2 *Transportasi Laut*

Jaringan transportasi laut sebagai salah satu bagian dari jaringan moda transportasi air mempunyai perbedaan karakteristik dibandingkan moda transportasi lain yaitu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dan jarak jauh antar pulau maupun antar negara.

Sebagai kawasan yang memiliki potensi laut yang cukup besar, prasarana transportasi laut di Kawasan Kedungsepur juga memiliki potensi besar untuk pengembangan pelabuhan laut. Pelabuhan Tanjung Emas yang terletak di Kota Semarang merupakan pelabuhan utama di Jawa Tengah yang cukup penting dan

strategis karena menjadi simpul perekonomian dan pintu gerbang ekspor dan impor. Peranan ini tidak hanya berlaku bagi Kota Semarang saja namun juga Kedungsepur secara kawasan maupun secara administratif Jawa Tengah. Selain itu Pelabuhan Tanjung Emas juga memiliki potensi daerah penyangga yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berdasarkan peran dan fungsinya, pelabuhan laut dibedakan menjadi pelabuhan internasional hub (utama primer), internasional (utama sekunder), nasional (utama tersier), regional, dan lokal. Pelabuhan Tanjung Emas sendiri termasuk dalam pelabuhan internasional (utama sekunder) yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang dalam volume yang relatif besar karena kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan internasional serta mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainnya.

3.6.3 Transportasi Udara

Transportasi udara sangat efektif digunakan untuk angkutan jarak jauh. Hal ini dikarenakan jangkauan kecepatan dan daya jangkauannya yang cukup fleksibel dan hampir di setiap wilayah yang memiliki sarana lapangan terbang maka dapat disinggahi .

Bandara Ahmad Yani yang merupakan satu-satunya bandara yang ada di kawasan Kedungsepur baru saja memiliki status bandara internasional sesuai KM No. 64 tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004. Dengan status ini Bandara Ahmad

Yani mulai melayani penerbangan internasional yang saat ini dibuka jalur penerbangan Semarang-Singapura.

Bandara Ahmad Yani selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dan pengembangan yang cukup pesat. Mulai dari penggantian status bandara menjadi bandara internasional, juga jumlah kedatangan serta keberangkatan pesawat terbang yang singgah juga mengalami peningkatan.

BAB IV

ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR DAERAH DI WILAYAH KEDUNGSEPUR

4.1 Analisis Sektor Basis

Salah satu tujuan dari pada kebijaksanaan pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menentukan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor ekonomi tersebut secara nasional. Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat dipergunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut.

Keterkaitan perekonomian Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur dengan wilayah yang lebih luas seperti Jawa Tengah dapat diidentifikasi dari penghitungan analisis *Location Quotient (LQ)*. Dengan analisis ini dapat

dideskripsikan dampak perbandingan relatif sumbangan sektor suatu daerah dengan daerah yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $LQ > 1$ berarti sektor tersebut dapat memenuhi konsumsi daerahnya sendiri, juga konsumsi daerah lain (potensi ekspor).
- Jika nilai $LQ = 1$ berarti sektor tersebut hanya dapat memenuhi konsumsi daerahnya sendiri.
- Jika nilai $LQ < 1$ berarti sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi konsumsi daerahnya sendiri bahkan cenderung mengimpor dari daerah lain.

Selanjutnya dari kemungkinan nilai-nilai LQ yang diperoleh, dapat diperlihatkan adanya sumbangan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari 1. Kondisi ini sekaligus menunjukkan sektor ekonomi yang strategis dan merupakan sektor basis.

Untuk memberikan gambaran yang lebih teliti terhadap kondisi tiap sektor pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka dilihat pula bagaimana kondisi rata-rata pertumbuhan tiap sektor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rata-rata pertumbuhan tiap sektor tersebut kemudian dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tiap sektor di Jawa Tengah. Jika nilai perbandingan tersebut lebih besar dari 1 (satu), maka sektor dimaksud memiliki potensi untuk dikembangkan sebaliknya jika nilai perbandingan kurang dari 1 (satu), maka sektor dimaksud kurang potensial untuk dikembangkan.

Sektor-sektor basis di kota Semarang meliputi sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan

Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa. Sektor Industri Pengolahan di kota Semarang masih cukup mendominasi, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini pada tahun 2005 sebesar 22,78% dengan kontribusi PDRB sebesar 40,34%. Sektor Jasa juga merupakan sektor yang cukup maju di kota Semarang, hal ini merupakan ciri kota metropolitan yang mulai menunjukkan peralihan peran dari sektor sekunder ke sektor tersier. Kontribusi PDRB sektor Jasa pada tahun 2005 sebesar 11,83% dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini sebesar 21,68%. Adapun sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan walaupun memiliki kontribusi PDRB dan penduduk yang bekerja di sektor ini relatif kecil, namun mampu memberikan outputnya ke wilayah lain seperti suplai listrik, provider telepon selular, jasa perbankan dan jasa transportasi.

Adapun sektor-sektor basis tersebut yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki rata-rata pertumbuhan di atas Jawa Tengah adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan serta sektor Pengangkutan dan komunikasi.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa merupakan sektor-sektor basis di kota Salatiga. Kontribusi sektor-sektor basis tersebut terhadap PDRB tahun 2005 berkisar antara 10% sampai dengan 25%, sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor tersebut rata-rata sebesar 8%. Jika dibandingkan dengan kota Semarang, nampak ada kemiripan sektor basisnya hal ini mengindikasikan bahwa kota Salatiga memiliki ciri yang mirip

dengan kota Semarang, yaitu sektor-sektor tersiernya lebih maju. Adapun sektor-sektor basis tersebut yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki rata-rata pertumbuhan di atas Jawa Tengah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Pengangkutan dan komunikasi.

Sektor Pertanian, sektor Industri dan sektor Listrik, Gas dan Air bersih merupakan sektor basis di Kabupaten Kendal dengan nilai kontribusi terhadap PDRB tahun 2005 masing-masing sebesar 24,08%, 40,11% dan 1,06%. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor Pertanian sebesar 48,38%, sedangkan yang bekerja pada sektor Industri sebesar 10,14%. Industri yang cukup menonjol di wilayah ini meliputi industri manufaktur, industri otomotif dan industri komponen elektronik. Sektor Pertanian memiliki rata-rata pertumbuhan di atas Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kendal. Penggunaan lahan di Kabupaten Kendal juga menunjukkan bahwa sebagian besar lahan masih berfungsi sebagai sawah (33,9%).

Sektor-sektor basis di Kabupaten Demak meliputi: sektor Pertanian, sektor Bangunan dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor pertanian sebenarnya merupakan sektor unggulan di Kabupaten Demak, namun rata-rata pertumbuhannya sebesar 3% sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 3,21%. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Demak tahun 2005 sebesar 42,93% dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini sebesar 40,20%. Kondisi tersebut didukung oleh penggunaan lahan di wilayah ini yang sebagian besar masih berupa tanah sawah yaitu 49,15%. Adapun produk

unggulan sektor pertanian meliputi: padi, palawija dan buah-buahan seperti: belimbing, jambu merah delima dan pisang.

Sektor-sektor basis di Kabupaten Grobogan meliputi: sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Galian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa. Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling menonjol di Kabupaten Grobogan, hal ini bisa terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Grobogan tahun 2005 sebesar 41,65% dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertanian sebesar 60,82%. Sektor basis yang lain walaupun kontribusinya relatif kecil, namun sektor-sektor ini mampu menjual produknya ke luar daerah serta memiliki rata-rata pertumbuhan di atas Jawa Tengah.

Sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan merupakan sektor basis di Kabupaten Semarang. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2005 sebesar 47,03% dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini sebesar 38,08%. Sektor ini juga memiliki rata-rata pertumbuhan di atas Jawa Tengah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis dan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat pada Tabel IV.1, Tabel IV.2 dan Gambar 4.1

TABEL IV.1
HASIL ANALISIS LOCATION QUOTIENT DI WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2005

| No | Sektor Ekonomi | Location Quotient | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang |
| 1 | Pertanian | 0,0614 | 0,3128 | 1,1509 | 2,0522 | 1,9910 | 0,6377 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 0,3179 | 0,4748 | 0,8878 | 0,2098 | 1,3753 | 0,1137 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,2515 | 0,6141 | 1,2444 | 0,3513 | 0,1067 | 1,4590 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 1,6073 | 5,4718 | 1,2821 | 0,7972 | 1,7128 | 0,9832 |
| 5 | Bangunan | 2,4499 | 0,7727 | 0,4932 | 1,1843 | 0,7881 | 0,6809 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 0,8440 | 0,8008 | 0,8754 | 0,9645 | 0,8493 | 1,0365 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1,9404 | 4,9150 | 0,4825 | 0,9004 | 0,6580 | 0,4255 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh | 1,1424 | 1,9276 | 0,7055 | 1,0443 | 2,5957 | 0,8887 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1,1828 | 1,6693 | 0,7857 | 0,9916 | 1,7452 | 0,7909 |

Sumber : Hasil Analisis 2008

Keterangan:

Sektor Basis

TABEL IV.2
RATA-RATA PERTUMBUHAN PDRB TIAP SEKTOR TAHUN 2001-2005 DI WILAYAH KEDUNGSEPUR
DAN NILAI PERBANDINGANNYA DENGAN JAWA TENGAH

| No | Sektor Ekonomi | Jateng | Kota Semarang | | Kota Salatiga | | Kab. Kendal | | Kab. Demak | | Kab. Grobogan | | Kab. Semarang | |
|----|---------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | NRP (%) | NRP (%) | NP | NRP (%) | NP | NRP (%) | NP | NRP (%) | NP | NRP (%) | NP | NRP (%) | NP |
| 1 | Pertanian | 3,21 | 28,85 | 8,98 | 11,30 | 3,52 | 10,96 | 3,41 | 3,00 | 0,94 | 1,64 | 0,51 | -2,02 | -0,63 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 5,16 | 17,28 | 3,35 | -3,23 | -0,62 | 20,78 | 4,02 | 2,92 | 0,57 | 16,11 | 3,12 | -5,77 | -1,12 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,54 | 13,09 | 2,36 | 4,22 | 0,76 | 0,23 | 0,04 | 2,90 | 0,52 | 2,06 | 0,37 | 6,77 | 1,22 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 7,93 | 2,94 | 0,37 | 13,67 | 1,72 | -12,45 | -1,57 | 6,41 | 0,81 | 42,88 | 5,41 | -9,18 | -1,16 |
| 5 | Bangunan | 9,55 | 72,31 | 7,57 | -2,37 | -0,25 | 16,83 | 1,76 | 37,39 | 3,91 | 6,31 | 0,66 | 35,84 | 3,75 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 3,89 | -9,92 | -2,55 | 2,64 | 0,68 | 3,99 | 1,03 | 2,94 | 0,75 | 0,31 | 0,08 | 9,57 | 2,46 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 5,81 | 12,04 | 2,07 | 31,78 | 5,47 | 2,99 | 0,51 | 4,32 | 0,74 | -0,34 | -0,06 | -4,22 | -0,73 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh | 3,48 | -1,56 | -0,45 | -0,89 | -0,26 | 0,58 | 0,17 | 4,70 | 1,35 | 35,48 | 10,19 | -1,30 | -0,37 |
| 9 | Jasa-Jasa | 5,18 | 1,93 | 0,37 | -7,09 | -1,37 | -0,67 | -0,13 | -2,32 | -0,45 | 6,70 | 1,29 | -7,21 | -1,39 |

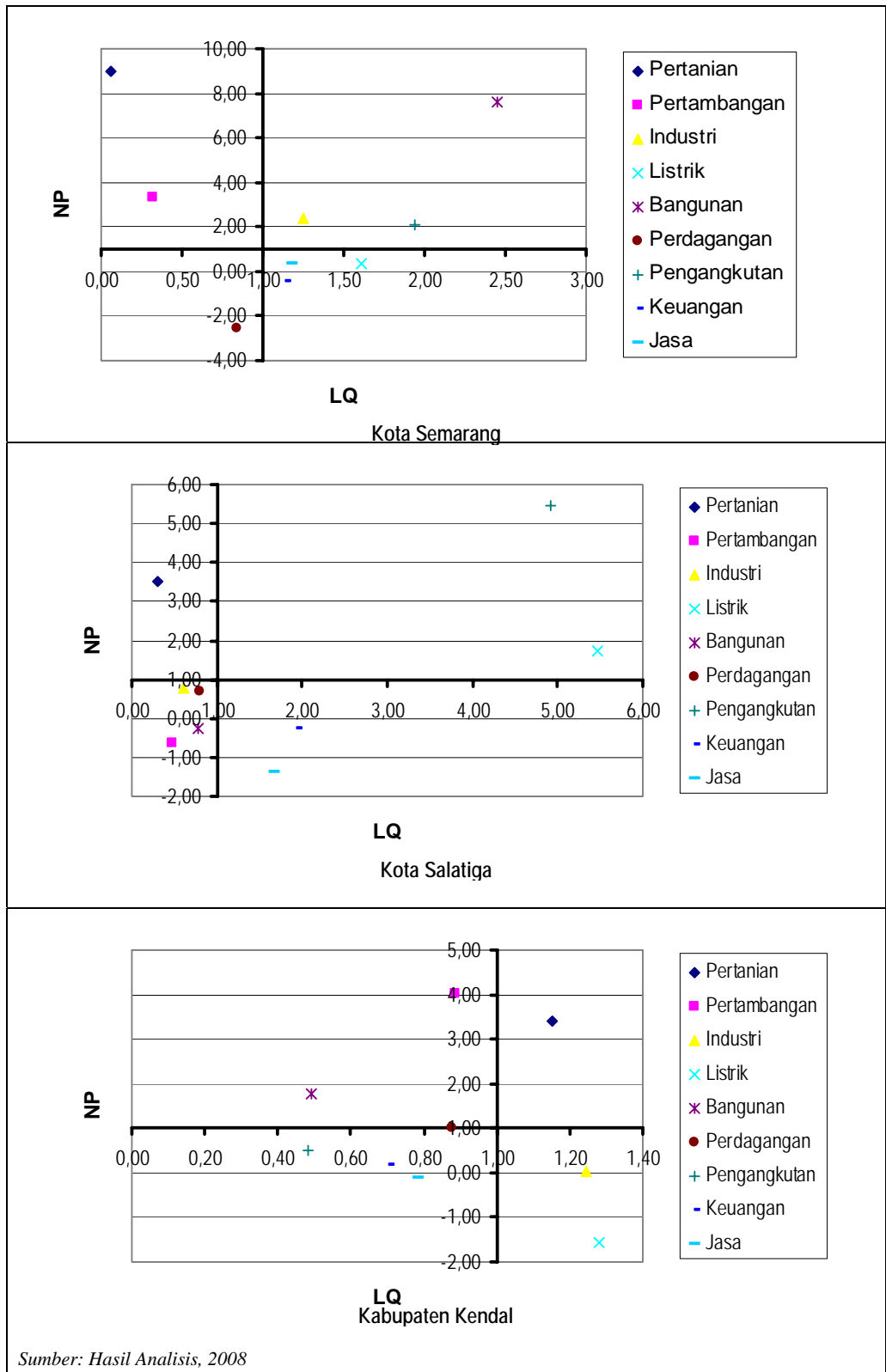
Sumber : Hasil Analisis, 2008

Keterangan:

NRP : Nilai Rata-rata Pertumbuhan

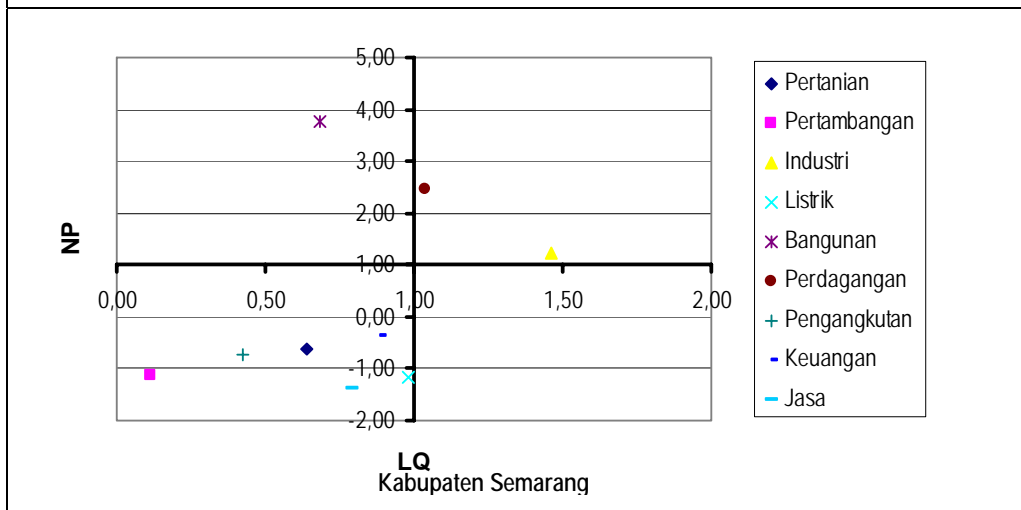
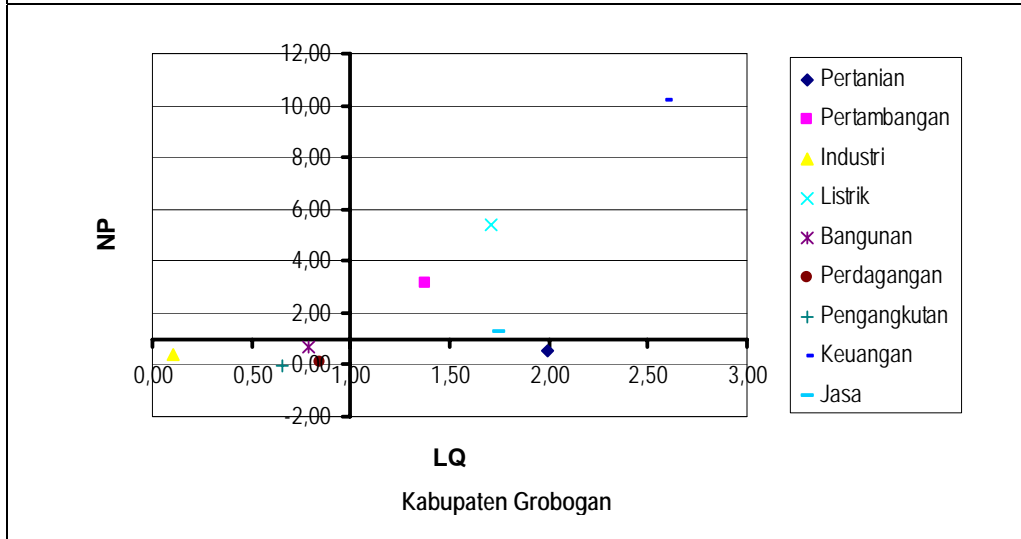
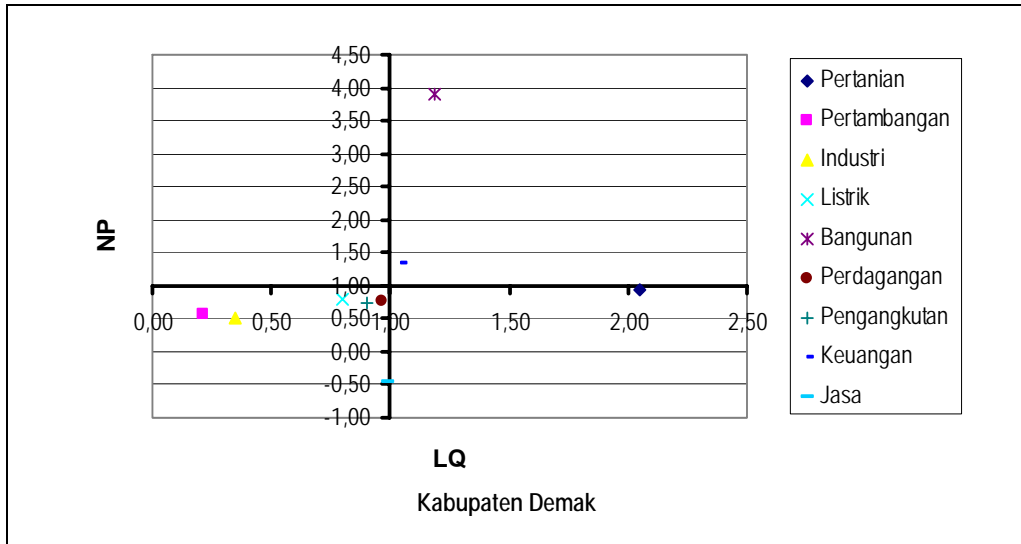
NP : Nilai Perbandingan

: Sektor yang potensial untuk dikembangkan



GAMBAR 4.1
PENGELOMPOKAN SEKTOR KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH KEDUNGSEPUR (Lanjutan)

Lanjutan



4.2 Interaksi Ekonomi

Interaksi ekonomi wilayah merupakan wujud keterkaitan antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Interaksi ekonomi di wilayah Kedungsepur dapat dilihat dalam Tabel Koefisien Input Wilayah Kedungsepur (Tabel IV.3) yang merupakan turunan dari Tabel Input-Output Wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Koefisien input adalah besarnya input yang dibutuhkan dari sektor lainnya agar sektor tersebut dapat menghasilkan produk senilai 1 (satu). Tabel tersebut menggambarkan hubungan dinamis antar sektor produksi ekonomi melalui penyebaran input maupun output sektor-sektor ekonomi tersebut.

Tabel Input-Output mempunyai manfaat untuk kegiatan perencanaan pembangunan maupun analisis, sebab perencanaan sektoral dengan menggunakan model yang diturunkan dari tabel Input-Output dapat dilakukan secara simultan dan memperlihatkan aspek keterkaitan antar sektor.

Pembacaan tabel ke bawah (kolom) menunjukkan bahwa jumlah masukan masing-masing sektor diperoleh dari masukan (input) antara dan masukan (input) primer. Masukan antara berupa masukan dari tiap sektor dalam proses produksi (kode 190), sedangkan masukan primer berupa balas jasa atas pemakaian faktor produksi yang terdiri dari upah tenaga kerja, keahlian, pemilik tanah/peralatan dan penyertaan modal (kode 209). Sehingga jumlah masukan antara dan masukan primer menunjukkan jumlah total input (kode 210). Pembacaan tabel ke samping (baris) menunjukkan bahwa jumlah keluaran masing-masing sektor didistribusikan sebagai permintaan antara dan permintaan akhir. Permintaan

TABEL IV.3
TABEL KOEFISIEN INPUT WILAYAH JAWA TENGAH
TAHUN 2004

| Sektor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 0,0541 | 0,0005 | 0,1147 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0196 | 0,0013 | 0,0135 | 0,0077 | 0,0675 |
| 2 | 0,0000 | 0,0152 | 0,1909 | 0,5469 | 0,0844 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0036 | 0,0087 | 0,1079 |
| 3 | 0,0795 | 0,0604 | 0,2320 | 0,0410 | 0,3546 | 0,1150 | 0,1976 | 0,1069 | 0,1850 | 0,1874 |
| 4 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0076 | 0,0337 | 0,0012 | 0,0346 | 0,0078 | 0,0112 | 0,0159 | 0,0114 |
| 5 | 0,0031 | 0,0291 | 0,0005 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0123 | 0,0158 | 0,0412 | 0,0032 | 0,0072 |
| 6 | 0,0236 | 0,0473 | 0,0949 | 0,0271 | 0,1224 | 0,1069 | 0,0977 | 0,1180 | 0,1005 | 0,0914 |
| 7 | 0,0044 | 0,0248 | 0,0241 | 0,0077 | 0,0214 | 0,0520 | 0,0593 | 0,0234 | 0,0168 | 0,0272 |
| 8 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0118 | 0,0312 | 0,0218 | 0,0219 | 0,0120 | 0,0109 |
| 9 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0061 | 0,0072 | 0,0310 | 0,0133 | 0,0198 | 0,0061 |
| 190 | 0,1661 | 0,1843 | 0,6716 | 0,6620 | 0,6277 | 0,3789 | 0,4331 | 0,3530 | 0,3697 | 0,5171 |
| 209 | 0,8339 | 0,8157 | 0,3284 | 0,3380 | 0,3723 | 0,6211 | 0,5669 | 0,6470 | 0,6303 | 0,4829 |
| 210 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Keterangan:

| | |
|--|--|
| 1 = Sektor Pertanian | 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan |
| 2 = Sektor Pertambangan dan Galian | 9 = Sektor Jasa-Jasa |
| 3 = Sektor Industri Pengolahan | 190 = Input Antara |
| 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih | 209 = Input Primer / Nilai Tambah Bruto |
| 5 = Sektor Bangunan | 210 = Input Total |
| 6 = Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran | 180 = Output Antara |
| 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi | |

antara yaitu permintaan yang dipakai dalam proses produksi (kode 180) sedangkan permintaan akhir adalah permintaan yang digunakan oleh masyarakat sebagai barang konsumsi (kode 309). Sehingga jumlah permintaan antara dan permintaan akhir menunjukkan jumlah total output (kode 310).

Pembacaan Tabel IV.3 menurut kolom menunjukkan bahwa untuk menghasilkan produknya, sektor Pertanian membutuhkan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Pertanian sendiri. Sektor Pertambangan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan, sektor Industri memerlukan input terbesar dari sektor Industri itu sendiri dan sektor pertambangan, sektor Listrik memerlukan input terbesar dari sektor Pertambangan kemudian sektor Bangunan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan. Adapun sektor perdagangan untuk menghasilkan produknya memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan itu sendiri, sektor Pengangkutan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan Perdagangan, sektor Keuangan memerlukan input terbesar dari sektor Perdagangan dan sektor Industri sedangkan sektor Jasa memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Industri merupakan sektor pemberi input terbesar bagi semua sektor kecuali sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Penerimaan input sektoral yang cukup besar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor yang cukup besar pula.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, keterkaitan antar sektor tersebut di atas disajikan dalam Tabel IV.4 dan Gambar 4.2

TABEL IV.4
PROSENTASE PENERIMAAN INPUT SEKTORAL
DALAM TABEL KOEFISIEN INPUT WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2004 (%)

| Sektor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 32,56 | 0,25 | 17,08 | 0,00 | 3,98 | 5,17 | 0,31 | 3,83 | 2,07 |
| 2 | 0,00 | 8,23 | 28,43 | 82,62 | 13,45 | 0,01 | 0,17 | 1,02 | 2,36 |
| 3 | 47,89 | 32,78 | 34,54 | 6,19 | 56,48 | 30,35 | 45,64 | 30,27 | 50,04 |
| 4 | 0,10 | 0,20 | 1,14 | 5,08 | 0,20 | 9,14 | 1,79 | 3,16 | 4,30 |
| 5 | 1,89 | 15,81 | 0,08 | 0,40 | 0,13 | 3,25 | 3,64 | 11,67 | 0,87 |
| 6 | 14,19 | 25,66 | 14,13 | 4,10 | 19,50 | 28,21 | 22,56 | 33,44 | 27,19 |
| 7 | 2,64 | 13,46 | 3,58 | 1,16 | 3,42 | 13,73 | 13,69 | 6,62 | 4,55 |
| 8 | 0,42 | 1,43 | 0,58 | 0,25 | 1,88 | 8,24 | 5,04 | 6,21 | 3,25 |
| 9 | 0,30 | 2,17 | 0,44 | 0,18 | 0,97 | 1,90 | 7,16 | 3,78 | 5,37 |
| 190 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

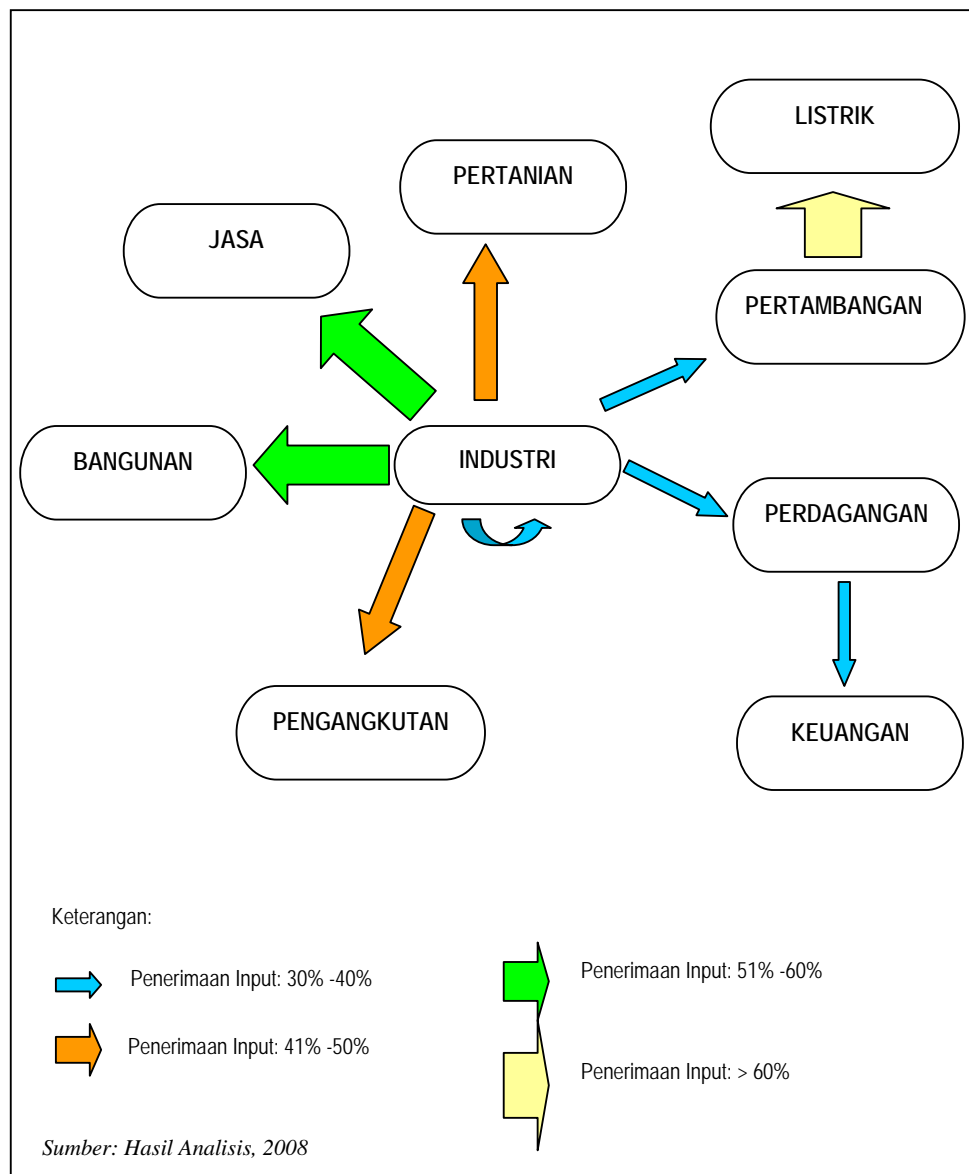
Sumber: Hasil Analisis, 2008

Keterangan:

| | |
|--|--|
| 1 = Sektor Pertanian | 6 = Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran |
| 2 = Sektor Pertambangan dan Galian | 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi |
| 3 = Sektor Industri Pengolahan | 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan |
| 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih | 9 = Sektor Jasa-Jasa |
| 5 = Sektor Bangunan | 190 = Input Antara |

Tabel IV.4 dan Gambar 4.2 menjelaskan bahwa sektor Industri merupakan pemberi input terbesar bagi hampir semua sektor, pemberian input sektor Industri ke sektor-sektor lain tersebut berkisar antara 30% sampai dengan 50%.. Sektor penerima input terbesar dari sektor Industri adalah sektor Bangunan(56,48%), kemudian berturut-turut adalah sektor Jasa (50,04%), sektor Pertanian (47,89%), sektor Pengangkutan dan Komunikasi (45,64%), sektor Industri Pengolahan (34,54%), sektor Pertambangan dan Galian (32,78%) serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (30,35%). Sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

memperoleh input 82,62% dari sektor Pertambangan dan sektor Keuangan memperoleh input sebesar 33,44% dari sektor Perdagangan.



GAMBAR 4.2
PENERIMAAN INPUT SEKTORAL TERBESAR
DALAM TABEL KOEFISIEN INPUT WILAYAH KEDUNGSEPUR

4.3 Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang

Pengaruh sektor ekonomi terhadap sektor ekonomi lainnya dapat juga dilihat dengan menjumlahkan koefisien input baik menurut baris maupun kolom. Penjumlahan koefisien input sektor ke kanan atau elemen kolom akan menunjukkan keterkaitan langsung ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan langsung ke depan menggambarkan dampak sektor tertentu terhadap sektor-sektor lainnya yang menggunakan keluaran sektor tersebut sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Keterkaitan langsung ke depan menggambarkan daya tarik terhadap pasar.

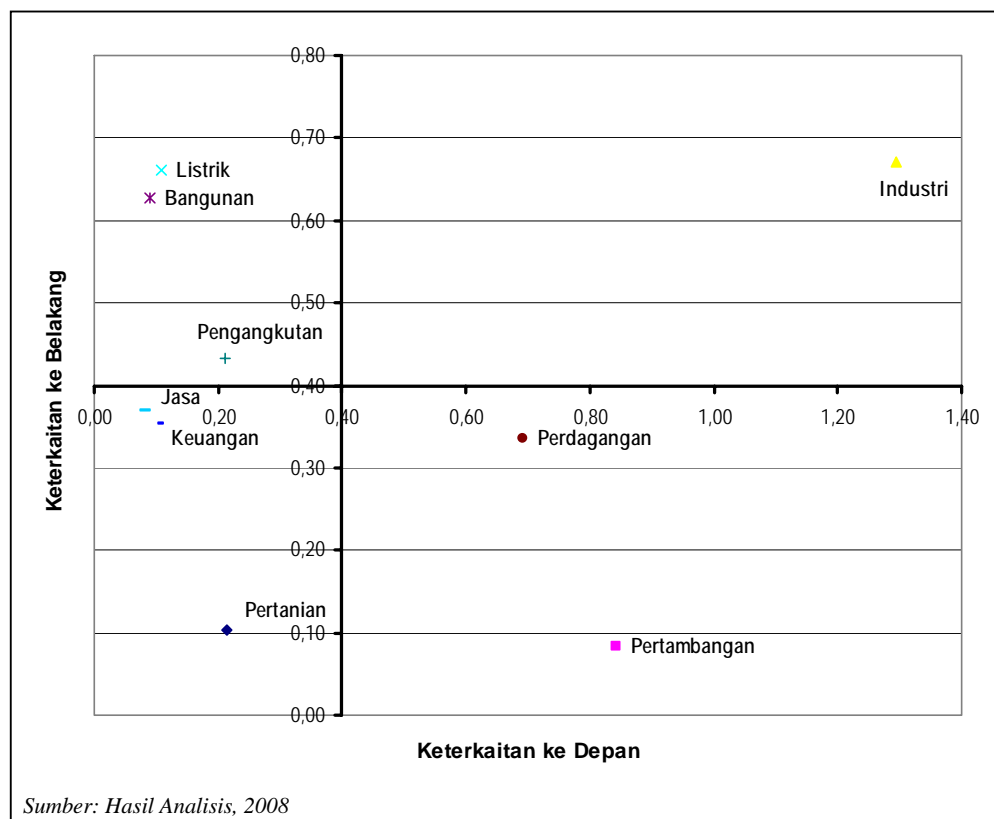
Penjumlahan koefisien input sektor ke bawah atau menurut elemen baris akan menunjukkan keterkaitan langsung ke belakang (*backward linkage*). Keterkaitan langsung ke belakang menggambarkan dampak sektor tertentu terhadap sektor-sektor lain yang keluarannya digunakan sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Keterkaitan langsung ke belakang menggambarkan daya tarik terhadap bahan baku. Tabel IV.5 menjelaskan tentang keterkaitan langsung ke depan dan keterkaitan langsung ke belakang.

TABEL IV.5
KETERKAITAN KE DEPAN DAN KETERKAITAN KE BELAKANG
WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2004

| No. | Sektor Ekonomi | Keterkaitan ke Depan | Keterkaitan ke Belakang |
|-----|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | Pertanian | 0,2133 | 0,1032 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,8422 | 0,0830 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1,2955 | 0,6716 |
| 4. | Listrik, Gas dan Air Bersih | 0,1083 | 0,6620 |
| 5. | Bangunan | 0,0901 | 0,6277 |
| 6. | Perdagangan, hotel dan restoran | 0,6914 | 0,3354 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 0,2126 | 0,4331 |
| 8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh | 0,1024 | 0,3530 |
| 9. | Jasa-jasa | 0,0830 | 0,3697 |
| | Rata-rata | 0,40 | 0,40 |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa keterkaitan ke belakang maupun ke depan terbesar dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki peran yang besar dalam menarik sektor lain untuk berkembang, yaitu meminta output sektor lain sebagai input kegiatan produksinya maupun menyediakan input bagi kegiatan produksi sektor lain. Adapun posisi tiap sektor dalam keterkaitan langsung ke depan maupun ke belakang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dalam Gambar 4.3



GAMBAR 4.3
PENGELOMPOKAN SEKTOR DALAM KETERKAITAN KE DEPAN
DAN KETERKAITAN KE BELAKANG WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2004

Dengan melihat pengelompokan sektor seperti pada Gambar 4.3 di atas, nampak bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan, karena memiliki nilai Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang yang cukup tinggi. Selain sektor Industri Pengolahan terdapat sektor lain yang merupakan sektor unggulan di wilayah Kedungsepur yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai keterkaitan langsung kedepan (*forward linkage*) cukup besar, artinya perubahan output sektor ini akan memberi dampak yang cukup besar terhadap sektor-sektor lainnya yang menggunakan keluaran sektor tersebut sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Adapun sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan mempunyai keterkaitan langsung ke belakang (*backward linkage*) cukup besar, artinya perubahan permintaan input sektor ini akan memberi dampak yang cukup besar bagi sektor tertentu yang keluarannya digunakan sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir.

4.4. Keterkaitan Antar Daerah

Untuk mengetahui keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur terutama pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh kunci yang mengetahui potensi pengembangan kerjasama regional Kedungsepur yaitu, Kepala Badan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Kadinda Jawa Tengah, Ketua Himpunan Kawasan Industri Semarang, Ketua *Forum Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kabupaten Demak, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, kerjasama regional Kedungsepur sangat potensial untuk dikembangkan karena selain kedudukan atau letak wilayah ini yang sangat strategis, Kedungsepur juga memiliki potensi sum berdaya yang sangat melimpah. Keterkaitan antara daerah-daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur sangat kuat terjadi di wilayah Pantura yaitu Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak serta jalur selatan Semarang-Solo yang meliputi Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

Pertumbuhan sektor Industri di wilayah ini sangat pesat terutama terjadi pada jalur-jalur yang disebutkan di atas. Lebih lanjut Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sebagai berikut:

Banyak sekali para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di wilayah Kedungsepur, sektor Industri yang paling banyak diminati diantaranya mebel, tekstil dan produk tekstil, serta komponen elektronik. Sektor pertanian sebenarnya cukup potensial dikembangkan di wilayah ini terutama di Kabupaten Demak dan Grobogan terutama dalam mendukung supply bahan baku industri pengolahan makanan yang ada di Kota Semarang. Kerjasama dalam pengembangan infrastruktur juga sangat potensial dikembangkan di wilayah Kedungsepur, seperti pengolahan air bersih, peningkatan jalan dan jembatan serta perencanaan tata ruang.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Tengah lebih menekankan tentang pentingnya menata kembali kawasan industri yang ada di

Kota Semarang. Kawasan industri yang selama ini terpusat di Kota Semarang terlalu membebani kota karena sebagian besar industri ini tergolong industri berat. Untuk itu ke depan, daerah-daerah di sekitar Kota Semarang harus dikembangkan agar dapat menunjang pendirian kawasan industri, terutama industri berat dan padat karya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa di Kota Semarang lebih cocok untuk industri-industri padat modal, bukan industri berat seperti manufaktur karena kebutuhan ruang industri padat modal tidak sebesar industri padat karya. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja untuk industri padat modal tidak sebanyak industri padat karya sehingga arus perpindahan penduduk di Kota Semarang dapat ditekan. Idealnya industri-industri berat direlokasi dari kota Semarang ke kabupaten/kota lain disekitarnya seperti Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Wilayah-wilayah itulah yang akan menunjang Kota Semarang.

Keterkaitan dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja di kota Semarang yang berasal dari wilayah-wilayah disekitarnya seperti Kendal, Demak dan Ungaran serta distribusi barang kebutuhan pokok di kota Semarang juga banyak disuplai dari wilayah di sekitar Kota Semarang. Perkembangan kota Semarang mengarah ke sektor jasa dan perdagangan serta merupakan pintu gerbang bagi siapa saja yang akan mengakses wilayah-wilayah disekitarnya.

Sementara itu Ketua Kadinda Jawa Tengah menyoroti pentingnya kota Semarang sebagai pusat kegiatan bagi wilayah Kedungsepur karena Semarang memiliki sarana dan prasarana penunjang yang cukup lengkap seperti: Pelabuhan

Tanjung Emas, Bandara A. Yani dan Jalan Tol serta rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang akan sangat mendukung bagi perkembangan wilayah Kedungsepur. Menanggapi masalah keterkaitan antar daerah dalam sektor Industri di Wilayah Kedungsepur, Ketua Kadin Jawa Tengah menyampaikan bahwa:

Keterkaitan dalam sektor Industri di Wilayah Kedungsepur salah satunya dapat dilihat pada industri unggulan di Jawa Tengah yaitu industri Tekstil dan Produk Tekstil. Salah satu industri Tekstil terbesar di Asia Tenggara adalah PT. Apac Inti Corpora yang terdapat di Kabupaten Semarang. Industri ini selain berorientasi ekspor juga memasok kebutuhan bahan baku kain bagi industri-industri garmen di kota Semarang, kabupaten Demak dan kabupaten Kendal serta Kota Salatiga. Disamping itu kebutuhan akan tenaga kerja walaupun sebagian besar dipenuhi dari kabupaten Semarang sendiri, sebagian tenaga kerja juga dipenuhi dari kota Semarang dan kota Salatiga.

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal diharapkan akan memperkuat posisi Kedungsepur. KEK merupakan kawasan bagi industri-industri yang berorientasi ekspor, karena pada kawasan ini juga akan dilengkapi dengan pelabuhan ekspor. Dengan adanya KEK ini, Kabupaten Kendal akan menjadi wilayah penyangga bagi Kota Semarang yang saat ini jumlah industrinya sudah semakin padat. Konsep KEK disusun untuk meningkatkan daya saing serta mengoptimalkan pemanfaatan banyaknya industri dari negara-negara maju yang melakukan relokasi ke kawasan Asia.

Selain itu, di daerah perbatasan antara Semarang-Kendal juga akan dibangun Terminal Kayu. Dengan adanya Terminal Kayu ini diharapkan dapat mensuplai kebutuhan kayu bagi industri mebel di Wilayah Kedungsepur yang selama ini para pengusaha mebel mendatangkan langsung dari Kalimantan melalui Surabaya. Dengan adanya rencana-rencana pembangunan sarana dan

prasarana tersebut, Kedungsepur akan menjadi posisi yang sangat strategis bagi Jawa Tengah.

Pada bagian selatan cukup berkembang pula sektor Pertanian dan Pariwisata yang akan semakin maju dengan terealisasinya pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Pembangunan jalan tol ini akan semakin mempermudah distribusi hasil pertanian di wilayah selatan Kedungsepur. Sektor pertanian di wilayah ini memang sebagian besar masih dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung, belum banyak diserap oleh sektor industri walaupun sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar.

Dengan melihat potensi keterkaitan antar daerah yang cukup besar tersebut, perlu diperkuat dengan mendorong keterkaitan antar wilayah *hinterland* Sematang yang masih lemah seperti wilayah-wilayah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kendal serta Kabupaten Semarang- Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Untuk mendorong peningkatan keterkaitan pada wilayah-wilayah tersebut perlu di bangun jaringan jalan yang lebih memadai sehingga lebih memperlancar jalur distribusi hasil pertanian antar wilayah. Selanjutnya Ketua Kadinda Jateng memprediksikan bahwa:

Perkembangan wilayah Kedungsepur ini ke depan berkaitan erat dengan fungsi Kota Semarang sebagai financial hub dan logistic hub. Industri besar sudah tidak cocok bagi Kota Semarang, industri ini harus ditempatkan di wilayah penyangga Semarang seperti Demak, Kendal dan Kabupaten Semarang sehingga dapat mengurangi beban arus tenaga kerja commuter yang cukup besar di wilayah ini. Untuk mendorong Kedungsepur sebagai wilayah Metropolitan, Kota Semarang harus menjadi pelopor terealisasinya kerjasama regional Kedungsepur dengan memberikan semacam insentif bagi daerah penyangga karena secara ekonomi Kota Semarang lebih diuntungkan.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kota Semarang juga berpendapat senada bahwa beban Kota Semarang untuk industri sudah sangat jenuh. Kawasan Industri berjumlah 9 (sembilan) dengan luas wilayah \pm 1500 ha dan jumlah industri yang berada di dalam kawasan sebanyak 1.778. Secara keseluruhan jumlah industri di Kota Semarang sebesar 2.772 buah terdiri dari 132 industri besar, 556 industri sedang dan 2048 industri kecil dan menengah. Sektor industri memperkerjakan lebih dari 98.000 tenaga kerja. Hal ini jauh lebih besar jika dibandingkan sektor pertanian yang memperkerjakan 50.000 tenaga kerja.

Menanggapi pertanyaan mengenai keterkaitan antar daerah di Wilayah Kedungsepur, Ketua HKI berpendapat bahwa:

Keterkaitan antar daerah di Wilayah Kedungsepur dapat dilihat pada sektor industri, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja antar daerah yang cukup besar. Sebagian besar industri-industri di kota Semarang, terutama yang berlokasi di kawasan industri, tenaga kerja diperoleh dari daerah sekitar. Seperti pada Kawasan Industri Terboyo dan Kawasan Industri Tanah Makmur banyak menggunakan tenaga kerja dari kabupaten Demak dan industri-industri yang berlokasi di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru dan Kawasan Industri Candi banyak menggunakan tenaga kerja dari kabupaten Kendal. Bahkan tenaga kerja dari wilayah Kabupaten Semarang juga banyak memenuhi kebutuhan industri-industri di Kota Semarang seperti industri-industri yang terdapat di Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ)

Peluang yang cukup besar pada sektor pertanian sebenarnya belum diolah secara maksimal dalam kaitannya untuk memenuhi sektor Industri. Lebih jauh ketua HKI menyampaikan bahwa sektor pertanian khususnya sayur-sayuran dari wilayah kabupaten Semarang memiliki peluang yang cukup besar untuk memasok kebutuhan sayur kering pada industri mi instan di kota Semarang. Namun sampai saat ini belum ada investor yang tertarik untuk mengolah sayur-sayuran yang

jumlahnya cukup melimpah di wilayah Kabupaten Semarang ini. Sementara itu industri mie instan masih mengimpor sayur kering dari luar negeri.

Ketua FEDEP Kabupaten Demak juga menyoroti akan pentingnya keterkaitan antara sektor Pertanian dan Industri di Wilayah Kedungsepur. Banyak sekali potensi sektor pertanian yang belum diolah secara maksimal seperti hasil buah-buahan yang dapat diolah menjadi sari buah ataupun buah kaleng. Saat ini hasil buah-buahan dari Kabupaten Demak yang cukup potensial untuk diolah adalah belimbing demak, jambu merah delima dan pisang. Dalam tiga tahun terakhir hasil produksinya meningkat secara signifikan terutama di Kecamatan Demak dan Wonosalam, Karanganyar dan wilayah lainnya.

Surplus produksi beras telah mendorong berkembangnya usaha penggilingan padi sebanyak 164 unit dan yang terbesar adalah **Mutiara Prima (Demak)**. Masih terbuka kesempatan bagi pemilik modal untuk menanamkan investasinya di bidang pengadaan bibit, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan beras dan tepung beras.

Terbukanya prospek investasi untuk pengolahan jagung menjadi bahan makanan olahan, pakan ternak dan lain-lain serta kacang hijau menjadi berbagai produk olahan dan pembuatan tepung dengan daerah pemasaran yang masih terbuka lebar yaitu di wilayah Kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Kudus dan kota-kota besar lainnya.

Kabupaten Demak memiliki potensi perikanan yang melimpah baik perikanan laut dan perikanan darat. Pemerintah daerah sedang giat mengembangkan usaha perikanan yaitu melengkapi TPI Morodemak (Bonang)

dengan pabrik es, stasiun pengisian BBM untuk nelayan dan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan, pengolahan teri nasi, rajungan, tenggiri, tongkol masih terbuka pasar ekspor.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kota Semarang serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa beberapa inisiatif kerjasama daerah yang telah disepakati kadang terputus atau tersendat-sendat pelaksanaannya, karena masalah dana. Kerjasama antar daerah yang tergolong kurang maju dan kurang memiliki sumber daya, umumnya sulit terjaga kesinambungannya bila tidak ada penyandang dana. Karena itu tingkat pemerintah yang lebih tinggi diharapkan membantu, atau bila kerjasama ini memiliki prospek ekonomi yang baik, maka pihak swasta di ajak berpartisipasi.

Dari uraian tersebut di atas dan melihat hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat dilihat bahwa:

- Keterkaitan antar daerah di Wilayah Kedungsepur paling kuat terjadi di daerah Pantura yaitu antara Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak serta keterkaitan yang terjadi pada jalur selatan yaitu antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Hal tersebut didorong oleh peranan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan serta tercukupinya jaringan infrastruktur yang ada seperti jalur pantura yang merupakan jalan nasional yang cukup luas serta jalur selatan Semarang-Solo yang juga cukup memadai. Disamping itu kedua jalur jalan utama tersebut mampu mengakses pelabuhan Tanjung Emas serta Bandara A. Yani dengan baik.

- Keterkaitan tersebut di atas paling dominan ditunjukkan oleh keterkaitan sektor Industri yaitu berupa bahan baku, tenaga kerja serta pemasaran hasil-hasil produksi di Wilayah Kedungsepur.
- Sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar jika dikaitkan dengan sektor industri, terutama industri yang mengolah hasil hasil pertanian. Daerah yang memiliki keterkaitan sektor pertanian meliputi: Kabupaten Kendal, Demak, Semarang dan Grobogan.
- Keterkaitan antar daerah *hinterland* Semarang belum begitu menonjol hal ini disebabkan jaringan infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut masih terbatas seperti jalur Kabupaten Semarang-Kabupaten Kendal dan jalur antara Kabupaten Semarang-Grobogan-Demak.

4.5 Temuan Studi

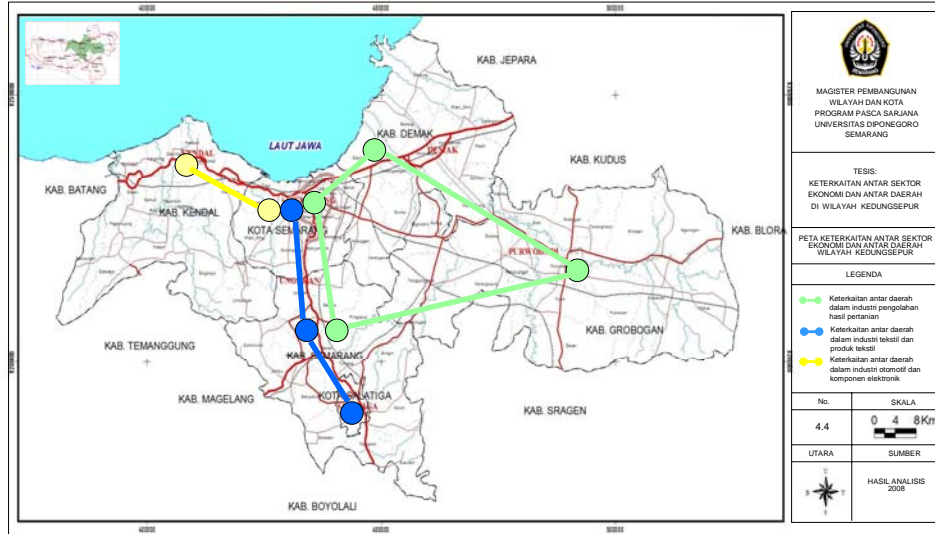
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dirumuskan suatu temuan studi sebagai berikut:

- Sektor Unggulan di Wilayah Kedungsepur meliputi: sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pengangkutan dan komunikasi.
- Sektor-sektor unggulan yang menjadi sektor basis adalah sebagai berikut: sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis di Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang; sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor basis di Kabupaten Grobogan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih merupakan sektor basis di Kota Semarang, Kota Salatiga,

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal. Sektor Bangunan merupakan sektor basis Kota Semarang dan Kabupaten Demak, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor basis Kabupaten Semarang serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor basis Kota Semarang dan Kota Salatiga.

- Terjadi keterkaitan langsung ke depan yang cukup besar antara sektor Pertanian dan Industri, artinya bahwa peningkatan/penurunan output sektor Pertanian akan mempengaruhi peningkatan/penurunan sektor Industri. Keterkaitan antar kedua sektor tersebut mengindikasikan bahwa industri yang berkembang dan potensial di wilayah Kedungsepur adalah industri pengolahan hasil pertanian.
- Jika dikaitkan dengan potensi wilayah masing-masing Kabupaten/Kota, maka akan terbagi menjadi 2 yaitu: wilayah yang berbasis industri (Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang) dan wilayah berbasis pertanian (Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan.).
- Keterkaitan antar daerah dalam industri pengolahan hasil pertanian berpeluang terjadi antara Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.
- Keterkaitan antar daerah dalam industri tekstil dan produk tekstil berpeluang terjadi antara Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga.
- Keterkaitan antar daerah dalam industri otomotif dan komponen elektronik berpeluang terjadi antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Keterkaitan antar sektor ekonomi dan antar daerah di Wilayah Kedungsepur diilustrasikan dalam Gambar 4.4



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Kedungsepur memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian Jawa Tengah, hal ini merupakan modal dasar bagi setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur untuk bersinergi melakukan kerjasama yang saling menguntungkan membentuk satu kekuatan ekonomi dan sumber daya yang lebih luas.
2. Kajian tentang potensi ekonomi kewilayahan yaitu dengan melihat bagaimana keterkaitan antar sektor ekonomi serta mengetahui keterkaitan antar daerah di dalam Wilayah Kedungsepur dapat mewujudkan suatu kerjasama antar daerah yang lebih sistematis.
3. Potensi sumber daya yang sangat menonjol yang dimiliki oleh wilayah Kedungsepur didukung oleh tiga hal yaitu:
 - a. Posisi kawasan yang sangat strategis yang didukung oleh Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki akses pada pergerakan internasional serta merupakan salah satu kawasan pusat pengembangan.
 - b. Potensi sumber daya alam yang melimpah meliputi: potensi tambang, sumber air, potensi sektor pertanian dan kehutanan serta didukung oleh sektor industri yang cukup maju.

- c. Potensi sumber daya manusia yang cukup besar, jumlah penduduk \pm 5,8 juta jiwa atau 18% dari total populasi Jawa Tengah dengan penduduk usia produktif rata-rata 69,7%. Sektor utama yang menjadi mata pencaharian penduduk adalah Pertanian (32,9%), Perdagangan (22%) dan Industri (15,9%).
4. Sektor-sektor yang memiliki peranan dalam memajukan perekonomian dan menjadi sektor basis di Wilayah Kedungsepur meliputi: sektor Pertanian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan; sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis di Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang; sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor basis di Kabupaten Grobogan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih merupakan sektor basis di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal. Sektor Bangunan merupakan sektor basis Kota Semarang dan Kabupaten Demak, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor basis Kabupaten Semarang serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor basis Kota Semarang dan Kota Salatiga
5. Keterkaitan antar sektor ekonomi di Wilayah Kedungsepur secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sektor Industri merupakan sektor yang paling berperan karena merupakan pemberi input bagi sektor-sektor lainnya. Selain itu sektor Industri juga merupakan penyerap output terbesar dari sektor lain.

- b. Sektor Pertanian dan Industri memiliki keterkaitan langsung ke depan yang cukup besar, hal ini mengindikasikan terjadi potensi yang cukup besar bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di Wilayah Kedungsepur.
6. Sedangkan keterkaitan antar daerah di Wwilayah Kedungsepur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Keterkaitan antar daerah yang cukup kuat terjadi antara Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Keterkaitan ini didukung oleh adanya sektor basis yang menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut.
 - b. Keterkaitan antar daerah juga terjadi pada sektor basis Pertanian, yaitu antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.
 - c. Untuk mendorong terciptanya daya saing yang lebih besar di Wilayah Kedungsepur, perlu dilakukan sinergitas keterkaitan antara daerah-daerah yang berbasis Industri dengan daerah-daerah yang berbasis Pertanian

5.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini dapat dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi di Wilayah Kedungsepur perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam menyatukan persepsi antar daerah menuju terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Strategi yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa pada wilayah pusat pertumbuhan (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga).
 - b. Pengembangan sektor pertanian pada wilayah basis (Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan) dengan meningkatkan nilai tambah melalui teknologi pasca panen dan pemasarannya.
 - c. Memperkuat jaringan sistem ekonomi antar daerah penghasil komoditas pusat produksi dan wilayah distribusi utama serta pengembangan jaringan transportasi wilayah *hinterland* Semarang
 - d. Pengembangan dan intensifikasi kawasan industri yang ada serta kemungkinan pembangunan/penyediaan kawasan industri baru di wilayah-wilayah penyangga Kota Semarang dengan perluasan infrastruktur yang akan meningkatkan investasi.
 - e. Penciptaan "iklim investasi" yang kondusif melalui kebijakan-kebijakan daerah yang merangsang timbulnya investasi baru seperti kemudahan perijinan, pemetaan kebijakan penataan tata ruang yang mendukung peluang investasi, pemberian insentif, dll.
3. Dalam rangka meningkatkan perencanaan menjadi realisasi kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur, maka dibutuhkan peran BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan Institusi Pusat untuk mendorong komitmen yang ada dalam merealisasikan kegiatan yang dimaksud.

4. Beberapa penelitian lanjutan yang direkomendasikan adalah:
 - a. Keterkaitan sektor Industri dan Pertanian di Wilayah Kedungsepur dalam rangka mengkaji potensi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
 - b. Studi untuk menggali potensi dan kendala pengembangan wilayah penyangga Kota Semarang yang dapat meningkatkan peran Wilayah Kedungsepur sebagai pusat pertumbuhan
 - c. Pengaruh perkembangan ekonomi kota Semarang terhadap perkembangan Wilayah Kedungsepur.
 - d. Sektor Unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan Daerah Belakang di Wilayah Kedungsepur.
 - e. Studi pengembangan Ekonomi dan Keruangan Wilayah Kedungsepur dalam era Otonomi.
 - f. Peluang dan Kendala dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kedungsepur.
 - g. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kedungsepur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta:YKPN.
- _____. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2003. *Jawa Tengah Dalam Angka 2002*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah.
- _____. 2004. *Jawa Tengah Dalam Angka 2003*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah.
- _____. 2005. *Jawa Tengah Dalam Angka 2004*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah.
- _____. 2006. *Jawa Tengah Dalam Angka 2005*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah.
- _____. 2007. *Jawa Tengah Dalam Angka 2006*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah.
- _____. 2005. *Tabel Input-Output Jawa Tengah Tahun 2004*. Semarang: BPS-BAPPEDA Jawa Tengah
- Bintoro, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Blakely J, Edward. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice* . London: SAGE Publication.
- Branch, Melvive C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bratakusumah, Riyadi D.S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Jaya.
- Bulmer V. 1982. *Input-Output Analysis in Developing Countries, Sources, Methods and Applications*. London: Queen Mary College

- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru*. Bandung: Alumni.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Davey, Kenneth et al. 1996. *Urban Management, The Challenge of Growth*. England: Avebury
- Edgington, David W et al. 2001. *New Regional Development Paradigms: New Regions-Concepts, Issues, and Practices*. London: Greenwood Press
- Evans, Hugh Emrys. 2001. *Regional Development Through Rural-Urban Linkages: The PARUL Program in Indonesia New Regional Development Paradigms*, Volume 3. Edited by Walter B Stohr. London: Greenwood.
- Glasson, John. 1978. *An Introduction to Regional Planning*. London
- Hoover, Edgar M. 1974. *An Introduction To Regional Economi*, Second Edition. New York: Alfred A. Knopf
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Bandung: Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lynch, Kenneth. 2005. *Rural-Urban Interaction in the Developing World*. New York: Rotledge
- Mehrtens, Jana Marie dan Benjamin Abdurahman. 2007. *Regional Marketing, Buku Panduan untuk Manarik Investasi Melalui Aliansi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Reserach: Integrasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan*. Edisi I, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Munir, Risfan dan Bahtiar Istanto. 2005. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif, Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Local Governance Support Program

- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory in Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Nasir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PDPP, Perform. 2004. *Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP)*. Semarang: PDPP.
- Richardson, Harry. 1974. *Dasar dan Ilmu Ekonomi Regional*. Edisi Indonesia. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta; FEUI.
- Randinelli, Dennis A dan Kenneth Ruddle. 1978. *Unbanization and Rural Development*. New York: Praeger Publishers
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averroes Press.
- Sirojuzilam. 2005. *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
- Stamer, Jorg Meyer. 2003. *Participatory Appraisal of Competitive Advantages (PACA): Manual How to Conduct a PACA*. Surakarta: GTZ-RED
- Stohr, W. 1979 *Spatial Equity: Some Antitheses to Current Regional Development Doctrine*. Boston: Leiden Nijhoff)
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Beberapa Aspek Persoalan Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: FEUI.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Tjokroamodjojo, Bintoro. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Yunus, Hadi Sabari. 1999. *Struktur Tata Ruang Kota Yogyakarta*. Pustaka Pelopor

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Damayanti, Maya. 1999. "Peran Semarang sebagai Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Indonesia" Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang.

Sareng, Alexander K, 2005. "Sektor Unggulan Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Daerah Belakang di Kabupaten Alor" Tesis tidak diterbitkan, Program Studi MPWK, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang.

Widiyanti, Sri Hestiningsih. 2006. "Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal di Klaster *Handicraft* dan Mebel Kabupaten Blora" Tesis tidak diterbitkan, Program Studi MPWK, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang.

HASIL PENELITIAN

Sujarto, Djoko. 1981. *Implikasi Faktor-Faktor Perkembangan Kota Secara Fungsional*. Bandung: ITB.

SURAT KABAR/MAJALAH

Suara Merdeka, 16 Juni 2005.

Kompas, 17 Nopember 2009

Kompas, 11 Desember 2008

PERATURAN

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Nomor: 30 Tahun 2005, Nomor: 130.1/0975.A, Nomor: 130/02646, Nomor: 63 Tahun 2005, Nomor: 130.1/A. 00016, Nomor: 130.1/4382 tentang Kerjasama Program Pembangunan di wilayah Kedungsepur

(1) PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Bagaimana dukungan Pemerintah daerah terhadap kerjasama regional Kedungsepur?
 - a. Apakah bentuk dukungan tersebut berupa anggaran?
 - b. Selain dalam bentuk anggaran, bentuk dukungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah?
2. Bagaimana dengan kebijakan – kebijakan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur?
3. Apakah ada kendala serta hambatannya?
4. Bagaimana keterkaitan yang terjadi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur baik secara ekonomi maupun spasial (keruangan) misalnya aliran distribusi barang, bahan baku serta tenaga kerja?
5. Bagaimana hal tersebut pada butir 4 jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi wilayah?
6. Faktor-faktor apa saja yang merupakan prioritas dalam mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur?
7. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur dan siapa saja yang seharusnya berperan.
8. Apa potensi unggulan yang dapat dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal?

(2) PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KADIN/ASOSIASI USAHA

1. Bagaimana dukungan Kadin/Asosiasi Usaha terhadap kerjasama regional Kedungsepur?
2. Apakah ada kendala serta hambatannya?
3. Bagaimana keterkaitan yang terjadi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur baik secara ekonomi maupun spasial (keruangan) misalnya aliran distribusi barang, bahan baku serta tenaga kerja?
4. Apakah aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pengembangan dunia usaha di Kedungsepur.
5. Secara lebih spesifik, daerah-daerah mana di wilayah Kedungsepur yang memiliki keterkaitan ekonomi paling kuat ?
6. Bidang usaha apa yang paling menonjol yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan ekonomi wilayah Kedungsepur?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pentingnya kerjasama regional Kedungsepur?
8. Faktor-faktor apa saja yang merupakan prioritas dalam mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur, khususnya bagi dunia usaha?
9. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur dan siapa saja yang seharusnya berperan?

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BPMD PROVINSI
JAWA TENGAH TANGGAL 14 OKTOBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan Pemerintah daerah terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini melalui APBD Provinsi memang mengalokasikan anggaran guna mendukung terealisasinya kerjasama regional Kedungsepur, namun jumlah anggaran tersebut sangat terbatas hanya untuk mendukung kegiatan berupa penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menentukan peluang investasi antar daerah di wilayah Kedungsepur. Selain itu BPMD Provinsi Jawa Tengah juga berperan aktif dalam mencari mitra lembaga-lembaga donor yang dapat mendukung terealisasinya kerjasama ini. Salah satu lembaga donor yang bersedia membantu mewujudkan kerjasama adalah International Finance Corporation (IFC) – World Bank

2. Pertanyaan tentang kebijakan – kebijakan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPMD Provinsi Jawa Tengah mendorong terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur melalui Rapat Koordinasi Penanaman Modal guna mendorong terbentuknya kerjasama wilayah regional yang ada di Jawa Tengah yang salah satunya adalah kerjasama regional Kedungsepur.

3. Pertanyaan tentang kendala serta hambatannya

Jawaban : Kendala yang sering terjadi antara daerah Kabupaten/Kota masih terjadi adanya ego daerah, dimana Kab/Kota belum melihat adanya potensi yang lebih besar jika mereka melakukan sinergi

4. Pertanyaan tentang keterkaitan antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur

Jawaban: Keterkaitan antara daerah-daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur sangat kuat terjadi di wilayah Pantura yaitu Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak serta jalur selatan Semarang-Solo yang meliputi Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

5. Pertanyaan tentang pembangunan ekonomi wilayah

Jawaban: Banyak sekali para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di wilayah Kedungsepur, sektor Industri yang paling banyak diminati diantaranya mebel, tekstil dan produk tekstil, serta komponen elektronik. Sektor pertanian sebenarnya cukup potensial dikembangkan di wilayah ini terutama di Kabupaten Demak dan Grobogan terutama dalam mendukung supply bahan baku industri pengolahan makanan yang ada di Kota Semarang. Kerjasama dalam pengembangan infrastruktur juga sangat potensial dikembangkan di wilayah Kedungsepur, seperti pengolahan air bersih, peningkatan jalan dan jembatan serta perencanaan tata ruang.

6. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Faktor kesamaan budaya dan potensi sumber daya alam serta didukung oleh lokasi kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional

7. Pertanyaan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur.

Jawaban: Untuk mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kedungsepur diperlukan kerjasama semua pihak khususnya pada unsur birokrasi pemerintah yang didukung oleh sektor swasta. Promosi bersama potensi dan peluang investasi kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur sangat strategis dilakukan karena investasi memiliki *multiplier effect* guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

8. Pertanyaan tentang potensi unggulan

Jawaban: Potensi unggulan di wilayah Kedungsepur adalah pada sektor industri, terutama industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu/mebel serta pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, air bersih serta kawasan industri di wilayah *hinterland* Semarang

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG EKONOMI
BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL 27 OKTOBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan Pemerintah daerah terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Bappeda Provinsi Jawa Tengah mendukung rencana terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur dan bertindak selaku koordinator Kabupaten/Kota se wilayah Kedungsepur serta mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui Dinas/Instansi teknis tingkat Provinsi seperti BPMD dan Dinas Kimtaru.

2. Pertanyaan tentang kebijakan – kebijakan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Melakukan revisi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya memuat Satuan Wilayah Pembangunan I yaitu Wilayah Kedungsepur.

3. Pertanyaan tentang kendala serta hambatannya

Jawaban : Kendala yang dihadapi adalah masing banyaknya program-program kegiatan di wilayah ini yang belum sinkron, misalnya penentuan Wilayah Industri pada daerah perbatasan yang berdekatan dengan kawasan pemukiman

4. Pertanyaan tentang keterkaitan antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur

Jawaban: Keterkaitan dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja di kota Semarang yang berasal dari wilayah-wilayah disekitarnya

seperti Kendal, Demak dan Ungaran serta distribusi barang kebutuhan pokok di kota Semarang juga banyak disuplai dari wilayah disekitar kota Semarang. Perkembangan kota Semarang mengarah ke sektor jasa dan perdagangan serta merupakan pintu gerbang bagi siapa saja yang akan mengakses wilayah-wilayah disekitarnya.

5. Pertanyaan tentang pembangunan ekonomi wilayah

Jawaban: Untuk menunjang pembangunan ekonomi wilayah, maka diperlukan penataan kembali kawasan industri yang ada di kota Semarang. Kawasan industri yang selama ini terpusat di kota semarang terlalu membebani kota. Untuk itu kedepan, daerah-daerah di sekitar kita Semarang harus dikembangkan agar dapat menunjang pendirian kawasan industri, terutama industri berat dan padat karya. Kota Semarang lebih cocok untuk industri-industri padat modal, bukan industri berat seperti manufaktur karena kebutuhan ruang industri padat modal tidak sebesar industri padat karya. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja untuk industri padat modal tidak sebanyak industri padat karya sehingga arus perpindahan penduduk di Kota Semarang dapat ditekan.

6. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Faktor lokasi kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional serta keuntungan komparatif wilayah

7. Pertanyaan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur.

Jawaban: Untuk mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kedungsepur diperlukan kerjasama semua pihak serta menyatukan persepsi masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kegiatan sehingga dapat tercipta sinergi kegiatan yang positif.

8. Pertanyaan tentang potensi unggulan

Jawaban: Industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, kayu, peternakan, perikanan dan hasil kelautan, pertambangan (pasir besi), perdagangan dan jasa-jasa, termasuk simpul transportasi provinsi, nasional dan internasional, simpul pariwisata dan pendidikan tinggi bertaraf internasional.

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SEMARANG
TANGGAL 10 NOPEMBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan Pemerintah daerah terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Guna mendukung terealisasinya kerjasama regional Kedungsepur, tiap Kabupaten/Kota memberikan kontribusi anggaran sebesar Rp. 200 juta melalui APBD Kab/Kota

2. Pertanyaan tentang kebijakan – kebijakan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan No. 130.1/A. 00016 Tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur. Surat Keputusan ini sebagai dasar ditertapkannya MoU kerjasama Kedungsepur yang ditandatangani oleh 6 (enam) Bupati/Walikota sewilayah Kedungsepur pada tanggal 15 Juni 2005

3. Pertanyaan tentang kendala serta hambatannya

Jawaban : Adanya kendala penggunaan APBD Kab/Kota untuk membiayai operasional Sekretariat Bersama Kedungsepur, yang oleh BPK hal ini dapat menjadi permasalahan

4. Pertanyaan tentang keterkaitan antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur

Jawaban: Keterkaitan antara Kota Semarang dengan wilayah sekitarnya adalah dari banyaknya tenaga kerja di kota Semarang yang berasal dari wilayah-wilayah disekitarnya seperti Kendal, Demak dan Ungaran.

5. Pertanyaan tentang pembangunan ekonomi wilayah

Jawaban: Dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah, Semarang memiliki peranan yang cukup dominan karena Semarang dapat dilihat melalui dua sisi. Pertama adalah fungsi kota Semarang sebagai ibu kota provinsi dimana seluruh kegiatan kewilayahn akan berpusat disini dan yang kedua adalah posisi kota Semarang yang strategis didukung oleh tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan laut dan bandara.

6. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendukung terjalinnya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Faktor kebersamaan serta kemauan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur dalam rangka meningkatkan daya saing di era globalisasi

7. Pertanyaan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur.

Jawaban: Untuk mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kedungsepur diperlukan kemauan setiap Kabupaten/Kota serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta dunia usaha

8. Pertanyaan tentang potensi unggulan

Jawaban: Industri kecil yang terdiri dari industri kimia, agro, hasil hutan, makanan, minuman, mebel, percetakan, industri logam serta industri aneka.

Selain sekktor industri, potensi unggulan kota semarang meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perhotelan dan pariwisata.

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN SEMARANG
TANGGAL 2 DESEMBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan Pemerintah daerah terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Guna mendukung terealisasinya kerjasama regional Kedungsepur, tiap Kabupaten/Kota memberikan kontribusi anggaran sebesar Rp. 200 juta melalui APBD Kab/Kota

2. Pertanyaan tentang kebijakan – kebijakan yang mengarah pada terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Surat Keputusan No. 130/02646 Tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur. Surat Keputusan ini sebagai dasar ditertapkannya MoU kerjasama Kedungsepur yang ditandatangani oleh 6 (enam) Bupati/Walikota sewilayah Kedungsepur pada tanggal 15 Juni 2005

3. Pertanyaan tentang kendala serta hambatannya

Jawaban : Adanya kendala penggunaan APBD Kab/Kota untuk membiayai operasional Sekretariat Bersama Kedungsepur, yang oleh BPK hal ini dapat menjadi permasalahan.

4. Pertanyaan tentang keterkaitan antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur

Jawaban: Keterkaitan antara Kabupaten Semarang dengan wilayah sekitarnya yang paling menonjol terjadi dengan Kota Semarang, hal ini didukung oleh

adanya jalur transportasi antara kedua wilayah yang cukup memadai, selain itu Kabupaten Semarang merupakan wilayah penyangga bagi kota Semarang

5. Pertanyaan tentang pembangunan ekonomi wilayah

Jawaban: Dalam tahun anggaran 2007 s/d 2013 direncanakan beberapa kegiatan yang mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan iklim usaha kondusif diantaranya: Pelayanan Perizinan Satu Pintu, pengembangan infrastruktur, kepastian hukum, promosi investasi bersama, peningkatan SDM dan kajian peluang investasi.

6. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Faktor kebersamaan serta kemauan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah.

7. Pertanyaan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah kedungsepur.

Jawaban: Untuk mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kedungsepur diperlukan kemauan setiap Kabupaten/Kota serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta dunia usaha.

8. Pertanyaan tentang potensi unggulan

Jawaban: Potensi Unggulan: budidaya sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan peternakan sapi. Selain itu Kabupaten Semarang memiliki potensi sektor pariwisata yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah yang terbagi menjadi sembilan klaster yang meliputi : klaster Ungaran, Bawen, Bandungan-Gedongsongo, Sumowono, Ambarawa, Jambu, Rawa

Pening, Kopeng dan klaster Tengaran. Dari sembilan klaster tersebut terdapat obyek wisata unggulan yaitu: Wana Wisata Penggaron, Agrowisata Asinan, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api Ambarawa, Agrowisata Banaran dan Mata Air Senjoyo.

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA KADINDA JAWA
TENGAH TANGGAL 15 NOPEMBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan Kadin terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Secara langsung dukungan Kadin yang berupa anggaran memang tidak ada, akan tetapi Kadin berperan secara aktif dalam forum-forum diskusi dengan pemerintah daerah guna mendorong terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur.

2. Pertanyaan tentang kendala dan hambatannya

Jawaban: Kendala yang dihadapi adalah masih adanya ego kepala daerah Kabupaten/Kota yang merasa bahwa mereka bisa melakukan kegiatan pengembangan ekonomi daerahnya dengan meningkatkan PAD tanpa melalui kerjasama antar daerah.

3. Pertanyaan tentang keterkaitan yang terjadi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur.

Jawaban: Keterkaitan dalam sektor Industri di Wilayah Kedungsepur salah satunya dapat dilihat pada industri unggulan di Jawa Tengah yaitu industri Tekstil dan Produk Tekstil. Salah satu industri Tekstil terbesar di Asia Tenggara adalah PT. Apac Inti Corpora yang terdapat di Kabupaten Semarang. Industri ini selain berorientasi ekspor juga memasok kebutuhan bahan baku kain bagi industri-industri garmen di kota Semarang, kabupaten Demak dan kabupaten Kendal serta Kota Salatiga. Disamping itu kebutuhan akan tenaga kerja walaupun sebagian besar dipenuhi dari kabupaten Semarang

sendiri, sebagai tenaga kerja juga dipenuhi dari kota Semarang dan kota Salatiga.

4. Pertanyaan tentang pengaruh aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja dalam pengembangan dunia usaha di Kedungsepur.

Jawaban: Keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur sangat mempengaruhi pengembangan dunia usaha di wilayah ini, misalnya banyak industri di kota Semarang sangat tergantung oleh wilayah sekitarnya seperti Kab.Kendal, Semarang dan Demak dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Demikian pula sebaliknya banyak sekali industri kecil dan menengah di wilayah *hinterland* Semarang yang memasarkan produknya di kota Semarang.

5. Pertanyaan tentang daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi paling kuat.

Jawaban: Keterkaitan ekonomi paling kuat terjadi pada daerah-daerah di jalur Pantura, yaitu antara Kota Semarang – Kendal dan Semarang – Demak serta pada jalur Semarang – Solo, yaitu Kota Semarang dengan Ungaran dan Salatiga. Selanjutnya untuk wilayah ”pinggiran” seperti Ungaran – Kendal, Ungaran – Demak dan Purwodadi, keterkaitan yang terjadi relatif kecil karena jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut belum memadai.

6. Pertanyaan tentang bidang usaha yang paling menonjol

Jawaban: Kendal: industri otomotif dan komponennya, Demak: industri mebel dan kayu olahan, Kab. Semarang & Salatiga: tekstil dan produk tekstil Kota Semarang: jasa dan perdagangan.

7. Pertanyaan tentang pentingnya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Kerjasama Regional Kedungsepur diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah baik di tingkat regional, nasional maupun global karena dengan kerjasama ini akan lebih memperluas potensi dan peluang wilayah dibandingkan jika tiap daerah kabupaten/kota melakukannya sendiri –sendiri.

8. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang merupakan prioritas dalam mendukung terjalinnya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Untuk mendorong akselerasi terciptanya kerjasam Kedungsepur diperlukan adanya kesadaran dari setiap kepala daerah bahwa dengan bekerjasama antar daerah dapat meningkatkan dampak positif menjadi suatu kekuatan yang lebih besar.

9. Pertanyaan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan siapa saja yang seharusnya berperan.

Jawaban: Perkembangan wilayah Kedungsepur ini kedepan berkaitan erat dengan fungsi Kota Semarang sebagai financial hub dan logistic hub. Industri besar sudah tidak cocok bagi kota Semarang, industri ini harus ditempatkan di wilayah penyangga Semarang seperti Demak, Kendal dan Kabupaten Semarang sehingga dapat mengurangi beban arus tenaga kerja commuter yang cukup besar di wilayah ini. Untuk mendorong Kedungsepur sebagai wilayah Metropolitan, kota Semarang harus menjadi pelopor

terrealisasinya kerjasama regional Kedungsepur dengan memberikan semacam insentif bagi daerah penyangga karena secara ekonomi kota Semarang lebih diuntungkan

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA HIMPUNAN
KAWASAN INDUSTRI KOTA SEMARANG
TANGGAL 28 NOPEMBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan HKI terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: Selain ikut berperan secara aktif dalam forum-forum diskusi dengan pemerintah daerah guna mendorong terbentuknya kerjasama regional Kedungsepur, HKI juga mendorong perluasan kawasan industri ke wilayah *hinterland* Semarang.

2. Pertanyaan tentang kendala dan hambatannya

Jawaban: Pertemuan-pertemuan dalam rangka pembahasan rencana kerjasama masih terbatas pada lingkungan birokrasi saja, belum banyak melibatkan sektor swasta serta belum fokus pada tujuan yang akan dicapai. .

3. Pertanyaan tentang keterkaitan yang terjadi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur.

Jawaban: Keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur dapat dilihat pada sektor industri, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja antar daerah yang cukup besar. Sebagian besar industri-industri di kota Semarang, terutama yang berlokasi di kawasan industri, tenaga kerja diperoleh dari daerah sekitar. Seperti pada Kawasan Industri Terboyo dan Kawasan Industri Tanah Makmur banyak menggunakan tenaga kerja dari kabupaten Demak dan industri-industri yang berlokasi di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru dan Kawasan Industri Candi banyak menggunakan tenaga kerja dari kabupaten Kendal. Bahkan tenaga kerja dari wilayah kabupaten Semarang juga banyak memenuhi kebutuhan industri-industri di

kota Semarang seperti industri-industri yang terdapat di Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ)

4. Pertanyaan tentang pengaruh aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja dalam pengembangan dunia usaha di Kedungsepur.

Jawaban: Aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja yang sangat efektif akan memberikan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha di wilayah Kedungsepur. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang efisien dan konsisten bagi lokasi-lokasi industri di wilayah ini.

5. Pertanyaan tentang daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi paling kuat.

Jawaban: Dibandingkan dengan Semarang – Demak, Keterkaitan ekonomi antara Semarang – Kendal lebih baik hal ini disebabkan karena Demak ditarik oleh dua magnet yaitu Semarang dan Kudus. Keterkaitan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang dan Salatiga juga cukup kuat karena didukung oleh banyaknya industri pada wilayah tersebut. Sedangkan wilayah lainnya . seperti Kab. Semarang – Kendal, dan Kab. Semarang – Demak, keterkaitan yang terjadi relatif kecil.

6. Pertanyaan tentang bidang usaha yang paling menonjol

Jawaban: Sektor pertanian khususnya sayur-sayuran dari wilayah kabupaten Semarang memiliki peluang yang cukup besar untuk memasok kebutuhan sayur kering pada industri mi instan di kota Semarang. Namun sampai saat ini belum ada investor yang tertarik untuk mengolah sayur-sayuran yang

jumlahnya cukup melimpah di wilayah kabupaten Semarang ini. Sementara itu industri mi instan masih mengimpor sayur kering dari luar negeri..

7. Pertanyaan tentang pentingnya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Kerjasama Regional Kedungsepur diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan keuangan

8. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang merupakan prioritas dalam mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Faktor yang paling penting adalah adanya kesamaan visi pembangunan pada setiap daerah dalam rangka pengembangan ekonomi regional.

9. Pertanyaan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan siapa saja yang seharusnya berperan.

Jawaban: Daerah harus segera melakukan aksi dengan menunjuk Regional Manager yang profesional untuk mengelola organisasi kerjasama antar daerah karena organisasi ini tidak mungkin dikelola oleh birokrat murni yang masing-masing telah mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri.

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA FEDEP
KABUPETEN DEMAK
TANGGAL 20 NOPEMBER 2008

1. Pertanyaan tentang dukungan FEDEP terhadap kerjasama regional Kedungsepur

Jawaban: FEDEP ikut serta dalam perencanaan penyusunan rencana program yang berkaitan dengan peluang usaha serta merintis kerjasama antar FEDEP se wilayah Kedungsepur.

2. Pertanyaan tentang kendala dan hambatannya

Jawaban: Masih banyak dijumpai peluang usaha yang bersifat internal daerah, belum mengarah pada peluang usaha yang lebih luas yang mencakup antar daerah.

3. Pertanyaan tentang keterkaitan yang terjadi antara daerah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur.

Jawaban: Keterkaitan antara sektor Pertanian dan Industri di wilayah Kedungsepur masih belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak sekali potensi sektor pertanian yang belum diolah secara maksimal seperti hasil buah-buahan yang dapat diolah menjadi sari buah ataupun buah kaleng.

4. Pertanyaan tentang pengaruh aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja dalam pengembangan dunia usaha di Kedungsepur.

Jawaban: Aliran distribusi barang, bahan baku dan tenaga kerja sangat menentukan dalam pengembangan dunia usaha karena adanya distribusi yang lancar akan sangat membantu perkembangan dunia usaha..

5. Pertanyaan tentang daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi paling kuat.

Jawaban: Kabupaten Demak memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Kota Semarang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kedungsepur.

6. Pertanyaan tentang bidang usaha yang paling menonjol

Jawaban: Saat ini hasil buah-buahan dari kabupaten Demak yang cukup potensial untuk diolah adalah belimbing demak, jamu merah delima dan pisang. Dalam tiga tahun terakhir hasil produksinya meningkat secara signifikan terutama di Kecamatan Demak dan Wonosalam, Karanganyar dan wilayah lainnya. Surplus produksi beras telah mendorong berkembangnya usaha penggilingan padi sebanyak 164 unit dan yang terbesar adalah **Mutiara Prima (Demak)**. Masih terbuka kesempatan bagi pemilik modal untuk menanamkan investasinya dibidang pengadaan bibit, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan beras dan tepung beras. Terbukanya prospek investasi untuk pengolahan jagung menjadi bahan makanan olahan, pakan ternak dan lain-lain serta kacang hijau menjadi berbagai produk olahan dan pembuatan tepung dengan daerah pemasaran yang masih terbuka lebar yaitu di wilayah Kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Kudus dan kota-kota besar lainnya. Kabupaten Demak memiliki potensi perikanan yang melimpah baik perikanan laut dan perikanan darat. Pemerintah daerah sedang giat mengembangkan usaha perikanan yaitu melengkapi TPI Morodemak (Bonang) dengan pabrik es, stasiun pengisian BBM untuk nelayan dan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil

perikanan, pengolahan teri nasi, rajungan, tenggiri, tongkol masih terbuka pasar ekspor.

7. Pertanyaan tentang pentingnya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Sebagai pendorong dalam mengefektifkan potensi serta peluang yang ada di wilayah Kedungsepur.

8. Pertanyaan tentang faktor-faktor yang merupakan prioritas dalam mendukung terjalannya kerjasama regional Kedungsepur.

Jawaban: Adanya semangat otonomi yang benar, yaitu semangat untuk bekerjasama antar daerah dalam memajukan perekonomian secara bersama bukan semangat untuk saling bersaing sehingga lupa akan melihat potensi yang lebih besar jika melakukan kerjasama.

9. Pertanyaan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan siapa saja yang seharusnya berperan.

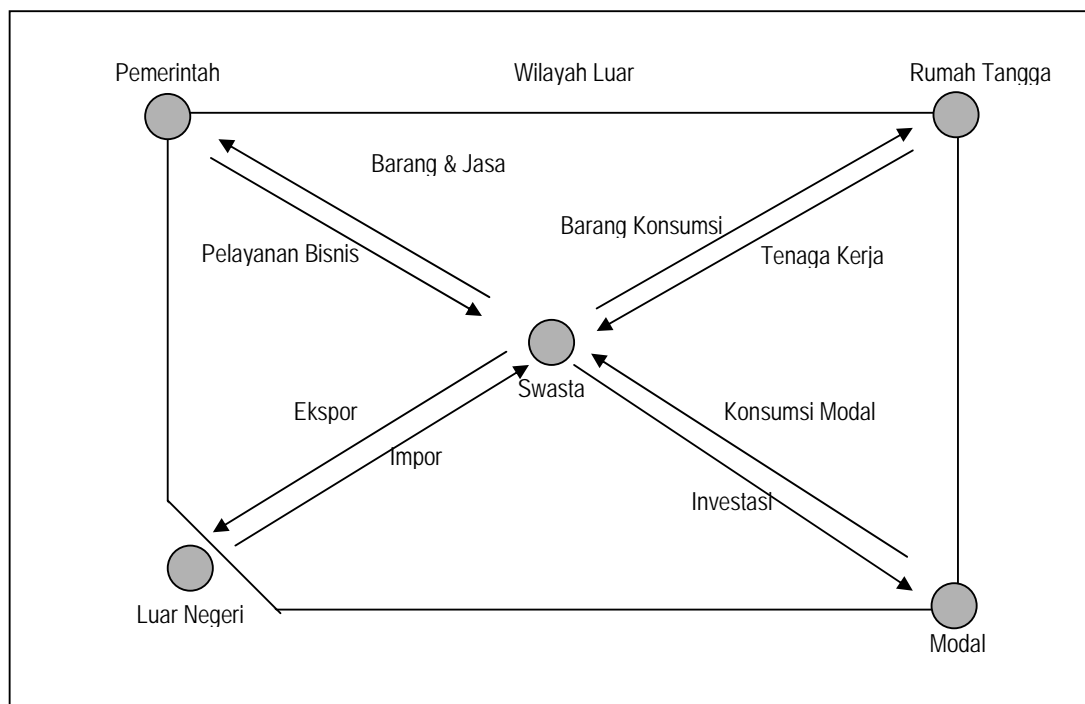
Jawaban: Terbentuknya kerjasama Kedungsepur merupakan kenisnacaan, apalagi kalau kita melihat daerah lain memiliki semangat yang sama dan mereka juga bisa. Untuk itu diperlukan peran semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.

ANALISIS INPUT-OUTPUT

Analisis Input-Output merupakan teknik analisis antar sektor. Sistem input-output disusun berdasarkan asumsi perilaku ekonomi yang merupakan penyederhanaan kerangka untuk mengukur aliran masukan (input) dan keluaran (output) berbagai sektor kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Model I-O ini dikembangkan oleh Leontief yang mengembangkan sistem perhitungan antar industri. Sistem perhitungan ini mengikuti arus barang dan jasa dari satu sektor produksi ke sektor lainnya. Tiap sektor akan dihitung dua kali dan tampil sebagai produsen (mengeluarkan output) dan konsumen (menggunakan input). Intisari skema input-output merupakan satu kesatuan perhitungan yang menunjukkan transaksi antar sektor utama (Hoover, 1975: 223-225) yaitu:

- Sektor antara (intermediate), berupa aktivitas-aktivitas swasta yang diperlakukan sebagai sektor antar industri, karena aktivitas input-output yang terjadi antar industri itu sendiri, yang meliputi aktivitas pertambangan, pengolahan bahan makanan, bangunan dan barang kimia
- Sektor rumah tangga (household), merupakan perseorangan yang diperlakukan baik sebagai konsumen barang dan jasa maupun sebagai penjual (terutama jasa buruh yang mereka miliki).

GAMBAR ALIRAN BARANG DAN JASA ANTAR SEKTOR DALAM SUATU WILAYAH



- Sektor Pemerintah (government), mencakup pemerintahan pusat, maupun lokal/daerah, baik di dalam maupun di luar wilayah.
- Sektor dunia luar (outside world), berupa aktivitas-aktivitas non pemerintahan di luar wilayah
- Sektor modal (capital), berupa persediaan modal swasta baik modal tetap maupun investasi.

Secara sederhana bentuk Tabel Input-Output wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

GAMBAR BENTUK SEDERHANA TABEL INPUT-OUTPUT WILAYAH

| Output Input | Industri (Intermediate) | | | Permintaan Akhir | | | | Total Output |
|--|----------------------------|---|---|------------------|------------------|--------|-------|-----------------|
| | A | B | C | Rumah Tangga | Pemerin tahan | Ekspor | Modal | |
| Industri A B C | - | - | - | | | | | |
| Sektor Penyedia Utama: • Rumah Tangga • Pemerintahan • Ekspor • Modal | | | | - | - | - | - | |
| Total Input | | | | | | | | |

Sumber: Hoover, 1975: 224 dan Glasson dalam Sitohang, 1977:57

Penyusunan Tabel I-O berdasarkan gabungan informasi dari berbagai lembaga. Di Indonesia penyusunan Tabel I-O ini melibatkan berbagai departemen dan bermacam-macam lembaga, tergantung dari sektor-sektor yang ditanganinya. Sebagai contoh data pertanian, diambil dari dua sumber, yaitu Biro Pusat Statistik dan Departemen Pertanian dan masih banyak lembaga terkait pada masing-masing sektor ekonomi.. Pengumpulan dan pengurutan data kuantitatif di atas memerlukan waktu dan biaya yang banyak, bahkan untuk validasi data perlu dilakukan survei baik dengan cara sampel atau sensus.

Manfaat penggunaan model I-O terdiri atas manfaat yang bersifat analisis yang mampu memberikan besaran-besaran kuantitatif aspek ekonomi yang ditelaah dan manfaat diskriptif yang dapat menggambarkan hubungan timbal balik antar sektor kegiatan ekonomi, memperlihatkan proses kegiatan ekonomi yang terjadi pada waktu tertentu, memperlihatkan sifat struktural perekonomian dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Besarnya manfaat model I-O mendorong ahli-ahli perencanaan wilayah untuk mempergunakannya, namun hambatan yang dihadapi dalam pembuatan tabel I-O wilayah adalah waktu survei yang sangat lama dan mahalnya biaya

untuk melakukan survei tersebut. Untuk mengantisipasinya diterapkan metode non-survei dengan menggunakan data-data sekunder/statistik yang sudah ada (Thomas, 1982: 44-45). Sebagian besar ahli membuat Tabel I-O wilayah dengan cara menurunkan Tabel I-O nasional dengan berbagai teknik, seperti: pendekatan quotient (LQ-Location Quotient, CIQ-Cross Industry Quotient dan SLQ-Semi Logarithmic Quotient), pendekatan penawaran dan permintaan atau teknik interasi matriks. Khusus pada pendekatan quotient, hasil yang diperoleh baik melalui LQ, CIQ, atau SLQ adalah hampir sama. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan LQ.

Langkah-langkah penurunan Tabel I-O Jawa Tengah menjadi Tabel I-O wilayah Kedungsepur dapat dilakukan sebagai berikut (Uguy, 1980: 72-77)

- Pemilihan Tabel I-O Jawa Tengah

Tabel I-O Jawa Tengah terdiri dari tabel dasar dan tabel analisis yang merupakan penurunan dari tabel dasar. Tabel dasar adalah tabel yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi. Tabel dasar ini terdiri atas: tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, tabel transaksi total atas dasar harga produsen dan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dalam penelitian ini digunakan tabel transaksi total atas dasar harga produsen karena tabel ini menyajikan hubungan langsung antar sektor tanpa dipengaruhi oleh biaya transportasi.

- Pengelompokan sektor-sektor ekonomi

Maksud pengelompokan ini untuk meningkatkan daya guna analisis dan berdasarkan ketersediaan data yang ada. Tabel I-O Jawa Tengah tahun 2004 terdiri atas 2 macam, yaitu tabel I-O 19 sektor dan tabel I-O 89 sektor. Dalam penelitian ini tabel I-O 19 sektor akan direduksi menjadi 9 sektor, klasifikasi berdasarkan kegiatan sejenis atau yang mendekati (tabel Klasifikasi, terlampir)

- Estimasi Koefisien I-O wilayah

Estimasi ini menggunakan metode Location Quotient. Nilai $LQ > 1$ atau $LQ = 1$, maka nilai koefisien Jawa Tengah dapat langsung diserap sebagai nilai koefisien wilayah Kedungsepur. Sedangkan $LQ < 1$ maka nilai quotient tersebut harus dikalikan angka koefisien Jawa Tengah untuk menyerapnya sebagai nilai koefisien wilayah Kedungsepur

- Penurunan Tabel Transaksi/Tabel I-O

Bagi sektor-sektor yang memiliki nilai koefisien ≥ 1 , perilaku Jawa Tengah dalam tabel I-O Jawa Tengah dapat langsung diturunkan menjadi perilaku wilayah dalam tabel I-O wilayah (penurunan perilaku dilakukan per kolom). Sedangkan sektor yang memiliki koefisien < 1 , transaksi dikalikan dengan koefisien wilayah.

**TABEL INPUT-OUTPUT JAWA TENGAH KLASIFIKASI 19 SEKTOR
TAHUN 2004 (Jutaan Rupiah)**

| Sektor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.166.672,84 | 0,00 | 4.186,57 | 158.844,65 | 0,00 | 3.371,01 | 0,00 | 10.221.309,60 | 26.785,13 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 571.641,74 | 538,41 | 43.866,01 | 0,00 | 1.692,74 | 0,00 | 2.453.796,71 | 3.955,17 | 0,00 |
| 3 | 2.681,26 | 1.213,30 | 75.723,68 | 1.072,39 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 4.684.873,63 | 1.334.323,62 | 0,08 |
| 4 | 42.972,75 | 226.545,10 | 50.773,27 | 18.497,38 | 0,00 | 3.256,45 | 0,00 | 172.525,39 | 93.119,50 | 0,00 |
| 5 | 53,91 | 474,57 | 2.304,19 | 469,59 | 8.351,83 | 632,67 | 1.062,61 | 445,01 | 2.504.087,62 | 0,00 |
| 6 | 52.504,30 | 4.107,10 | 14.997,50 | 1.924,79 | 5.154,50 | 31.634,06 | 0,00 | 545.579,06 | 6.644,83 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 34.493,09 | 650.171,76 | 3.650.598,12 | 32.396.878,05 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 15.166,06 | 2.241.730,43 | 0,00 | 186.422,64 | 0,00 | 6.475.973,82 | 2.205.765,60 | 0,00 |
| 9 | 307.536,19 | 243.688,71 | 458.888,43 | 8.039,07 | 14.448,22 | 34.869,52 | 47.637,91 | 5.795.610,22 | 26.260.532,98 | 201,31 |
| 10 | 305,64 | 4.794,21 | 25.752,36 | 1.984,03 | 27.844,71 | 99.891,01 | 89.775,30 | 2.122.376,38 | 1.735.926,43 | 268,23 |
| 11 | 0,00 | 81,80 | 2.957,86 | 1.158,65 | 2.731,91 | 473,23 | 825,54 | 213.915,20 | 1.253.346,46 | 35,11 |
| 12 | 7.704,84 | 16.856,15 | 80.831,65 | 1.772,39 | 35.247,14 | 2.772,38 | 66.279,17 | 31.934,75 | 69.359,67 | 43,17 |
| 13 | 64.446,03 | 474.130,94 | 119.230,36 | 280.240,37 | 13.803,49 | 82.334,01 | 52.567,91 | 7.560.367,22 | 7.181.424,79 | 642,61 |
| 14 | 0,00 | 8.132,76 | 15.064,17 | 220,35 | 17.263,72 | 13.250,15 | 55.010,47 | 2.938.700,77 | 567.421,80 | 47,29 |
| 15 | 35.435,97 | 42.605,99 | 53.636,82 | 42.341,38 | 11.070,77 | 17.521,89 | 56.426,32 | 2.571.139,74 | 2.039.926,11 | 15.281,60 |
| 16 | 11.788,02 | 2.499,19 | 4.964,52 | 1.390,63 | 4.545,68 | 4.429,86 | 5.651,36 | 447.055,86 | 238.918,74 | 23,13 |
| 17 | 0,00 | 229,49 | 1.761,46 | 172,09 | 0,00 | 543,55 | 359,03 | 34.071,73 | 26.686,13 | 3,16 |
| 18 | 2.583,20 | 1.804,30 | 7.960,66 | 494,33 | 9.132,08 | 724,44 | 9.090,73 | 489.522,07 | 81.591,26 | 23,05 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 1.694.684,95 | 1.598.805,35 | 934.738,62 | 2.804.266,19 | 149.594,05 | 483.824,72 | 419.179,44 | 47.409.368,92 | 49.280.413,96 | 32.413.446,79 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 1.460.935,85 | 2.601.476,50 | 943.361,85 | 1.794.601,41 | 153.160,77 | 377.068,15 | 628.740,38 | 4.687.778,25 | 6.599.590,50 | 4.038.935,92 |
| 202 | 8.110.125,20 | 14.169.619,37 | 2.429.414,93 | 3.335.101,04 | 530.765,62 | 1.475.595,53 | 990.870,63 | 8.531.625,69 | 9.532.329,57 | 9.815.874,08 |
| 203 | 184.867,25 | 73.725,54 | 132.229,23 | 106.894,80 | 41.069,55 | 81.255,24 | 177.297,72 | 2.232.111,15 | 2.249.015,89 | 3.594.797,86 |
| 204 | 150.316,68 | 160.598,96 | 69.518,39 | 56.730,49 | 14.971,96 | 38.717,29 | 58.220,88 | 10.575.384,32 | 995.285,83 | 329.886,24 |
| 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.031,91 | 0,00 |
| 209 | 9.906.244,98 | 17.005.420,37 | 3.574.524,40 | 5.293.327,74 | 739.967,90 | 1.972.636,21 | 1.855.129,61 | 26.026.899,41 | 19.330.189,88 | 17.779.494,10 |
| 210 | 11.600.929,93 | 18.604.225,72 | 4.509.263,02 | 8.097.593,93 | 889.561,95 | 2.456.460,93 | 2.274.309,05 | 73.436.268,33 | 68.610.603,84 | 50.192.940,89 |

Lanjutan

| Sektor | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 180 |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|----------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 4.173,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958,72 | 847,36 | - | 11.593.149,47 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 10.292,41 | 417.593,62 | 5.151,10 | 0,40 | 340.382,14 | 24.091,21 | - | 3.873.001,66 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1.422,84 | 46.558,95 | 878,24 | 18,86 | 7.368,80 | 11.103,29 | - | 6.167.244,05 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.781,11 | 16.598,82 | 4,60 | 82.434,33 | 11.244,24 | - | 1.315.752,94 |
| 5 | 0,16 | 730.689,95 | 727,23 | 998,11 | 349,83 | 3,29 | 665,23 | 863,30 | - | 3.252.179,10 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.167,12 | 2.770,41 | 935,06 | 31.426,19 | 4.137,05 | - | 850.981,97 |
| 7 | 3.821.928,99 | 2.471.528,83 | 1.469,87 | 8,16 | 14.530,92 | 0,00 | 124.828,29 | 59.498,30 | - | 43.225.982,69 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 41.809,01 | 3.093.659,02 | 337.385,82 | 111.408,98 | 1.000.455,94 | 148.946,43 | - | 15.858.723,75 |
| 9 | 54.439,06 | 8.263.868,54 | 2.168.926,27 | 19.303,03 | 1.203.386,39 | 123.031,43 | 1.856.358,78 | 1.081.466,04 | - | 47.942.232,10 |
| 10 | 232.037,78 | 2.116.349,07 | 1.863.085,24 | 22.434,96 | 2.279.784,99 | 80.346,99 | 542.783,92 | 32.372,16 | - | 11.278.113,41 |
| 11 | 235.147,00 | 36.049,08 | 2.142.973,69 | 29.252,07 | 150.104,09 | 64.544,08 | 323.553,75 | 108.440,29 | - | 4.565.589,81 |
| 12 | 18.614,28 | 23.641,69 | 766.675,34 | 4.986,11 | 304.484,33 | 761.345,35 | 670.203,34 | 21.958,96 | - | 2.884.710,71 |
| 13 | 187.367,47 | 3.092.110,60 | 1.153.606,02 | 2.336.010,73 | 1.364.670,21 | 129.491,86 | 1.455.614,64 | 600.225,88 | - | 26.148.285,14 |
| 14 | 2.248,79 | 491.334,88 | 3.205.163,08 | 7.639,27 | 524.405,79 | 133.169,46 | 2.384.730,61 | 85.969,17 | - | 10.449.772,53 |
| 15 | 53.824,96 | 627.842,30 | 3.154.813,50 | 106.349,79 | 1.145.845,35 | 209.688,54 | 602.850,55 | 114.877,55 | - | 10.901.479,13 |
| 16 | 11.179,66 | 298.107,94 | 1.933.246,99 | 8.412,63 | 295.554,64 | 303.099,27 | 95.611,40 | 63.160,04 | - | 3.729.639,56 |
| 17 | 541,17 | 47.774,97 | 7.603,77 | 7.138,27 | 126.099,23 | 223.630,03 | 139.909,75 | 18.935,31 | - | 635.459,14 |
| 18 | 8.496,34 | 177.904,37 | 444.544,14 | 7.637,84 | 599.773,63 | 112.555,28 | 351.379,31 | 135.463,65 | - | 2.440.680,68 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 190 | 4.625.825,66 | 18.377.202,22 | 16.900.532,99 | 6.854.930,79 | 8.371.773,79 | 2.253.273,48 | 10.017.515,69 | 2.523.600,23 | - | 207.112.977,84 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 201 | 640.438,82 | 5.098.311,55 | 7.220.385,39 | 1.874.664,22 | 2.748.959,28 | 636.184,20 | 14.608.232,07 | 2.337.692,18 | - | 58.450.517,29 |
| 202 | 1.386.839,01 | 3.736.349,38 | 21.071.565,30 | 3.823.743,02 | 4.450.331,66 | 5.608.393,56 | 0,00 | 1.444.455,60 | - | 100.442.999,19 |
| 203 | 1.240.486,04 | 1.256.131,90 | 1.793.730,19 | 447.341,32 | 3.401.034,93 | 585.897,41 | 737.005,91 | 383.670,52 | - | 18.718.562,45 |
| 204 | 63.830,71 | 808.338,83 | 2.214.756,10 | 496.802,50 | 368.476,94 | 310.060,79 | 0,00 | 136.473,75 | - | 16.848.370,66 |
| 205 | -969.681,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | -1.025.186,54 |
| 209 | 2.361.913,35 | 10.899.131,66 | 32.300.436,98 | 6.642.551,06 | 10.959.329,41 | 7.140.535,96 | 15.345.237,98 | 4.302.292,05 | - | 193.435.263,05 |
| 210 | 6.987.739,01 | 29.276.333,88 | 49.200.969,97 | 13.497.481,85 | 19.331.103,20 | 9.393.809,44 | 25.362.753,67 | 6.825.892,28 | - | 400.548.240,89 |

**PERBEDAAN KLASIFIKASI 9 SEKTOR DAN 19 SEKTOR
TABEL INPUT-OUTPUT REGIONAL JAWA TENGAH 2004**

| Kode 9 Sektor | Nama Sektor | Kode 19 Sektor | Nama Sektor |
|---------------|---|----------------|---|
| 1 | Pertanian | 1 | Padi |
| | | 2 | Tanaman Bahan Makanan Lainnya |
| | | 3 | Tanaman Pertanian Lainnya |
| | | 4 | Peternakan dan Hasil-hasilnya |
| | | 5 | Kehutanan |
| | | 6 | Perikanan |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 7 | Pertambangan dan Penggalian |
| 3 | Industri Pengolahan | 8 | Industri Makanan, Minuman dan Tembakau |
| | | 9 | Industri Lainnya |
| | | 10 | Industri Pengilangan Minyak |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Minum | 11 | Listrik, Gas dan Air Minum |
| 5 | Bangunan | 12 | Bangunan |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 13 | Perdagangan |
| | | 14 | Restoran dan Hotel |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 15 | Pengangkutan dan Komunikasi |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 16 | Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan |
| | | 17 | Pemerintahan Umum dan Pertahanan |
| 9 | Jasa-jasa | 18 | Jasa-jasa |
| | | 19 | Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya |

**TABEL KOEFISIEN INPUT WILAYAH JAWA TENGAH
TAHUN 2004**

| Sektor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 0,0541 | 0,0005 | 0,1147 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0196 | 0,0013 | 0,0135 | 0,0077 | 0,0675 |
| 2 | 0,0000 | 0,0152 | 0,1909 | 0,5469 | 0,0844 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0036 | 0,0087 | 0,1079 |
| 3 | 0,0795 | 0,0604 | 0,2320 | 0,0410 | 0,3546 | 0,1150 | 0,1976 | 0,1069 | 0,1850 | 0,1874 |
| 4 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0076 | 0,0337 | 0,0012 | 0,0346 | 0,0078 | 0,0112 | 0,0159 | 0,0114 |
| 5 | 0,0031 | 0,0291 | 0,0005 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0123 | 0,0158 | 0,0412 | 0,0032 | 0,0072 |
| 6 | 0,0236 | 0,0473 | 0,0949 | 0,0271 | 0,1224 | 0,1069 | 0,0977 | 0,1180 | 0,1005 | 0,0914 |
| 7 | 0,0044 | 0,0248 | 0,0241 | 0,0077 | 0,0214 | 0,0520 | 0,0593 | 0,0234 | 0,0168 | 0,0272 |
| 8 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0118 | 0,0312 | 0,0218 | 0,0219 | 0,0120 | 0,0109 |
| 9 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0061 | 0,0072 | 0,0310 | 0,0133 | 0,0198 | 0,0061 |
| 190 | 0,1661 | 0,1843 | 0,6716 | 0,6620 | 0,6277 | 0,3789 | 0,4331 | 0,3530 | 0,3697 | 0,5171 |
| 209 | 0,8339 | 0,8157 | 0,3284 | 0,3380 | 0,3723 | 0,6211 | 0,5669 | 0,6470 | 0,6303 | 0,4829 |
| 210 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Keterangan:

| | |
|--|--|
| 1 = Sektor Pertanian | 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan |
| 2 = Sektor Pertambangan dan Galian | 9 = Sektor Jasa-Jasa |
| 3 = Sektor Industri Pengolahan | 190 = Input Antara |
| 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih | 209 = Input Primer / Nilai Tambah Bruto |
| 5 = Sektor Bangunan | 210 = Input Total |
| 6 = Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran | 180 = Output Antara |
| 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi | |

**TABEL INPUT OUTPUT WILAYAH JAWA TENGAH
9 SEKTOR (JUTA RUPIAH) TAHUN 2004**

| Sektor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180 | 309 | 310 |
|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2.496.163,67 | 1.062,61 | 22.047.445,35 | 0,16 | 730.689,95 | 1.228.714,98 | 25.748,40 | 470.197,62 | 52.286,45 | 27.052.309,19 | 25.356.968,86 | 52.409.278,05 |
| 2 | 48,31 | 34.493,09 | 36.697.647,93 | 3.821.928,99 | 2.471.528,83 | 1.478,03 | 14.530,92 | 124.828,29 | 59.498,30 | 43.225.982,69 | -596.437,57 | 42.629.545,12 |
| 3 | 3.671.361,23 | 137.413,21 | 44.596.654,97 | 286.476,84 | 10.380.217,61 | 7.209.217,53 | 3.820.557,20 | 3.714.386,04 | 1.262.784,63 | 75.079.069,26 | 149.822.049,56 | 224.901.118,82 |
| 4 | 7.403,45 | 825,54 | 1.467.296,77 | 235.147,00 | 36.049,08 | 2.172.225,76 | 150.104,09 | 388.097,83 | 108.440,29 | 4.565.589,81 | 2.422.149,20 | 6.987.739,01 |
| 5 | 145.184,55 | 66.279,17 | 101.337,59 | 18.614,28 | 23.641,69 | 771.661,45 | 304.484,33 | 1.431.548,69 | 21.958,96 | 2.884.710,71 | 26.391.623,17 | 29.276.333,88 |
| 6 | 1.088.116,35 | 107.578,38 | 18.248.604,48 | 189.616,26 | 3.583.445,48 | 6.702.419,10 | 1.889.076,00 | 4.103.006,57 | 686.195,05 | 36.598.057,67 | 26.100.394,15 | 62.698.451,82 |
| 7 | 202.612,82 | 56.426,32 | 4.626.347,45 | 53.824,96 | 627.842,30 | 3.261.163,29 | 1.145.845,35 | 812.539,09 | 114.877,55 | 10.901.479,13 | 8.429.624,07 | 19.331.103,20 |
| 8 | 32.324,49 | 6.010,39 | 746.758,75 | 11.720,83 | 345.882,91 | 1.956.401,66 | 421.653,87 | 762.250,45 | 82.095,35 | 4.365.098,70 | 30.391.464,41 | 34.756.563,11 |
| 9 | 22.699,01 | 9.090,73 | 571.136,38 | 8.496,34 | 177.904,37 | 452.181,98 | 599.773,63 | 463.934,59 | 135.463,65 | 2.440.680,68 | 4.385.211,60 | 6.825.892,28 |
| 190 | 7.665.913,88 | 419.179,44 | 129.103.229,67 | 4.625.825,66 | 18.377.202,22 | 23.755.463,78 | 8.371.773,79 | 12.270.789,17 | 2.523.600,23 | 207.112.977,84 | 272.703.047,45 | 479.816.025,29 |
| 209 | 38.492.121,60 | 1.855.129,61 | 63.136.583,39 | 2.361.913,35 | 10.899.131,66 | 38.942.988,04 | 10.959.329,41 | 22.485.773,94 | 4.302.292,05 | 193.435.263,05 | | |
| 210 | 46.158.035,48 | 2.274.309,05 | 192.239.813,06 | 6.987.739,01 | 29.276.333,88 | 62.698.451,82 | 19.331.103,20 | 34.756.563,11 | 6.825.892,28 | 400.548.240,89 | | |

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Keterangan:

| | |
|---|---|
| 1. = Sektor Pertanian | 9. = Sektor Jasa-Jasa |
| 2. = Sektor Pertambangan dan Galian | 190 = Input Antara |
| 3. = Sektor Industri Pengolahan | 209 = Input Primer / Nilai Tambah Bruto |
| 4. = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih | 210 = Input Total |
| 5. = Sektor Bangunan | 180 = Output Antara |
| 6. = Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran | 309 = Jumlah Permintaan Akhir |
| 7. = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi | 310 = Jumlah Permintaan / Total Output |
| 8. = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | |

ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis di wilayah Kedungsepur. Sektor basis dan non basis tersebut akan menggambarkan spesialisasi wilayah (masing-masing Kabupaten/Kota) yang akan menunjukkan potensi ekonomi wilayah studi.

Location Quotient dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ_i = (e_i/e) / (E_i/E)$$

Sumber: Tarigan (2005)

Keterangan :

| | | |
|--------|---|--|
| LQ_i | = | nilai LQ untuk sektor i di Kabupaten analisis |
| e_i | = | PDRB sektor i di Kabupaten analisis |
| e | = | PDRB seluruh sektor di Kabupaten analisis |
| E_i | = | PDRB sektor i di Provinsi Kabupaten analisis |
| E | = | PDRB seluruh sektor di Provinsi Kabupaten analisis |

Penentuan sektor basis dan non-basis dapat dikehui dari nilai LQ yaitu:

- $KL > 1$, merupakan sektor basis yang memiliki potensi ekspor.
- $KL = 1$, sector tersebut mampu dipenuhi secara swasembada di wilayah studi, namun belum dapat melakukan ekspor atau impor ke wilayah lainnya.
- $KL < 1$, merupakan sektor non-basis dan wilayah sudi harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan sektor tersebut .

Pendapatan masing-masing sektor baik dalam wilayah studi maupun wilayah nasional dapat diperoleh melalui tabel PDRB masing Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur. Sektor-sektor basis yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan pemanfaatannya akan mendorong spesialisasi wilayah yang bersangkutan dan menunjukkan sektor-sektor basis yang akan digunakan dalam mengkaji keterkaitan antar sektor dan keterkaitan antar daerah di wilayah Kedungsepur.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2001 (JUTA RUPIAH)

| No. | Lapangan Usaha | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang | Kedungsepur |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 92.644,70 | 33.178,67 | 710.293,85 | 958.253,65 | 1.008.477,97 | 663.229,71 | 3.466.078,54 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 35.422,97 | 4.310,61 | 20.239,56 | 5.444,62 | 20.634,94 | 7.047,31 | 93.100,01 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4.299.803,97 | 128.665,30 | 1.716.161,59 | 250.234,87 | 81.881,21 | 1.631.842,64 | 8.108.589,58 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 194.826,35 | 21.553,07 | 78.666,95 | 12.849,31 | 12.293,16 | 62.251,19 | 382.440,04 |
| 5 | Bangunan | 494.559,20 | 36.705,53 | 73.320,66 | 62.286,49 | 88.905,87 | 65.774,85 | 821.552,60 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 4.821.611,61 | 116.451,90 | 673.251,64 | 446.023,52 | 457.700,60 | 689.461,34 | 7.204.500,61 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.001.380,20 | 72.235,44 | 89.741,43 | 91.905,24 | 85.393,54 | 115.889,02 | 1.456.544,87 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 882.849,48 | 54.862,36 | 105.780,32 | 76.224,72 | 90.442,52 | 151.125,54 | 1.361.284,95 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1.801.121,94 | 185.160,47 | 351.328,14 | 274.626,78 | 349.476,91 | 528.547,88 | 3.490.262,13 |
| | Jumlah Total PDRB | 13.624.220,43 | 653.123,36 | 3.818.784,14 | 2.177.849,20 | 2.195.206,73 | 3.915.169,47 | 26.384.353,33 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2002, data diolah

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2002 (JUTA RUPIAH)

| No. | Lapangan Usaha | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang | Kedungsepur |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 190.047,38 | 42.062,03 | 998.119,33 | 984.647,64 | 978.467,03 | 699.364,72 | 3.892.708,13 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 26.947,02 | 3.459,94 | 35.085,93 | 5.594,59 | 30.034,61 | 7.431,27 | 108.553,35 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4.105.874,26 | 134.055,77 | 1.529.126,01 | 257.127,30 | 79.647,25 | 1.720.750,97 | 7.826.581,56 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 180.119,53 | 30.325,37 | 60.271,39 | 13.203,23 | 31.561,29 | 65.642,85 | 381.123,66 |
| 5 | Bangunan | 1.821.050,97 | 35.752,73 | 129.844,86 | 64.002,10 | 101.798,80 | 69.358,48 | 2.221.807,94 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 4.393.781,85 | 117.570,16 | 710.531,49 | 458.308,72 | 414.132,46 | 727.025,54 | 6.821.350,23 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.306.221,14 | 146.403,01 | 95.231,30 | 94.436,66 | 72.503,69 | 122.203,04 | 1.836.998,84 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 460.935,80 | 49.117,60 | 93.225,01 | 78.324,24 | 205.501,33 | 159.359,37 | 1.046.463,36 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1.697.662,00 | 119.673,27 | 297.616,44 | 282.191,06 | 408.274,01 | 557.344,96 | 3.362.761,74 |
| | Jumlah Total PDRB | 14.182.639,94 | 678.419,87 | 3.949.051,76 | 2.237.835,55 | 2.321.920,47 | 4.128.481,21 | 27.498.348,80 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2003, data diolah

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2003 (JUTA RUPIAH)

| No. | Lapangan Usaha | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang | Kedungsepur |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 196.904,55 | 46.313,92 | 979.932,89 | 997.322,28 | 984.491,25 | 725.588,40 | 3.930.553,28 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 26.648,74 | 3.496,74 | 36.515,19 | 4.966,80 | 31.377,15 | 7.709,91 | 110.714,52 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4.260.836,73 | 141.439,43 | 1.613.583,82 | 249.578,40 | 82.577,86 | 1.785.272,98 | 8.133.289,22 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 185.060,66 | 33.611,49 | 50.413,48 | 12.389,08 | 32.913,16 | 68.104,22 | 382.492,09 |
| 5 | Bangunan | 1.930.552,85 | 38.749,55 | 130.408,82 | 154.575,13 | 105.850,39 | 71.959,18 | 2.432.095,91 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 4.580.621,56 | 122.671,23 | 741.004,10 | 468.905,37 | 422.177,16 | 754.286,40 | 7.089.665,82 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.397.578,14 | 157.139,06 | 97.038,10 | 103.305,57 | 75.735,60 | 126.785,22 | 1.957.581,68 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 472.274,81 | 52.308,32 | 93.711,70 | 79.604,94 | 216.132,09 | 165.334,78 | 1.079.366,65 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1.754.375,10 | 117.889,98 | 319.118,82 | 230.082,95 | 421.667,89 | 578.243,41 | 3.421.378,14 |
| | Jumlah Total PDRB | 14.804.853,13 | 713.619,71 | 4.061.726,92 | 2.300.730,50 | 2.372.922,55 | 4.283.284,51 | 28.537.137,32 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2004, data diolah

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2004 (JUTA RUPIAH)

| No. | Lapangan Usaha | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang | Kedungsepur |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 203.172,01 | 46.498,08 | 1.027.499,92 | 1.027.740,61 | 1.021.487,75 | 736.210,90 | 4.062.609,26 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 27.916,76 | 3.605,07 | 37.149,42 | 5.080,04 | 33.956,35 | 7.822,78 | 115.530,43 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4.415.501,52 | 147.955,11 | 1.641.119,86 | 260.160,52 | 85.445,75 | 1.811.409,11 | 8.361.591,87 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 204.722,94 | 35.609,29 | 44.680,42 | 14.370,09 | 33.900,74 | 69.101,26 | 402.384,73 |
| 5 | Bangunan | 2.059.636,82 | 37.595,75 | 124.340,62 | 159.583,36 | 109.354,04 | 73.012,65 | 2.563.523,24 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 4.769.113,86 | 130.444,76 | 759.013,36 | 481.847,16 | 437.549,78 | 765.329,04 | 7.343.297,97 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.504.403,40 | 157.887,46 | 98.496,78 | 105.061,76 | 78.855,12 | 128.641,34 | 2.073.345,85 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 486.992,44 | 55.253,25 | 100.996,97 | 87.963,46 | 225.681,34 | 167.755,26 | 1.124.642,72 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1.837.853,64 | 120.880,28 | 334.328,84 | 237.678,65 | 436.430,39 | 586.708,81 | 3.553.880,61 |
| | Jumlah Total PDRB | 15.509.313,38 | 735.729,06 | 4.167.626,19 | 2.379.485,65 | 2.462.661,26 | 4.345.991,15 | 29.600.806,69 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005, data diolah

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
WILAYAH KEDUNGSEPUR
TAHUN 2005 (JUTA RUPIAH)

| No. | Lapangan Usaha | Kota Semarang | Kota Salatiga | Kab. Kendal | Kab. Demak | Kab. Grobogan | Kab. Semarang | Kedungsepur |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 210.206,97 | 50.173,32 | 1.030.409,07 | 1.060.718,89 | 1.074.228,97 | 598.179,73 | 4.023.916,95 |
| 2 | Pertambangan dan Galian | 52.874,85 | 3.701,35 | 38.626,20 | 5.269,02 | 36.061,65 | 5.181,75 | 141.714,82 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6.599.845,24 | 151.784,20 | 1.716.524,19 | 279.777,91 | 88.705,56 | 2.108.699,27 | 10.945.336,37 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 216.911,02 | 34.608,67 | 45.258,31 | 16.245,52 | 36.437,78 | 36.364,10 | 385.825,40 |
| 5 | Bangunan | 2.230.741,60 | 32.974,80 | 117.456,49 | 162.839,05 | 113.126,76 | 169.911,14 | 2.827.049,84 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 2.901.692,50 | 129.032,94 | 787.223,22 | 500.715,22 | 460.263,40 | 976.623,22 | 5.755.550,50 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.551.029,48 | 184.126,10 | 100.889,75 | 108.678,19 | 82.909,04 | 93.210,70 | 2.120.843,26 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 662.177,00 | 52.365,00 | 106.959,14 | 91.403,36 | 237.176,82 | 141.176,00 | 1.291.257,32 |
| 9 | Jasa-Jasa | 1.936.383,72 | 128.074,72 | 336.447,63 | 245.129,93 | 450.373,30 | 354.843,47 | 3.451.252,77 |
| | Jumlah Total PDRB | 16.361.862,38 | 766.841,10 | 4.279.794,00 | 2.470.777,09 | 2.579.283,28 | 4.484.189,38 | 30.942.747,23 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2006, data diolah